



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Daerah memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Induk Sistem Penyedia Air Minum dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
6. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja Pemerintah Daerah yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi, kesehatan masyarakat, perumahan dan Kawasan permukiman.
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
8. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
9. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar baik sendiri atau Bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).
10. Sanitasi Layak untuk Pengelolaan Sampah adalah pengurangan sampah dengan metode Reduse, Reuse dan Recycle (3R) serta penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA.
11. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, seperti rumah tangga, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah ini meliputi air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non-kakus (*grey water*).
12. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi arahan yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi Pembangunan Sanitasi; dan
- b. memberi pedoman bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan dalam menyusun dokumen perencanaan Sanitasi pada bidang urusan Sanitasi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan SSK ini yaitu :

- a. untuk membangun SSK secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. menggambarkan SSK;
- c. tersusunnya Profil SSK;
- d. tersusunnya kerangka pengembangan SSK;
- e. tersusunnya kerangka kerja logis SSK;
- f. tersusunnya pengembangan SSK;
- g. tersusunnya program kegiatan dan indikasi pendahuluan SSK;
- h. terlaksananya pengembangan SSK; dan
- i. terlaksananya pemantauan dan evaluasi capaian SSK.

Pasal 4

Fungsi disusunnya SSK ini yaitu:

- a. sebagai kebijakan pengembangan Sanitasi daerah jangka menengah;
- b. sebagai peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. sebagai internalisasi program/kegiatan kedalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang terkait SSK;
- d. acuan pengalokasian APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi; dan
- e. sebagai pemantauan, evaluasi dan pengendalian Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan Sanitasi.

BAB II STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 5

- (1) SSK Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mendukung percepatan pencapaian target Sanitasi sampai dengan tahun 2029 dan target standar pelayanan minimal Sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan APBD sampai dengan Tahun 2029.
- (2) SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi Pembangunan Sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Kerangka Penyusunan SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Profil Sanitasi Kabupaten.
 - c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi Kabupaten.
 - d. BAB IV : Strategi Pembangunan Sanitasi Kabupaten.

- e. BAB V : Kebijakan Pembangunan Sanitasi.
- f. BAB VI : Penutup.

- (4) SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 dilakukan melalui forum:

- a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. rencana kerja Perangkat Daerah;
- c. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- d. integrasi SSK dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pada Perangkat Daerah;
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2029, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 bersumber dari;
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 dengan dana diluar anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pengembangan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK 2025-2029

Pasal 9

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrikprogram/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab Daerah.

- (2) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP.
- (7) Ketua Pokja PKP melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Pokja PKP.
- (8) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja PKP.
- (9) Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (10) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN ROKAN
HULU TAHUN 2025 - 2029

BAB 1. PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Rokan Hulu adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memberikan layanan Sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada tahun 2016 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Rokan Hulu menyusun dokumen Pemutakhiran SSK, peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan, adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019, serta penyesuaian atau perubahan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2017 - 2022 yang menjadi acuan dari SSK.

Sejak diberlakukannya RPJMN 2020-2024, terjadi perubahan paradigma terhadap pembangunan sanitasi dan variabelnya dengan mengadopsi SDGs dengan target akses sanitasi layak sebesar 90%, akses sanitasi aman 15% dan BABs 0% ditahun 2024. Dari target tersebut telah didistribusikan kepada 34 Provinsi di Indonesia dimana Provinsi Riau ditargetkan 90% akses sanitasi layak dan didalamnya 11% akses sanitasi aman dan 0% BABS. Sedangkan target Kabupaten Rokan Hulu yang didistribusikan oleh Pokja PPAS Provinsi Riau yaitu target akses layak tahun 2024 sebesar 96,43%, akses aman 11% dan BABS 0%. Untuk Sektor persampahan Target dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 80% untuk penanganan dan 20% untuk pengurangan. Distribusi target untuk Provinsi Riau adalah 80% Penanganan dan 20% Pengurangan sampah. Untuk Kabupaten Rokan Hulu merujuk pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Persampahan (Jakstrada), penanganan sampah di Targetkan 70% dan pengurangan sampah 30% ditahun 2024.

Definisi Akses sanitasi (Air Limbah Domestik) yang digunakan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Akses Sanitasi Aman; sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah: tanki septik (septic tank) yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir; atau rumah tangga yang terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
- b. Akses sanitasi Layak: Layak Sendiri Perkotaan dan Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan, leher angsa dan Bangunan bawah tanki septik yang tidak disedot.
- c. Akses Sanitasi Layak Khusus Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi:

rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah : Lubang tanah.

- d. Layak Bersama Perkotaan dan Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas:klosetnya menggunakan, leher angsa dan Bangunan bawah tanki septik yang tidak disedot.
- e. Akses Layak Bersama Khusus Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas :klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah: Lubang tanah.
- f. Akses Sanitasi Belum layak.
 1. Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah di Perkotaan
 - Pengguna Fasilitas sanitasi : sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu.
 - Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa.
 - Bangunan bawah: Lubang tanah.
 2. Akses Sanitasi Dasar (non leher angsa)
 - Pengguna fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu.
 - Bangunan atas: klosetnya menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/cemplung.
 - Bangunan bawah tanki septik, IPAL, atau Lubang Tanah
 3. Fasilitas Umum
- g. Buang Air Besar sembarangan.
 1. BABs Terbuka

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
 2. BABs Tertutup

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tertutup, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya.

Dengan perubahan target akses dan capaian sanitasi, oleh karena itu, Dokumen SSK Kabupaten Rokan Hulu perlu disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan baik oleh Pokja Provinsi maupun RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029.

Untuk menghasilkan sebuah Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Pokja.

Peran SSK dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

- a. Memberikan arahan serta koridor dalam penyusunan strategi sanitasi didalam penetapan sistem dan pelayanan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu selama 5 tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029.
- c. Sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan

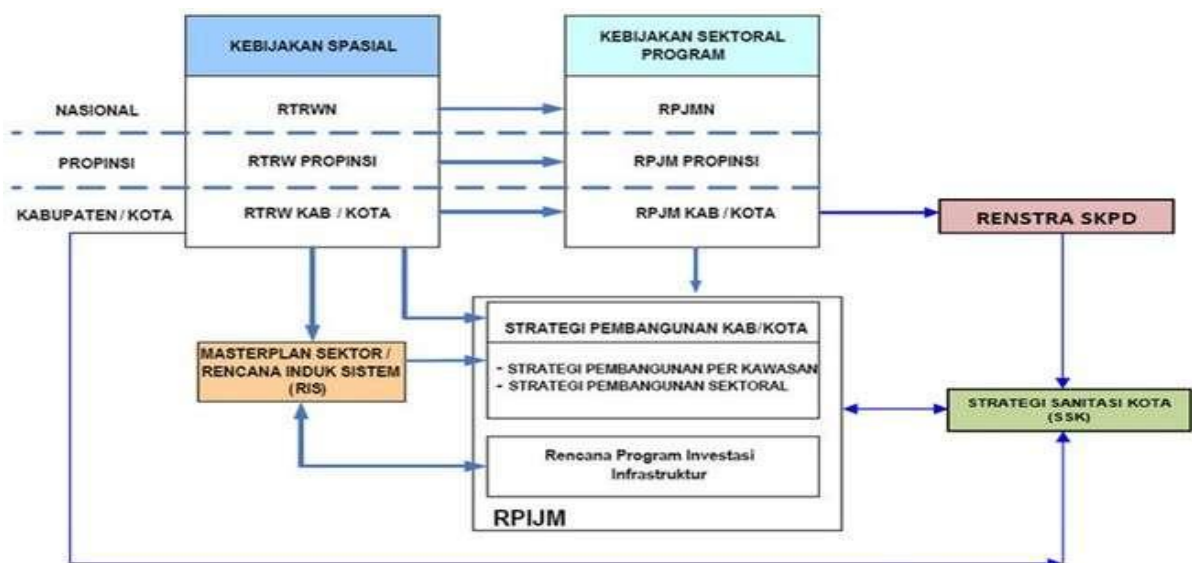
sektor sanitasi.

Kaitan antara pemutakhiran SSK dengan SSK sebelumnya adalah menyangkut visi misi pembangunan sanitasi, tujuan, sasaran serta strategi pengembangan sanitasi. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu yang telah dirumuskan dalam SSK sebelumnya akan dikaji kembali dalam pemutakhiran SSK sejalan dengan perkembangan baru tentang data, permasalahan, kebijakan maupun adanya isu percepatan pembangunan sanitasi sesuai dengan target RPJMN 2025-2029, SPM dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029.

Dokumen SSK merupakan dokumen penting dalam pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi. Untuk itu, dokumen SSK ini dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Masukan terhadap RPJMD menyangkut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi maupun program dan kegiatan sanitasi, sedangkan masukan terhadap RTRW menyangkut lokasi pengembangan untuk sanitasi. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :

- a. Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari layanan sanitasi sektor air limbah domestik, dan layanan sanitasi sektor persampahan.
- b. Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen: (1) Aspek Regulasi Daerah dan Kelembagaan, (2) Aspek Keuangan/Pendanaan, (3) Aspek Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis, (4) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, dan (5) Monitoring dan evaluasi.

Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dalam dokumen Perencanaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

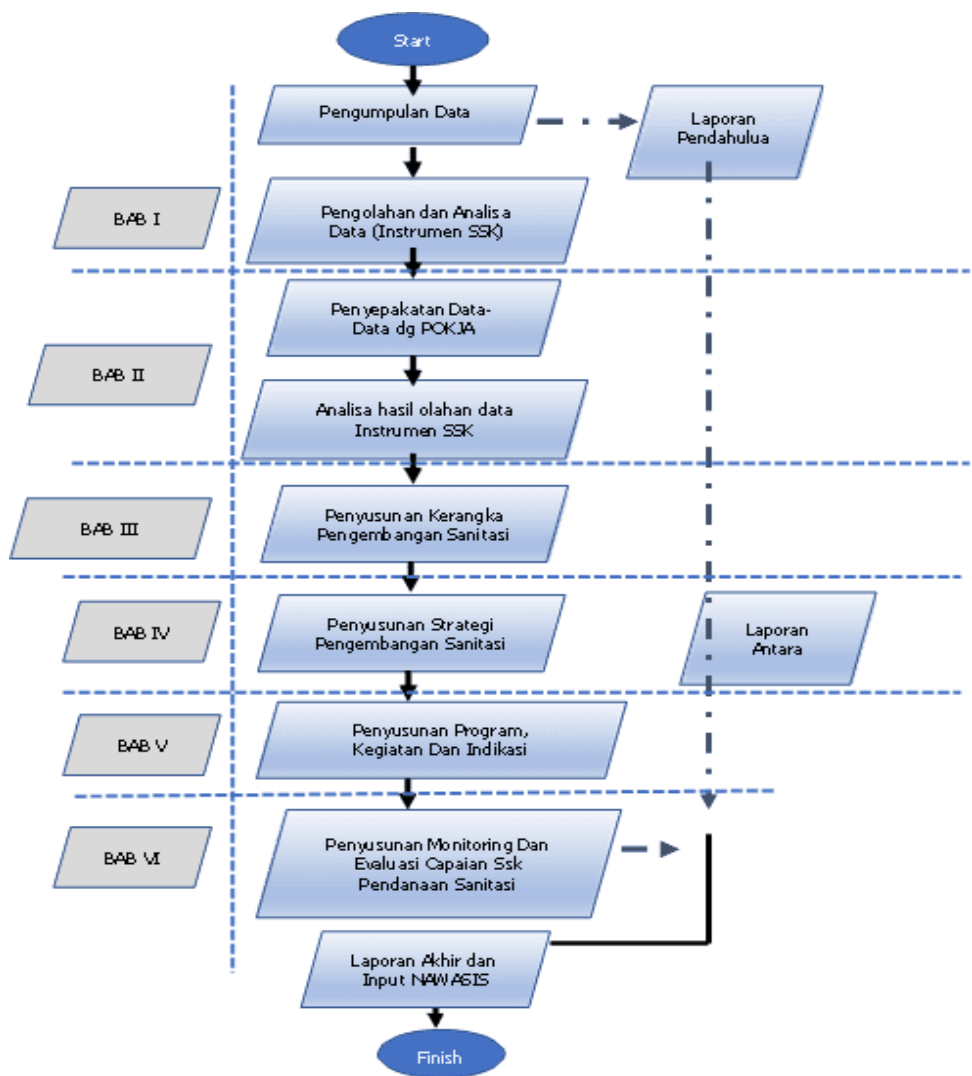


Gambar 1.1 Skematik Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten

b. METODOLOGI PENYUSUNAN

Metode merupakan seperangkat langkah dari apa yang harus dikerjakan

secara tersusun dan sistematis. Berikut ini dijelaskan metodologi kerja secara umum :



Gambar 1.2 Skema Penyusunan Dokumen SSK

1. Start.
2. Pengumpulan data primer/EHRA.
Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) adalah sebuah studi partisipatif di Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Hasil pengolahan dan analisis data yang dapat menggambarkan penetapan area beresiko dari masing masing wilayah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat desa yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyusunan dan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SKK) sebagai bahan review kebijakan dan advokasi untuk menuju penyehatan sanitasi total yang layak dan aman yang bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Pengumpulan data sekunder.
Data sekunder data teknis, partisipasi swasta, pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan, dan kelembagaan serta keuangan. Data –data tersebut dilakukan penginputan pada tools Instrumen SSK. Sementara Output dari hasil Instrumen SSK antara lain:

- a. Rantai layanan air limbah domestik.
 - b. Rantai layanan persampahan.
 - c. Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Akses Air Limbah Domestik.
 - d. Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Sampah Perkotaan.
 - e. Pemetaan permasalahan mendesak untuk air limbah domestik dan persampahan
4. Pengamatan Langsung
- Dilakukan pada daerah atau lokasi yang telah ada infrastruktur terbangun baik air limbah dan persampahan untuk melihat keberfungsian atas bangunan tersebut.
5. Forum Group Diskusi/ rapat dengan Pokja PKP Kabupaten Rokan Hulu terkait :
- Menyepakati skor persepsi pokja terhadap area beresiko setiap desa/kelurahan.
 - Menyepakati area beresiko.
 - Penyampaian hasil Instrumen SSK, antara lain : capaian akses eksisting dan Analisis Gap Terhadap Target Akses.
6. Penyusunan Kerangka Pengembangan Sanitasi
- Visi Dan Misi Sanitasi
- Berisikan penjelasan singkat mengenai visi misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten/kota terbaru.
- Rencana Pengembangan Sanitasi
- Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi.
- Deskripsikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 2 (dua) sektor:
 - a. Air limbah domestik
 - b. Sampah Perkotaan
 - Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah
- Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi yang hasilnya akan menjadi bagian dari Bab 4 dan Bab 5.
7. Penyusunan Strategi Pengembangan Sanitasi
- Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin).

- Air Limbah Domestik

Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Gunakan matrik Kerangka Kerja Logis, analisis SWOT atau perangkat analisis lainnya sebagai alat bantu.

- Pengelolaan Persampahan

Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan sampah perkotaan selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Gunakan matrik Kerangka Kerja Logis, analisis SWOT atau perangkat analisis lainnya sebagai alat bantu.

8. Penyusunan Program, Kegiatan Dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Pada dasarnya Bab 5 (beserta Lampiran 5) merupakan hasil pembahasan yang diperoleh saat internalisasi dan eksternalisasi program dan kegiatan setelah dilakukan perbaikan- perbaikan seperlunya. Bab ini memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari matriks indikatif program dan kegiatan. Lengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok sasaran / penerima manfaat), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Secara detail informasi dimasukkan dalam Lampiran 5.

9. Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK.

Bab ini menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan, yang pelaporannya dilakukan melalui sistem Monev berbasis web: www.nawasis.org.

Pelaporan pemantauan ini mencakup 3 (tiga) modul yaitu:

1. Modul Data Teknis yang memuat informasi capaian akses air limbah domestik dan capaian akses sampah perkotaan;
2. Modul Program dan Pendanaan yang memuat informasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai investasinya serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan;
3. Modul Sarana dan Prasarana yang memuat informasi tentang sistem, jenis dan jumlah infrastruktur eksisting termasuk informasi mengenai keberfungsian.

1.3. DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan informasi terkait peraturan-peraturan baik skala nasional, provinsi, dan kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan pemutakhiran SSK Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut :

A. Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis

Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

D. Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang.

E. Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang SPM Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi.
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.

F. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Bab. Substansi masing-masing Bab dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari Bab 1 memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan dokumen pemutakhiran SSK tahun 2024.

BAB 2 PROFIL SANITASI KABUPATEN

Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kabupaten Rokan Hulu, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrumen SSK dan peta area beresiko sanitasi serta permasalahan mendesak sanitasi.

BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN

Pada bab ini menjelaskan visi dan misi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, serta ditetapkannya tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang merupakan skenario pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, pentahapan pengembangan sanitasi serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

BAB 4 STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN

Memuat strategi pengembangan sanitasi untuk sub sektor air limbah domestik, pengelolaan persampahan.

BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI

Pada bab ini berisi ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah serta antisipasi *funding gap*.

BAB 6 PENUTUP

Pada bab 6 ini dirumuskannya strategi untuk monitoring dan evaluasi SSK yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, serta monitoring dan evaluasi capaian SSK yang telah dirumuskan pada dokumen SSK sebelumnya.

BAB 2. PROFIL SANITASI KABUPATEN

2.1. GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Geografi

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0o 25' 20" dan 10o 25' 41" Lintang Utara serta 100o 02' 56" dan 100o 56' 59" Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.588,13 km², terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan.

2.1.1.2. Karakteristik lokasi dan wilayah

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km² yang terbagi dalam 16 kecamatan. kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 1.119,49 km² (14,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km² atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa.

Secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

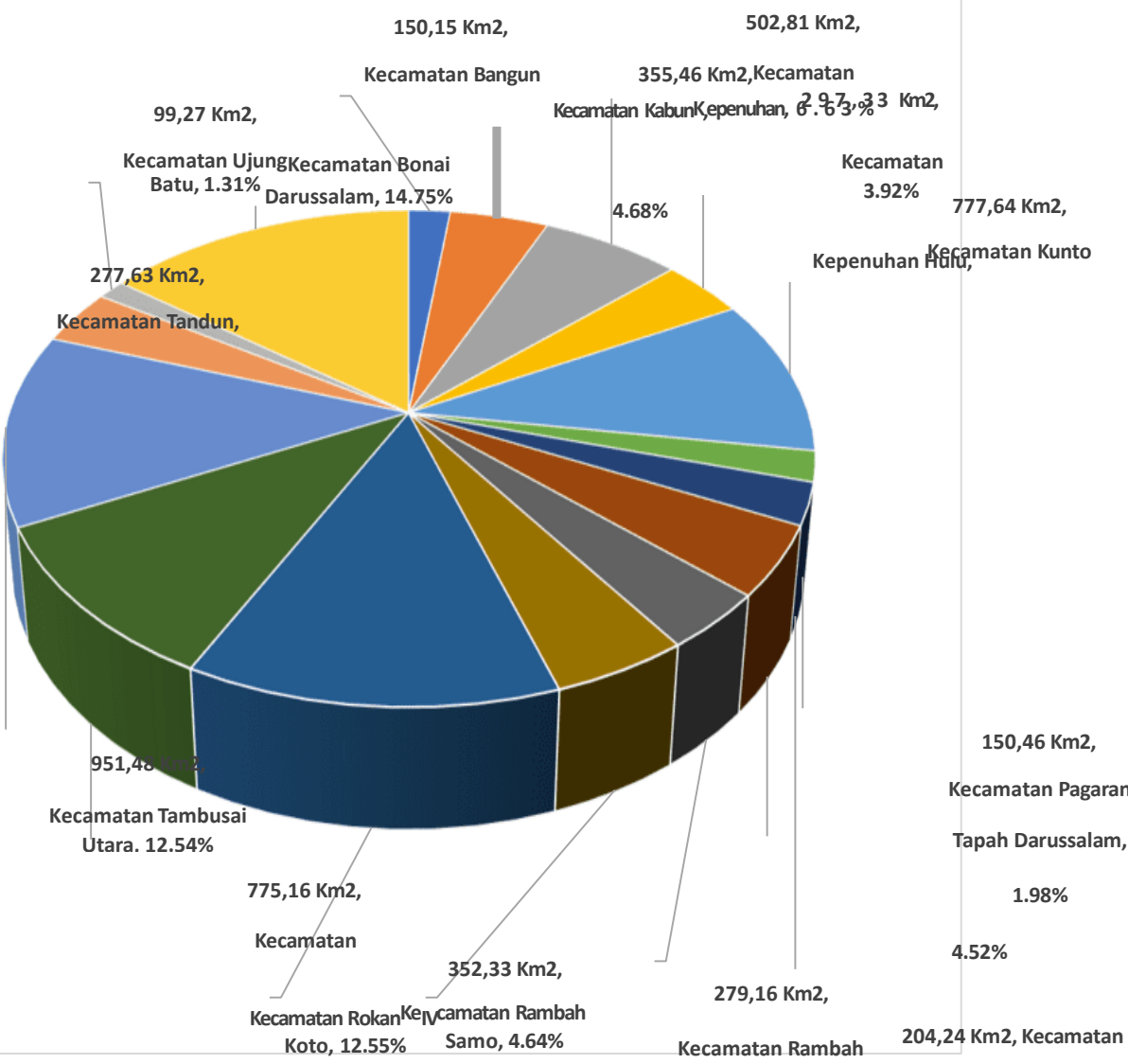
**Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km2/Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
1	Kecamatan Bangun Purba	Tangun	150,15	1,98
2	Kecamatan Kabun	Kabun	355,46	4,68
3	Kecamatan Kepenuhan	Kota Tengah	502,81	6,63
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92
5	Kecamatan Kunto Darussalam	Kota Lama	777,64	10,25
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	150,46	1,98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	Pendalian	204,24	2,69
8	Kecamatan Rambah	Pasir Pengaraian	343,23	4,52
9	Kecamatan Rambah Hilir	Muara Rumbai	279,16	3,68
10	Kecamatan Rambah Samo	Rambah Samo	352,33	4,64
11	Kecamatan Rokan IV Koto	Rokan	952,31	12,55

12	Kecamatan Tambusai	Dalu - Dalu	775,16	10,22
13	Kecamatan Tambusai Utara	Rantau Kasai	951,48	12,54
14	Kecamatan Tandun	Tandun	277,63	3,66
15	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu	99,27	1,31
16	Kecamatan Bonai Darussalam	Sontang	1.119,49	14,75
Rokan Hulu		Pasir pengaraian	7.588,13	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2 Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

2.1.1.3.Kondisi Topografi

Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata- rata wilayah 72 mdpl. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Rokan IV Koto,Tandun,Kabun dan Kecamatan Bangun Purba, kemudian Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah (111 mdpl). Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadap langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl.Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto (111 mdpl).

Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

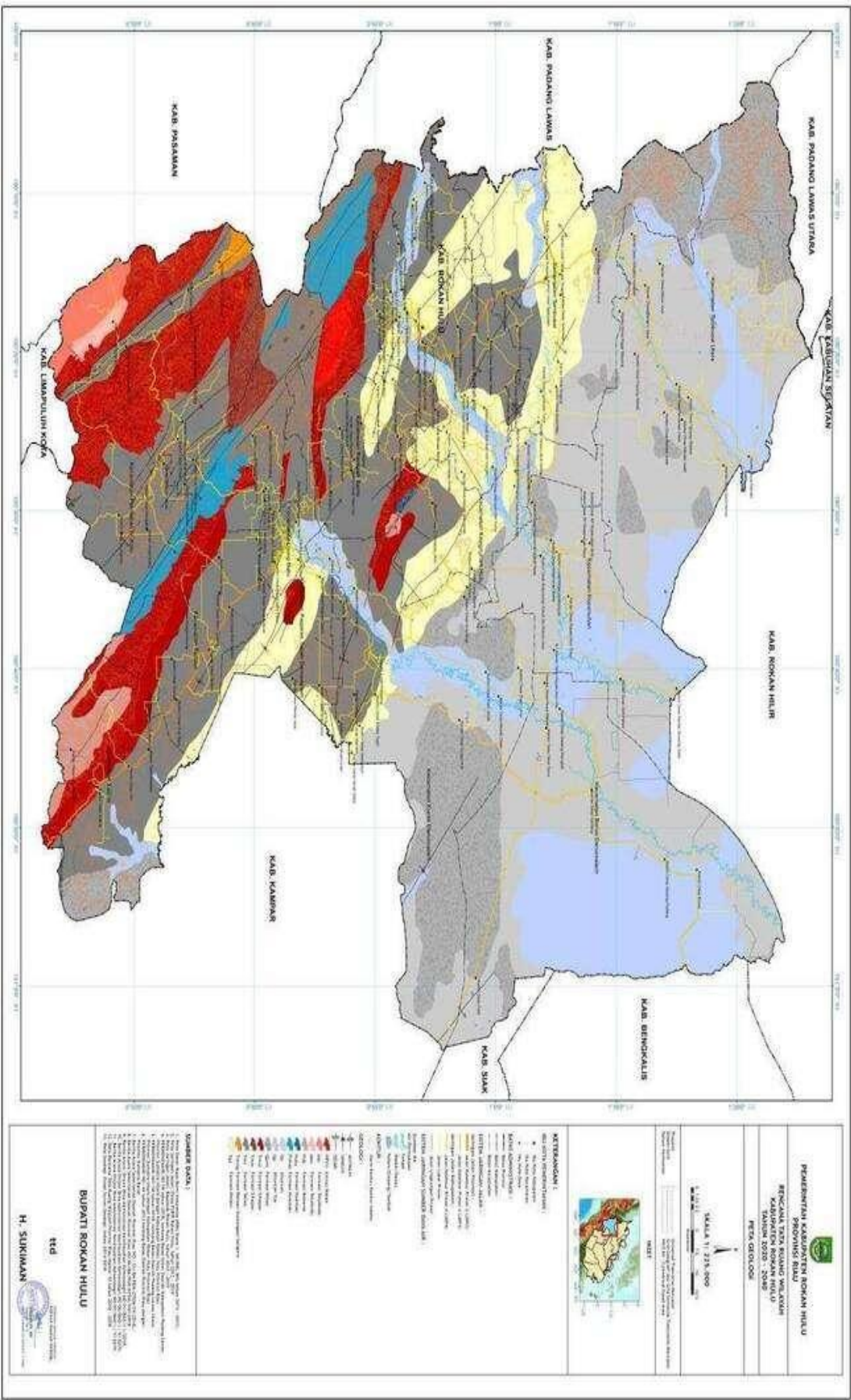
No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota Kabupate n (Km)
1	Rokan IV Koto	97	57
2	Pendalian IV Koto	111	73
3	Tandun	70	55
4	Kabun	63	74
5	Ujung Batu	66	35
6	Rambah Samo	69	12
7	Rambah	67	-
8	Rambah Hilir	55	15
9	Bangun Purba	77	14
10	Tambusai	64	34
11	Tambusai Utara	49	64
12	Kepenuhan	29	45
13	Kepenuhan Hulu	49	32
14	Kunto Darussalam	41	55
15	Pagaran tapah Darussalam	52	40

16	Bonai Darussalam	21	111
----	------------------	----	-----

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa struktur ntiklin, sinklin dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga(Aspden, J.A., dkk., 1982) dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982). Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Untuk melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai.Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola- pola aliran sungai yang ada. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi : Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan.

2.1.1.6. Klimatologi

Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan.

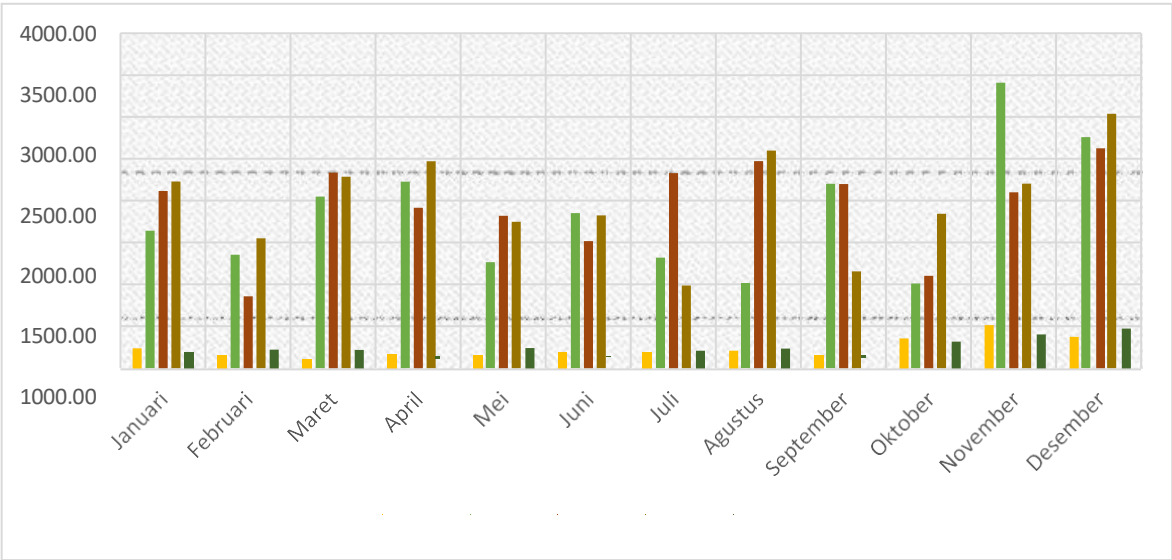
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2023

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan (hari)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	249,28	1643	2122,70	2234,50	207,72	16,40	126	130	124	16
Februari	178,30	1355	864,00	1553,20	234,09	13,30	116	66	117	15
Maret	126,70	2050	2343,00	2290,30	232,33	10,10	117	112	128	16
April	189,10	2231	1920,50	2475,00	132,33	14,30	120	112	254	13
Mei	177,80	1266	1824,50	1751,50	252,72	10,10	95	127	102	14
Juni	203,90	1853	1523,50	1827,00	152,72	15,10	86	79	108	11
Juli	203,60	1323	2334,50	989,50	221,56	9,70	103	72	75	12
Agustus	221,80	1018	2479,00	2603,50	246,44	6,60	76	127	133	16
September	177,80	2206	2203,00	1158,00	135,44	8,70	138	128	110	9
Oktober	368,10	1012	1108,00	1847,50	329,00	14,80	82	85	145	16
November	527,30	3411	2107,00	2208,50	415,50	16,00	179	119	131	19
Desember	387,10	2763	2631,50	3041,50	486,94	22,30	134	158	166	23

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2023, rata rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli (25,80 o C), sedangkan terendah

pada bulan Januari (24,00 o C). Kelembapan udara tertinggi di bulan Maret (93,00 %) dan terendah di bulan Oktober (86,00%). Kecepatan angin tertinggi di bulan Februari (8,50 knot) dan terendah di bulan September (4,60). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan Desember (486,94 mm) terendah di bulan April (132,33 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan Desember (23 hari) dan terendah di bulan September (9 hari). Jumlah curah dan hari hujan merupakan rata-rata dari unit pengamatan pada kecamatan Rambah, Rambah samo,Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai,Tandun Rokan IV Koto, Ujung Batu dan Kunto Darussalam.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Gambar 2.4 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tinggi terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Saat itu terjadi cuaca ekstrim, berupa peningkatan intensitas hujan, banjir, angin puting beliung yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Kejadian ini menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur.

2.1.1.7. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670.098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha)

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Danau/Situ	279,60	0,03
2	Empang/Kolam	1.409,64	0,17
3	Hutan Rimba	25.965,39	3,16
4	Kebun Campuran	34.068,33	4,14

5	Perkebunan/Kebun	670.098,57	81,43
6	Permukiman	18.198,28	2.21
7	Pertambangan	119,18	0,01
8	Rawa	983,42	0,12
9	Sawah	1.854,60	0,23
10	Semak Belukar	48.100,09	5,85
11	Semak Belukar Rawa	8.137,83	0,99
12	Sungai	4.438,24	0,54
13	Tanah Terbuka	4.619,38	0,56
14	Tegalan/Ladang	4.570,73	0,56
15	Waduk	39,31	0,00
	Total	822.882,59	100

Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

a. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 2.5 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha)

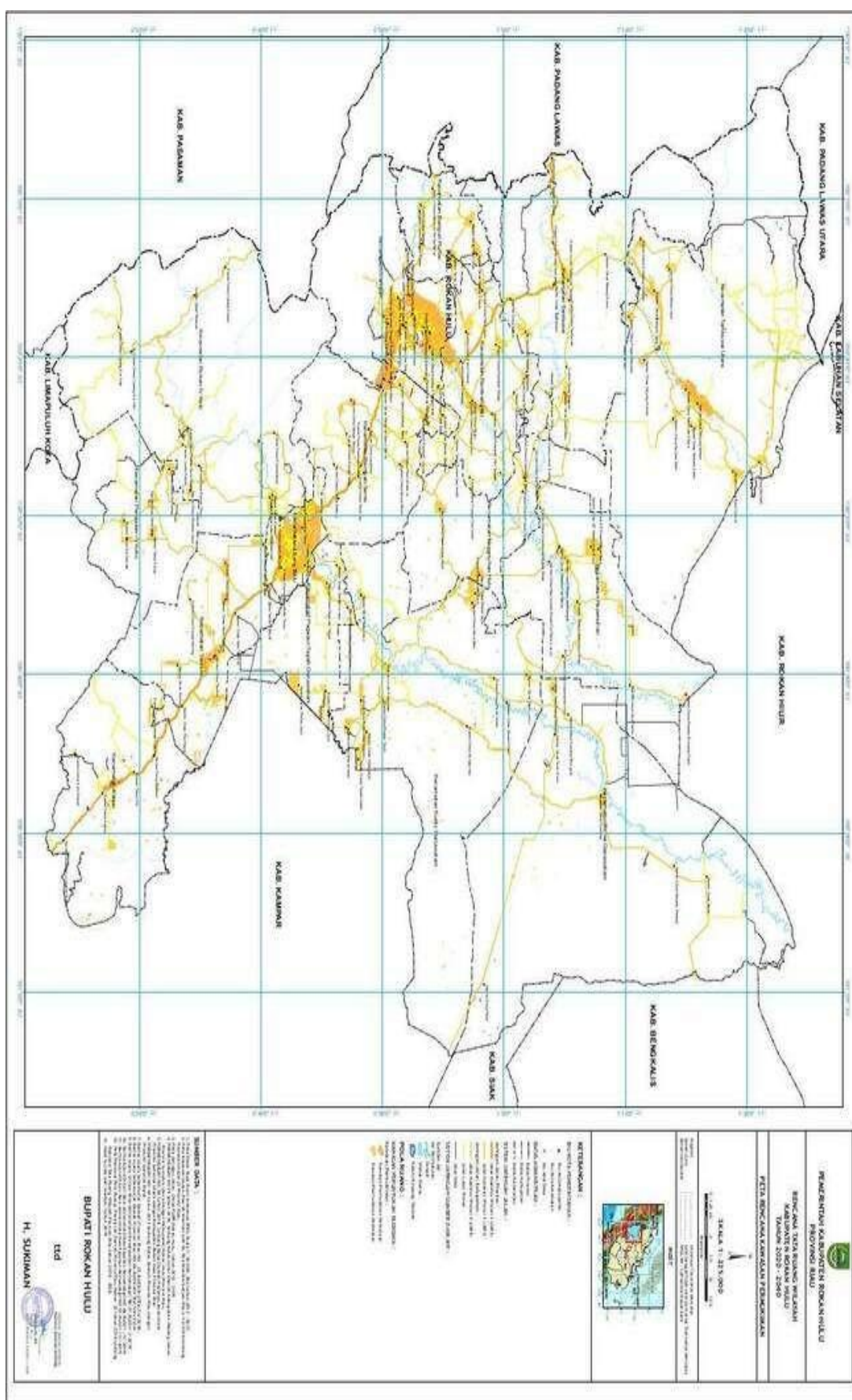
NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	1.280	149	1.429	3,4
2	Kecamatan Kabun	1.498	295	1.793	4,2
3	Kecamatan Kepenuhan	1.566	314	1.880	4,4
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	828	161	989	2,3
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.285	183	3.468	8,2
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.488	314	1.802	4,3
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	766	113	879	2,1

8	Kecamatan Rambah	282	6.200	6.483	15,3
9	Kecamatan Rambah Hilir	2.107	1.044	3.151	7,4
10	Kecamatan Rambah Samo	2.069	465	2.534	6,0
11	Kecamatan Rokan IV Koto	1.115	176	1.291	3,1
12	Kecamatan Tambusai	2.101	215	2.316	5,5
13	Kecamatan Tambusai Utara	4.881	938	5.819	13,8
14	Kecamatan Tandun	2.444	553	2.996	7,1
15	Kecamatan Ujung Batu	97	4.387	4.484	10,6
16	Kecamatan Bonai Darussalam	829	172	1.001	2,4
ROKAN HULU		26.636	15.679	42.316	100

Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat- pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar sebagaimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 42.316 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam belas) hektar.



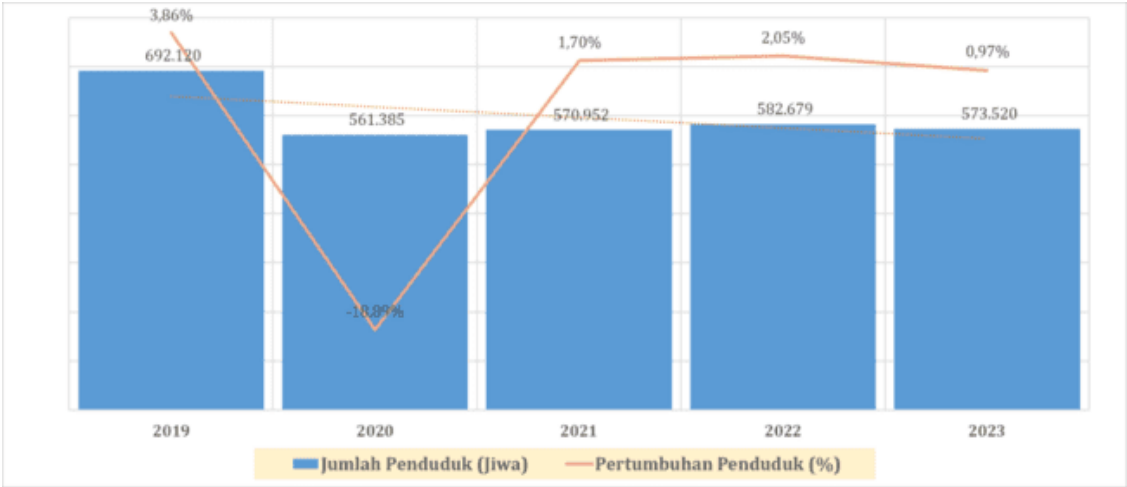
Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2.5 Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu

2.1.2. Demografi

2.1.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk

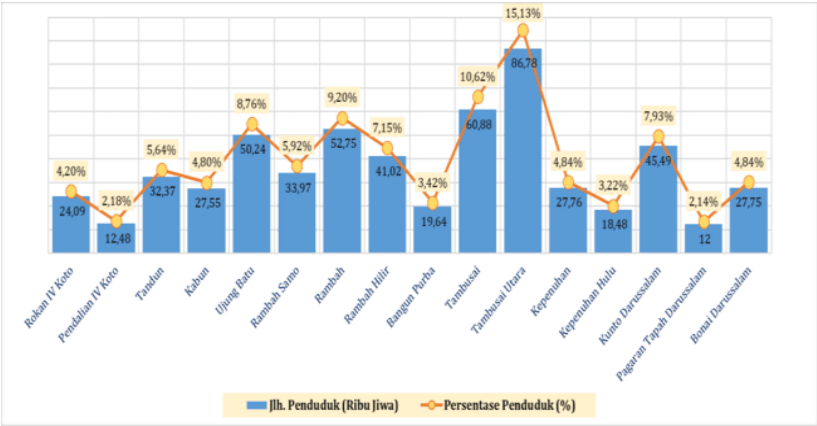
Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 tercatat sebesar 692.120 jiwa, turun signifikan pada tahun 2020 menjadi 561.385 jiwa kembali naik hingga tahun 2022 menjadi 582.679 jiwa dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 573.520. Penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak Covid-19. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023, yaitu:



Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu, 2024

Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut Kecamatan didominasi oleh jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Tambusai Utara yaitu sebesar 86,78 ribu jiwa atau setara 15,13% dari jumlah penduduk Rokan Hulu. Diposisi kedua adalah Kecamatan Tambusai yaitu sebesar 60,08 ribu jiwa atau setara 10,62% dari total penduduk Rokan Hulu. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 12 ribu jiwa atau setara 2,14% dari total penduduk dan Kecamatan Pendalian IV Koto sebesar 12,48 ribu jiwa atau setara 2,18% dari total penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Berikut disajikan data jumlah penduduk menurut Kecamatan pada tahun 2023, yaitu:



Sumber: BPS Rokan Hulu, 2024

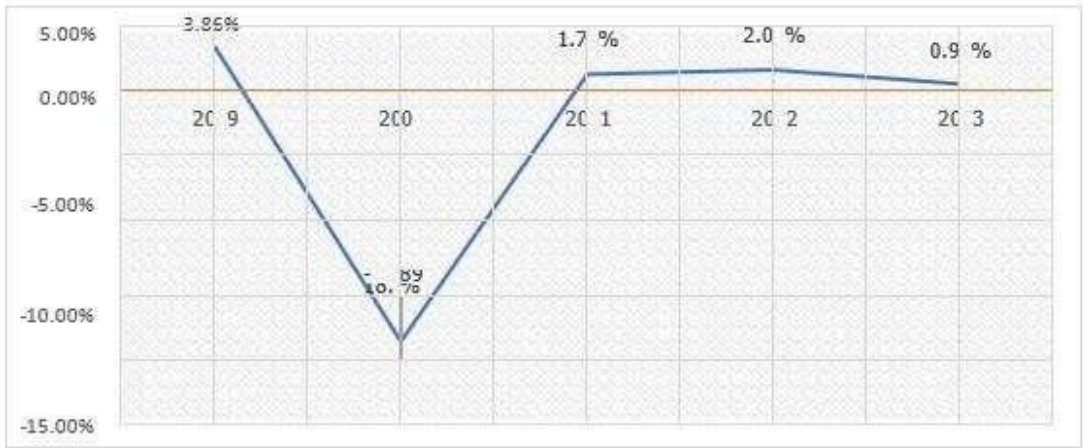
Gambar 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Tahun 2023

2.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk

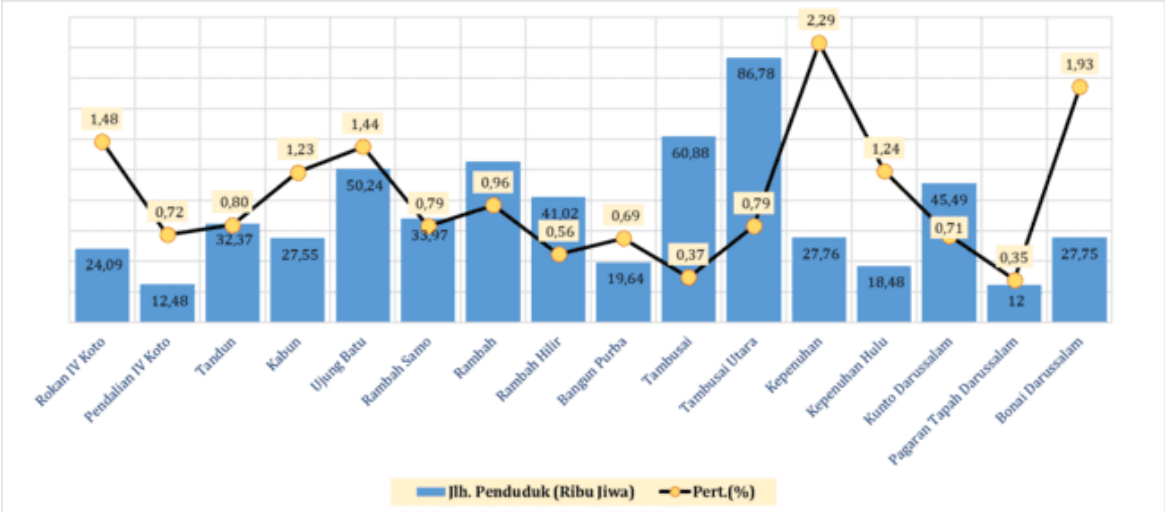
Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari 3,86% pada tahun 2019, turun signifikan menjadi -18,89% pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak covid 19, selanjutnya meningkat hingga tahun 2022 menjadi 2.05% dan sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 0,97%.

Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu, 2024

Gambar 2.8 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023



Sebagai daerah perkebunan, pertumbuhan penduduk Rokan Hulu disebabkan oleh tingkat kelahiran dan juga migrasi masuk baik antar kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun antar provinsi di Indonesia. Keterbukaan wilayah dan aktivitas ekonomi perkebunan dan industri menjadikan mobilitas orang ke Rokan Hulu menjadi sangat mudah.



Pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil.

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

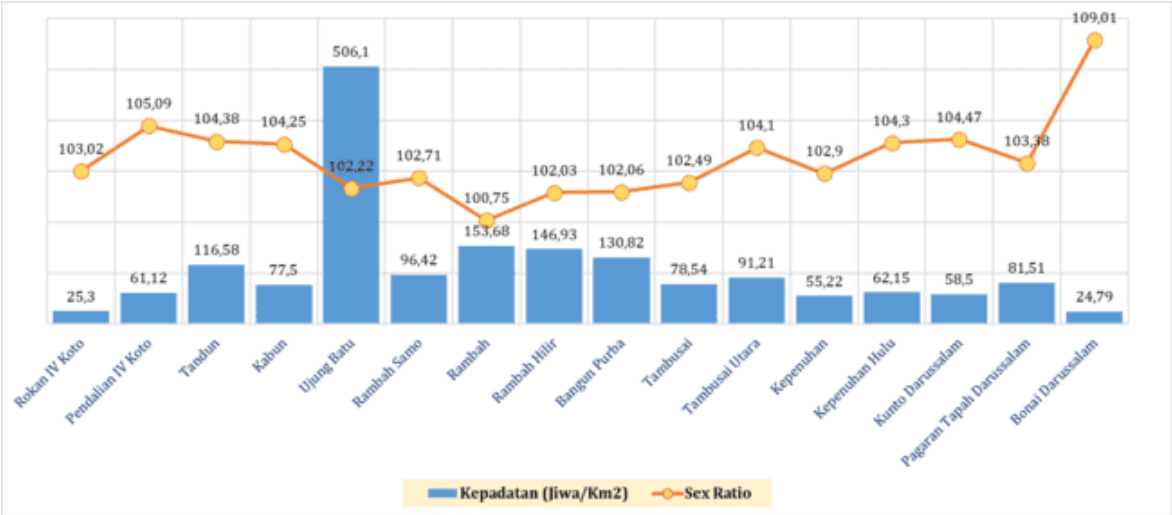
Gambar 2.9 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Kepenuhan pada tahun 2023 sebesar 2,29%, Kecamatan Bonai Darussalam sebesar 1,93% dan Kecamatan Rokan IV Koto tumbuh sebesar 1,48%. Sedangkan Kecamatan Tambusai Utara dengan penduduk terbanyak hanya tumbuh sebesar 0,79% dan Kecamatan Tambusai hanya tumbuh sebesar 0,37%.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.1.2.3 Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio

Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 573.520 jiwa dengan kepadatan 75,58 jiwa per Km2 pada tahun 2023. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah dengan penduduk peringkat keenam di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu termasuk kategori penduduk jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembang kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut disajikan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:



Sumber: BPS Rokan Hulu, 2024

Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Ujung Batu yaitu sebanyak 506,1 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

Penduduk berdasarkan sex ratio di Kabupaten Rokan Hulu terlihat masih didominasi oleh penduduk perempuan, dengan perbandingan 103,34 perempuan dari 100 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan pada semua kecamatan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Banai Darussalam sebesar 109,01.

2.1.2.4 Komposisi Penduduk

Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 67,62 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 32,38%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (dependency ratio) sebesar 46,55%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

Menurut Kelompok Umur

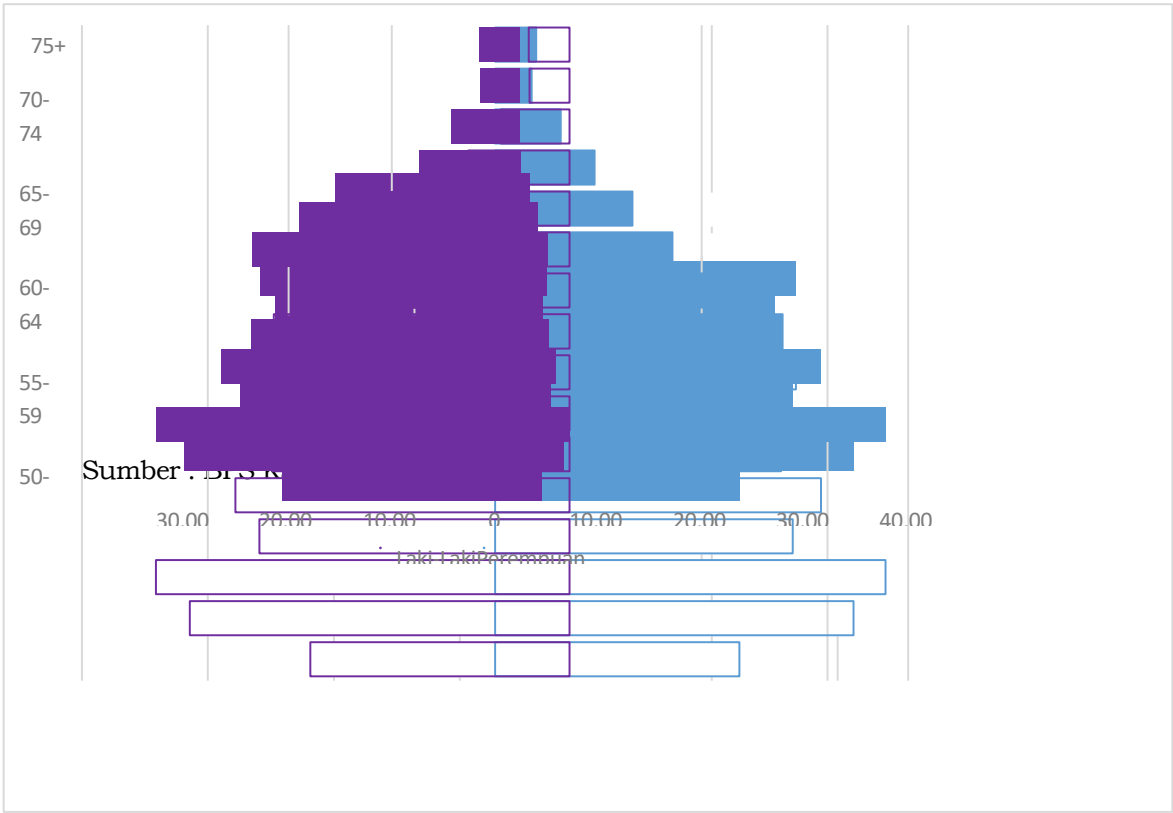
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)			
	2022		2023	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
0-4	44.889	7,70	39.968	6,97
5-9	57.318	9,84	58.604	10,22
10-14	57.974	9,95	63.820	11,13
15-19	57.393	9,85	48.254	8,41
20-24	52.767	9,06	52.402	9,14
25-29	49.228	8,45	46.298	8,07
30-34	49.585	8,51	43.466	7,58
35-39	46.479	7,98	46.614	8,13
40-44	41.817	7,18	46.309	8,07
45-49	35.054	6,02	36.944	6,44
50-54	28.006	4,81	29.563	5,15
55-59	22.771	3,91	22.094	3,85
60-64	16.552	2,84	15.957	2,78
65-69	11.13	1,91	10.667	1,86
70-74	6.195	1,06	6.072	1,06
75+	5.521	0,95	6.488	1,13
Rokan Hulu	582.679	100	573.520	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Komposisi penduduk dari aspek rasio jenis kelamin (sex ratio), secara umum masih didominasi jumlah penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya pada setiap 103 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 orang jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,82 persen dan perempuan sebesar 49,18 persen.

Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk muda (expansive). Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15- 64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN,2014), sementara itu Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 60% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Rokan Hulu yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.



Gambar 2.11 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2024

2.2. PROFIL SANITASI SAAT INI

2.2.1. Air Limbah Domestik

2.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur

Berdasarkan hasil pemetaan pada Instrumen SSK Tahun 2024 ini,

maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.7 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,42%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	28,24%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	27,25%
	Akses Layak Bersama	0,56%
C	Akses Belum Layak*	2,76%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	1,26%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,97%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	62,81%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	53,75%
	Akses Layak Bersama	1,20%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	6,89%
C	Belum Layak	0,74%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	4,19%
Total		100%

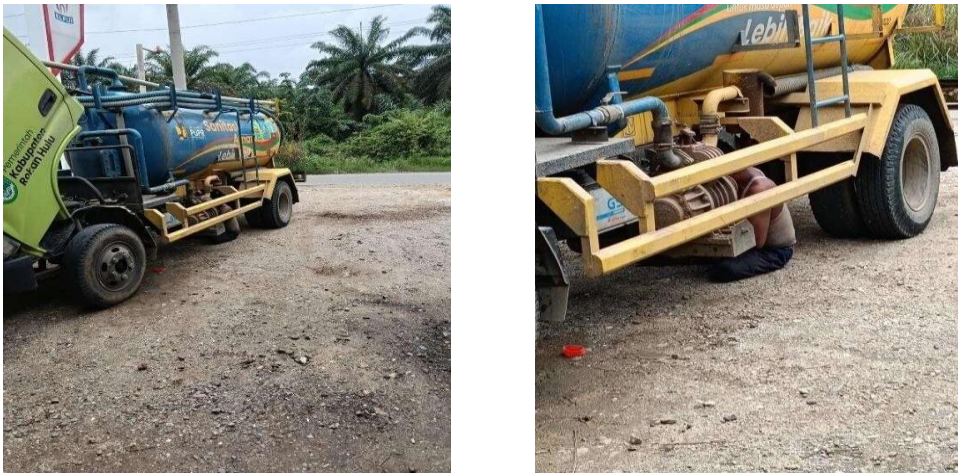
Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.8 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	1
2	Status aset	Sudah serah terima aset	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	5
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	Unit	0
2	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
3	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0

4	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
5	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber : Instrumen SSK 2024



Gambar 2.12 Truk Tinja Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 2.9 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT Kabupate n Rokan Hulu	1
2	Status aset	Sudah	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	10
4	Tahun Pembangunan	2020	
5	Tahun Rehabilitasi	2020	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	Kec. Rambah samo, Kec. Kec. Rambah, Kec. Bangun Purba	
7	Wilayah layanan terdekat	km	0,5
8	Wilayah layanan terjauh	km	10
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+bak ekualisasi - Bak Sedimentasi - Kolam anaerob- kolam fakultatif- kolam maturasi - sludge drying bed-pengomposan- pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	2	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Perkerasan	

Sumber : Instrumen SSK 2024



Tabel 2.10 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat



Tabel 2.10 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/ Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
1	IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal	Kota Raya	50	30	Kurang Optimal	2022	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
2	IPAL skala permukiman kombinasi MCK	Kepenuhan Jaya	50	35	Optimal	2022	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
3	IPAL Skala Permukiman	Ujung Batu	50	25	Kurang Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
4	IPAL Skala Permukiman	Kepenuhan Tengah	50	28	Kurang Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
5	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Tandun	50	15	Tidak Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
6	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Rambah Utama	50	0	Tidak Beroperasi	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM

7	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Bangun Purba	50	16	Kurang Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
---	-------------------------------------	--------------	----	----	----------------	------	--------------------------------------	-----

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
8	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	50	19	Kurang Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
9	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Pasir Baru	50	14	Tidak Optimal	2019	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
10	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Lubuk Bendahara Timur	50	9	Tidak Optimal	2019	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
11	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Pendalian	50	12	Tidak Optimal	2019	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
12	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Rambah Muda	50	17	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM

13	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Serombou Indah	50	22	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
14	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Lubuk Bilang	50	27	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Suka maju	50	33	Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Koto Tinggi	50	22	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Lubuk Bendahara	50	35	Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Pasir Utama	50	29	Kurang Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis	KSM

							Masyarakat	
19	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Desa Pasir Baru	50	18	Kurang Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
20	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Desa Pasir Maju	50	4	Tidak Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
21	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Desa Pematang Tebih	50	16	Kurang Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
22	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelurahan Tambusai Tengah	50	8	Tidak Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
23	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Marga Mulya	50	14	Tidak Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
24	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kepunuhan Hulu	50	0	Tidak Beroperasi	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
25	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Giti	50	15	Tidak Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
26	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Suka Damai	50	13	Tidak Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
27	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Alahan	50	16	Kurang Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
28	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Dayo	50	26	Kurang Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM

Sumber : Instrumen SSK 2024

Gambar 2.14 Dokumentasi IPALD di Kab. Rokan Hulu





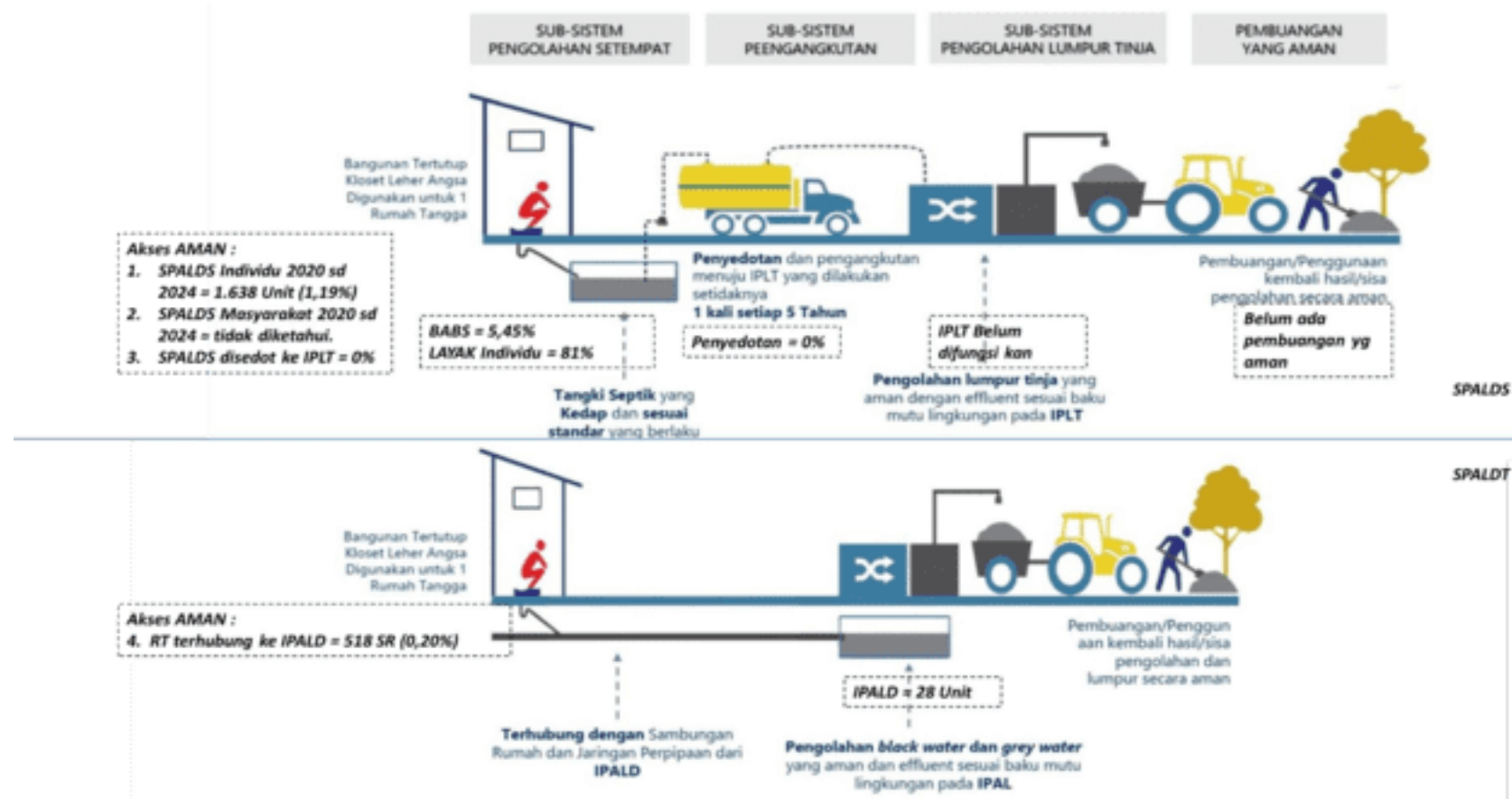
Tabel 2.11 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2025-2029

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029 (%)	Target - 2029 (%) berdasarkan RSP		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Riau	Kab. Rohu1	Kab. Rohu1			
1	Akses Aman	15%	11,0%	10,0%	5,0%	1,39%	8,6%	3,6%
2	Akses Layak	90%	90,0%	95,0%	93,0%	91,05%	4,0%	2,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	90,0%	85,0%	81,00%	9,0%	4,0%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	5%	3,0%	1,76%	3,2%	1,2%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	3,0%	6,89%	-6,89%	-3,89%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	1,5%	3,50%	-3,50%	-2,0%
4	BABS	0%	0,0%	0,0%	3,0%	5,45%	-5,45%	-2,45%

Sumber: Instrumen SSK 2024

Tabel 2.12 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

No	Infrastruktur	Persentase
	SPALD-S	
1	Kapasitas Penggunaan IPLT	0,00%
2	Kapasitas penggunaan truk	0,00%
3	Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0,00%
4	Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0,00%
5	Kapasitas IPLT terhadap total RT	0,00%
	SPALDT	
6	Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	37%
7	Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
8	Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-



Berdasarkan gambar 2.13. diatas bahwa pada SPALD Terpusat ada SR tersambung sebesar 0,20%, persentase ini didapatkan dari IPALD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pada SPALD Setempat BABS masih tinggi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,45%, Layak Individu sebesar 81%, serta terlihat bahwa Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki IPLT namun operasionalnya belum optimal, sehingga tidak ada penyedotan yang dibuang ke IPLT tersebut. Penyedotan pernah dilakukan untuk ujicoba.

2.2.1.2. **Kelembagaan dan Kebijakan /Peraturan**

2.2.1.2.1 **Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air Limbah domestik dikabupaten Rokan Hulu, Tugas Utama dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyediakan sarana dan prasarana sektor air limbah untuk masyarakat umum seperti menyediakan MCK, tangki septik individual dan komunal, dan sebagainya yang terkait sanitasi. Sedangkan Dinas kesehatan mempunyai tugas dalam pendidikan masyarakat tentang PHBS khususnya pesan tentang tidak BABS dan pemicuan. Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Tabel 2.13 Daftar (pemetaan)
Dinas/Badan/Lembaga Daerah pengelolaan air limbah

Perangkat Daerah	Tugas Dan Fungsi
BAPPEDA, PERKIM, DINKES	Perencanaan
PERKIM	Pengadaan Sarana
PERKIM	Pengelolaan
PERKIM, DINKES, DINAS PMD, DINAS INFOKOM	Pengaturan dan Pembinaan
BAPPEDA, PERKIM, DINKES	Monitoring dan Evaluasi

Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu, 2024

Tabel 2.14 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD & sebagainya
PERENCANAAN			
▪ Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	BAPPEDA, PERKIM	–	–
▪ Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaianTarget	BAPPEDA , PERKIM	–	–

▪ Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA , PERKIM	–	–
PENGADAAN SARANA			
▪ Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	PERKIM	–	–
▪ Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	PERKIM	–	–
▪ Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	PERKIM	–	–
▪ Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	PERKIM	–	–
▪ Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	PERKIM	–	–
PENGELOLAAN			
▪ Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	PERKIM	–	–
▪ Mengelola IPLT dan atau IPAL	PERKIM	–	–
▪ Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	PERKIM	–	–
▪ Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestic	PERKIM	–	–
▪ Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	PERKIM	–	–
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
▪ Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	PERKIM	–	–
▪ Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air	BAPPEDA , PERKIM DINKES, INFOKOM	–	–
limbah domestic			
▪ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestic	SATPOL PP	–	–
MONITORING DAN EVALUASI			

▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	BAPPEDA, DINKES, PERKIM	–	–
▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	BAPPED, PERKIM	–	–
▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	BAPPEDA, PERKIM	–	–
▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	BAPPEDA, PERKIM	–	–

Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu, 2024

2.2.1.2.2. Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.15 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan air limbah

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kota Raya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
2	IPAL skala permukiman kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepenuhan Jaya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Optimal
3	IPAL Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Ujung Batu	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
4	IPAL Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepenuhan Tengah	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
5	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Tandun	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
6	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rambah Utama	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Beroperasi

								i
7	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bangun Purba	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipa	Kurang Optimal
8	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipa	Kurang Optimal
9	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan	Pasir Baru	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipa	Tidak Optimal

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
				IPAL				
10	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Lubuk Bendahara Timur	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipa	Tidak Optimal
11	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Pendalian	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipa	Tidak Optimal
12	IPAL Komunal Kombinasi	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rambah Muda	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipa	Kurang Optimal

	MCK							al
13	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Serombou Indah	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
14	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Lubuk Bilang	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Suka maju	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Optimal
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Koto Tinggi	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Lubuk Bendahara	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Optimal
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Pasir Utama	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
19	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Pasir Baru	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
20	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Pasir Maju	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
21	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Pematang Tebih	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
22	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kelurahan Tambusai Tengah	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
23	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Marga Mulya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
24	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepunuhan Hulu	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Beroperasi
25	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Giti	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
26	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Suka Damai	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
27	SPALD Terpusat Skala				Alahan	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan	Kurang

	Permukiman						Perpipaan	Optimal
28	SPALD Terpusat Skala Permukiman				Dayo	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal

Sumber : Survey lapangan, Dinas Perkim 2024

Berdasarkan tabel daftar program dan kegiatan pengelolaan sanitasi oleh masyarakat dapat disampaikan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu sudah ada kerjasama/peran serta masyarakat dengan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, namun belum optimal.

2.2.1.2.3. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Tabel 2.16 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah

Pemangku kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah.
Pengusaha / Swasta: - PT. PN V	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes : - 145 Desa/Kel.	- Melaksanakan UU Desa.	- Adanya dana 15% dari APBD Desa untuk Sanitasi.
Organisasi Massa (Ormas): - Baznas - Laskar Melayu Bersatu	- Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI. - Meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan Melayu	- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi. - Adanya dana organisasi bidang kesejahteraan anak kemenakan Melayu.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): -	-	-
Tokoh Masyarakat	-	-

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.17 Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Sedang	Sedang	Tidak
Organisasi Massa (Ormas): - Baznas	- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat.	Tinggi	Sedang	Tidak
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - Forum Dai Sanitasi	- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat.	Tinggi	Sedang	Tidak

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.1.3. Regulasi

Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

Tabel 2.18 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik

No	Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik		
		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
		-	☐
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	☐
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD: SPALD-S dan SPALD-T	-	☐
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	☐
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	☐
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	-	☐
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	☐
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	-	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	-	Belum Ada
		-	☐

Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024

2.2.1.4. Komunikasi dan Media

Tabel 2.19 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (air limbah)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sehat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	2015 s.d 2024	Dinas Kesehatan	Agar masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	• Perangkat desa • TPKK Kecamatan dan Desa • Tokoh masyarakat desa • Kader Kesehatan di Kampung/ Kelurahan	Pelaksanaan 10 indikator Rumah Tangga ber-PHBS	Metode Pembelajaran Ceramah Tanya Jawab dengan topik 10 Indikator rumah tangga ber-PHBS yang meliputi : 1. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. 2. Pemberian ASI Eksklusif 3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan 4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih 5. Menggunakan air bersih 6. Menggunakan jamban sehat 7. Memberantas jentik nyamuk 8. Konsumsi buah dan sayur 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari 10. Tidak merokok di dalam rumah

2.	Pengadaan Media Promosi Kesehatan berupa Poster, Leaflet, spanduk dan baliho	2015 s.d 2024	Dinas Kesehatan	Agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang hygiene dan perilaku hidup bersih	Masyarakat wilayah kerja puskesmas	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi cara mencuci tangan, PHBS di Rumah Tangga, PHBS di Sekolah, Pencegahan Penyakit, dll	Penggunaan Media Cetak untuk sosialisasi terhadap masyarakat
3.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2015-2024	Dinas Kesehatan	Untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 komponen, 1. penciptaan lingkungan yang mendukung 2. Peningkatan Kebutuhan sanitasi 3. Peningkatan Penyediaan sanitasi dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah.	Masyarakat wlayah kerja puskesmas se- • Rumah Tangga • Sekolah • Perangkat desa • TPKK Kecamatan dan Desa • Tokoh masyarakat desa • Natural Leader	Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis masyarakat(STBM) dengan 5 Pilar: • Stop Buang Air Besar Sembarangan • Cuci Tangan Pakai Sabun • Pengelolaan Air Minum dan Makanan • Pengelolaan sampah rumah tangga • Pengelolaan Limbah Cair Rumah tangga	Metode Pembelajaran dengan melaksanakan: • Pemicuan • Identifikasi Masalah • Pasca Pemicuan • Kampanye Ctps Masyarakat • Kampanye Ctps Sekolah • Pembuatan Peta Sanitasi • Penggunaan Media cetak dan Elektronik untuk sosialisasi kepada masyarakat

Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024

Tabel 2.20 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah

No.	Komponen	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
		Media Online	Umum	APBD	Menjaga Kesehatan mulai dari Keluarga dan Lingkungan	BAB tidak di sungai	Efektif

1.	Air Limbah Domestik	Leaflet	Masyarakat umum	APBD	Perilaku ramah lingkungan termasuk pengelolaan air limbah rumah tangga	Peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan	Efektif
		Spanduk	Masyarakat umum	APBD	BAB di tempat yang aman	Awas KLB Diare	Efektif

Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024

2.2.2. Persampahan

2.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.21 Capaian akses layanan sampah daerah perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	2,2%
2	Penanganan Sampah	20,3%
3	Sampah Tidak Terkelola	9,2%
Wilayah Perdesaan		
1	Pengurangan Sampah	4,5%
2	Penanganan Sampah	1,6%
3	Sampah Tidak Terkelola	62,1%
T O T A L		100,0%

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.22 Timbulan sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	285,78
	Perkotaan	ton/hari	95,14
	Perdesaan	ton/hari	190,64
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	49
		% anorganik	51

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.23 Sub Sistem Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	0
	Pick Up	unit	1
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	0
	Pick Up	m3	2
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.24 Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	25
	Kontainer	unit	3
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	50
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	2
	Kontainer	m3	4
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,08
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	2
	Dump Truk	unit	9
	Pick Up	unit	2
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	10
	Dump Truk	m3	5
	Pick Up	m3	2
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	2

Sumber : Instrumen SSK 2024



Gambar 2.16 Dokumentasi Penampungan Sementara



Gambar 2.17 Dokumentasi Sarana Pengangkutan

Tabel 2.25 Sub Sistem Pengolahan Persampahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan / dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas / UPTD)	Status Aset
1	TPST	0	0	Tidak ada	0	0	Tidak ada	0	0	0	Seksi	Belum
2	TPST	0	0	Tidak ada	0	0	Tidak ada	0	0	0	Seksi	Belum

Sumber : Instrumen SSK 2024

Pemrosesan Akhir:
Tabel 2.26 Sub Sistem Pemrosesan Akhir Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	TPA 1	TPA 2
1	Nama dan Lokasi TPA		TPA Tanjung Belit	TPA Ujung Batu
	Wilayah Pelayanan		Kecamatan Rambah	Kec. Ujung Batu, Kec. Tandun (pasar), Kec. Kabun (pasar)
2	Tahun pembangunan		2005	2007
	Tahun Optimalisasi		-	-
	Usia Pakai TPA (tahun)		3	2
3	Status aset (pilih salah satu)		Sudah Aset Pemda	Sudah Aset Pemda
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	5,5	2
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	2	2
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Open Dumping	Open Dumping
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Buldozer 1 unit, Excavator 1 unit (rusak), Backhoe 1 unit (rusak)	Excavator 1 unit
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	-	-
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Jalan Tanah	jalan Tanah
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	30,36	32,22
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	0,07	0
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	tidak ada	tidak ada
14	Listrik	Gwh/hari	0	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan		Dilakukan	Tidak

	hasilnya secaraa rutin (3-6 bulan sekali)			Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	5	5

Sumber : Instrumen SSK 2024



Gambar 2.18 Dokumentasi TPA Tanjung Belit Kab. Rokan Hulu

Gambar 2.19 Dokumentasi TPA Ujung Batu Kab. Rokan Hulu



Pengurangan Sampah:

Tabel 2.27 Pengurangan Sampah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
1	TPS 3R	Batang Baih Desa Rambah Tengah Hilir, Kh. Dewantara RT 04 RW 1 (Dusun Simpang Tiga) Kec. Rambah (N. 00°54'10,3", E. 100°18'47,8")	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2016	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah
2	TPS 3R	TPS3R Mekar Saroha, Jl. Air Panas RT 06 RW 03 Dusun Pawan Hilir Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah (N. 00°51'01", E. 100°16'10,6")	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2016	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah

3	TPS 3R	TPS3R Samo Bersih, Jl. Sutan Tua RT 02 RW 6 Dusun Batang Samo Hulu Desa Suka Maju Kec. Rambah (N. 00°50'35,4", E. 100°19'49,4")	Optimal	2016	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah
No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembinaan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
4	TPS 3R	TPS3R Pengiraian, RT 22 RW 10 Dusun Sebaya Desa Babussalam Kec. Rambah	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2015	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah
5	TPS3R	TPS3R Karya Utama Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2015	tdk ada	tdk ada	0,26	0,26	0	KSM	Sudah
6	Bank Sampah	Bank Sampah INDUK "Nad's Plastik", Jl. Lingkar Desa Koto	Optimal	2017	tdk ada	daur ulang	1	1	0	Masyarakat	Sudah

		Tinggi Kec. Rambah									
7	Bank Sampah	Bank Sampah Unit "Bunut Mandiri", Jl. Raya Tangun RT 01 RW 01 Desa Tanjung Belit Dusun Sei Bunut Kec. Rambah (N. 00°52'33,33", E. 100°16'34,9")	Optimal	2018	tdk ada	daur ulang	0,204	0,204	0	Masyar a kat	Sudah
8	Sektor Inform al	Endang Kuswoyo, Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara (N 1°15'4", E 100°22") Hp 082386313754	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,564	0,5375	0,0265	PD	Sudah
No	Jenis Infrastrukturu (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaa n (Beroperas i/ Tidak)	Tahun Pemba n gunan	Tahun Optimalisa si (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompo s (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelol a (KSM/ Dinas/ UPTD)	Statu s Aset

9	Sektor Informal	Suryanto, Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara 082389158434	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,3	0,3	0	PD	Sudah
10	Sektor Informal	Abdul Sani, Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara 82116094444	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	1,7	1,7	0	Masyarakat	Sudah
11	Sektor Informal	Hasibuan, Desa Bangun Jaya	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,7	0,7	0	Masyarakat	Sudah
12	Sektor Informal	Ucok, Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah
13	Sektor Informal	ud. Kali jaga, Desa Kumu Deli (PURWOTO 85365097307)	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,63	0,63	0	Masyarakat	Sudah
14	Sektor Informal	MAMA PATEL Desa BATAS (082286369663)	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,67	0,67	0	Masyarakat	Sudah

15	Sektor Informal	ASPAN LUBIS, Desa KUMU SEJATI (085271020380)	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,786	0,786	0	Masyarakat	Sudah
16	Sektor Informal	Tamba Desa Bangun Jaya	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,566	0,566	0	Masyarakat	Sudah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
17	Sektor Informal	ASRIZAL, Desa Batang Samo Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,266	0,266	0	Masyarakat	Sudah
18	Sektor Informal	Asrizal Heri, Desa Babasussalam Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,8	0,8	0	Masyarakat	Sudah
19	Sektor Informal	Mario, Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,8	0,8	0	Masyarakat	Sudah
20	Sektor Informal	Hotman saragih, Desa Pematang berangan Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,4	0,4	0	Masyarakat	Sudah

21	Sektor Informal	Kamdun, Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,38	0,38	0	Masyarakat	Sudah
22	Sektor Informal	wesley sitompul, Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah
23	Sektor Informal	Bu sari, Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah
24	Sektor Informal	Budi, Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,2	0,2	0	Masyarakat	Sudah
25	Sektor Informal	Yulianis, Desa Tanah datar Kec. Ujung batu (0°42'9", 100°31'21")	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah
No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
26	Sektor Informal	Ujang, Desa ngaso	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,8	0,8	0	Masyarakat	Sudah

		Kec. Ujung batu									
27	Sektor Informal	Beni Widodo, Desa Tranpol Kec. Ujung Batu (0°43'45", 100°31'3")	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,4	0,4	0	Masyarakat	Sudah
28	Sektor Informal	Asril, Kelurahan ujung Batu	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	3,95	3,95	0	Masyarakat	Sudah
29	Sektor Informal	SARIPUDDIN, Desa KUNTO Darussalam (0°50'8,6", 100°41'27,9")	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,35	0,35	0	Masyarakat	Sudah
30	Sektor Informal	ANDI, JL. GARUDA Desa Kunto Darussalam (049'54", 100°41'25") Hp 082172231222	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,11	0,11	0	Masyarakat	Sudah
31	Sektor Informal	SAPRIJAL, Desa SIMPANG BERINGIN Kec. RAMBAH HILIR (081378690590)	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,2	0,2	0	Masyarakat	Sudah

32	Sektor Informal	YASOPATI JALUKU, Desa SIPANG D. Kec.	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,52	0,52	0	Masyarakat	Sudah
		RAMBAH HILIR (082172587869)									
33	Bank Sampah	IYUN, Desa SUNGAI KUNING Kec. RAMBAH SAMO	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,46	0,46	0	Masyarakat	Sudah

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.28 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2025-2029

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun : 2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	82,0%	80,0%	73,0%	66,9%	13,1%	6,1%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	18,0%	15,0%	10,0%	6,8%	8,2%	3,2%

Sumber : Instrumen SSK 2024

2.2.2.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

2.2.2.2.1. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel 2.29 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah pengelolaan persampahan

PERANGKAT DAERAH	TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEDA, DLH	Perencanaan
DLH	Pengadaan Sarana
DLH	Pengelolaan
DLH	Pengaturan Dan Pembinaan
BAPPEDA, DLH	Monitoring Dan Evaluasi

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.30 Pemetaan tugas dan fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota,	BAPPEDA, DLH	–	–
• Menyusun rencana program persampahaan dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA, DLH	–	–
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA, DLH	–	–
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	DLH	–	–
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	DLH	–	–
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	DLH	–	–
• Menyediakan sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat embuangan Akhir (TPA)	DLH	–	–
• Membangun sarana TPA	DLH	–	–
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan	DLH		

listrik dll)			
PENGELOLAAN			

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	DLH	-	-
• Mengelola sampah di TPS	DLH	-	-
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	DLH	-	-
• Mengelola TPA	DLH	-	-
• Melakukan pemilahan sampah	DLH	-	-
• Melakukan penarikan retribusi sampah	DLH	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	DPMPTSP, DLH	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	DLH	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	DLH	-	-
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	DLH	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	DLH	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	BAPPEDA, DLH	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	BAPPEDA, DLH	-	-

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	BAPPEDA, DLH	-	-
--	--------------	---	---

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.2.1.1. Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.31 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional
1	TPS 3R	Batang Baih	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	-	Desa Rambah Tengah Hilir	-
2	TPS 3R	TPS3R Mekar	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	-	Desa Rambah	-
3	TPS 3R	TPS3R Samo Bersih	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	-	Desa Suka Maju Kec. Rambah	-
4	TPS 3R	TPS3R Pengiraian	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	-	Desa Babussalam	-
5	TPS 3R	TPS3R Karya Utama	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	daur ulang	Desa Pasir Utama	Iuran Warga
6	Bank Sampah	Bank Sampah INDUK "Nad's Plastik"	Kelompok Swadaya Masyarakat.		daur ulang	Desa Koto Tinggi	Iuran Warga
7	Bank Sampah	Bank Sampah Unit	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	daur ulang	Desa Tanjung Belit	Iuran Warga

8	Sektor Informal	Endang Kuswoyo	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara	pribadi
9	Sektor Informal	Suryanto	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara	pribadi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional
10	Sektor Informal	Abdul Sani	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara	pribadi
11	Sektor Informal	Hasibuan	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Bangun Jaya	pribadi
12	Sektor Informal	Ucok	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara	pribadi
13	Sektor Informal	ud. Kali jaga	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Kumu Deli	pribadi
14	Sektor Informal	MAMA PATEL	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa BATAS	pribadi
15	Sektor Informal	ASPAN LUBIS	Kelompok Swadaya	5	Pengomposan, daur ulang	Desa KUMU SEJATI	pribadi

			Masyarakat.				
16	Sektor Informal	Tamba	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Bangun Jaya	pribadi
17	Sektor Informal	ASRIZAL	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Batang Samo Kec. Rambah	pribadi
18	Sektor Informal	Asrizal Heri	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Babasussalam Kec. Rambah	pribadi
19	Sektor Informal	Mario	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	pribadi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional
20	Sektor Informal	Hotman saragih	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Pematang berangan Kec. Rambah	pribadi
21	Sektor Informal	Kamdun	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	pribadi

22	Sektor Informal	wesley sitompul	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	pribadi
23	Sektor Informal	Bu sari	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	pribadi
24	Sektor Informal	Budi	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu	pribadi
25	Sektor Informal	Yulianis	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Tanah datar Kec. Ujung batu	pribadi
26	Sektor Informal	Ujang	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa ngaso Kec. Ujung batu	pribadi
27	Sektor Informal	Beni Widodo	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Tranpol Kec. Ujung Batu	pribadi
28	Sektor Informal	Asril	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Kelurahan ujung Batu	pribadi
29	Sektor Informal	SARIPUDDIN	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa KUNTO Darussalam	pribadi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional
30	Sektor Informal	ANDI	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa Kunto Darussalam	pribadi
31	Sektor Informal	SAPRIJAL	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa SIMPANG BERINGIN Kec. RAMBAH HILIR	pribadi
32	Sektor Informal	YASOPATI JALUKU	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa SIPANG D. Kec. RAMBAH HILIR	pribadi
33	Sektor Informal	IYUN	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengomposan, daur ulang	Desa SUNGAI KUNING Kec. RAMBAH SAMO	pribadi

Sumber : Data Sekunder, 2024

2.2.2.2.2. Pemetaan pemangku kepentingan diluar Pemda

Tabel 2.32 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan

Pemangku kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan.
Pengusaha / Swasta: - PT. PN V	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER	- Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan dalam rangka penuntasan persampahan.
Organisasi Massa (Ormas): - Laskar Melayu Bersatu	- Meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan Melayu	- Adanya dana organisasi bidang kesejahteraan anak kemenakan Melayu.

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.33 kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan persampahan dalam APBD. - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan.	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta	- Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan dalam rangka penuntasan akses persampahan.	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Sedang	Sedang	Tidak

Organisa si Massa (Ormas):	- Pemanfaatan dana kesejahteraan masyarakat.	-	Tinggi	Sedang	Tidak
- Laskar Melayu Bersatu					

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.2.1 Regulasi

Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

Tabel 2.34 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan

Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
No			
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	Tidak Ada
		☐	-
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten Rokan Hulu	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam Mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Bab IV (Pasal 9 – Pasal 18) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang, Masyarakat dan Pelaku Usaha	-
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Bab VI Pasal 31 Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah	-

Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan	
No	

c	Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah)	BAB V Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 19, Paragraf 1 Pasal 20,	-
d	Substansi pengaturan: Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	BAB V Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 19, Paragraf 2 Pasal 21-Pasal 28	-
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	BAB VII Bagian Kesatu Pasal 32 Pembiayaan	-
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	BAB VII Bagian Kedua Pasal 33 Kompensasi	-
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	BAB XI Peran Masyarakat Pasal 39-Pasal 41	-
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	BAB XII Larangan Pasal 42 BAB XVII Ketentuan Pidana	-
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	BAB X I II Pembinaan dan Pengawasan Pasal 43-Pasal 44	-
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	BAB XVI Sanksi Administratif	-
k	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	☐
l	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1.Perbup pengelolaan 2.Perbup Retribusi	-

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.2.3 Komunikasi dan Media (Persampahan)

Tabel 2.35 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (persampahan)

No.	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sehat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sektor Persampahan	2015 s.d 2024	Dinas Lingkungan Hidup	Agar Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat terkait persampahan	- Perangkat Desa - TPKK Kecamatan dan Desa - Tokoh masyarakat desa - Kader Kesehatan	Pengelolaan sampah yang tepat di setiap desa dan kelurahan	Metode Pembelajaran Ceramah Tanya Jawab dengan topik seperti: 1. Pengelolaan sampah organik pedesaan dengan komposting 2. Pengelolaan sampah anorganik di perdesaan dengan membuat lubang di belakang rumah bukan dengan cara membakar sampah 3. Sosialisasi pengurangan sampah dengan 3R

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.36 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait pengelolaan Persampahan

No.	Komponen	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1.	Persampahan	Leaflet / Spanduk	Umum	APBD	Global Warming	Go Green	Efektif

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.3. Drainase Lingkungan

Jaringan drainase di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Secara umum, kondisi drainase di Kabupaten masih belum memadai karena berbagai hal misalnya sistem jaringan yang ada belum terpadu dan terpola dengan baik, sebagian besar kondisi salurannya terputus, fisik saluran masih berupa tanah.

Sistem pengaliran umumnya masih mengandalkan sistem gravitasi. Selain itu, kondisi drainase yang ada di Kabupaten Rokan Hulu masih berupa tanah. Keadaan ini menyebabkan besarnya potensi gerusan atau erosi terutama di daerah yang mempunyai tingkat kemiringan lereng sedang sampai dengan tinggi. Banyaknya daerah cekungan dengan tidak dilengkapi saluran drainase yang memadai terhadap timbulnya genangan-genangan akibat arus pembuangan air hujan yang kurang lancar. Dan lagi, curah hujan yang besar sementara saluran drainase yang tersedia relatif kecil rawan terkadi luapan akibat debit air hujan yang melebihi daya tampung saluran drainasenya.

Tabel 2.37 Lokasi dan perkiraan Luas Genangan

No	Nama Kecamatan/ Kelurahan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket.
		(Ha)	(M)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	ROKAN IV KOTO	1.224	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
2	PENDALIAN IV KOTO	84	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
3	TANDUN	675	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
4	KABUN	70	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
5	UJUNG BATU	49	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
6	RAMBAH SAMO	158	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
7	RAMBAH	1.330	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
8	RAMBAH HILIR	288	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
9	BANGUN PURBA	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
10	TAMBUSAI	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
11	TAMBUSAI UTARA	-	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
12	KEPENUHAN	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
13	KEPENUHAN HULU	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
14	KUNTO DARUSSALAM	-	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
15	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
16	BONAI DARUSSALAM	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.38 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah / Kapasitas	Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Berfungsi	Tdk berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1	Saluran Drainase	m	85.000	65.500	19.500	-
	S. Primer A	m	-	-	-	-
	S. Primer B	m	-	-	-	-
2	Saluran Sekunder		56.000	50.500	5.500	
	Saluran Sekunder A1	m	-	-	-	-
	Saluran Sekunder A2	m	-	-	-	-

	Saluran Sekunder B1	m	-	-	-	-
3.	Bangunan Pelengkap					
	Rumah Pompa	unit	17	10	7	-
	Pintu Air	unit	47	40	7	-

Sumber : Data Sekunder 2024

2.3. AREA BERESIKO

2.3.1. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Tabel

Tabel 2.39 Area Beresiko Air Limbah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
1	UJUNG BATU	Ujung Batu	4
2	RAMBAH	Pasir Pengaraian	4
3	BONAI DARUSSALAM	Bonai	4
4	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	3
5	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	3
6	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	3
7	TANDUN	Tandun	3
8	TANDUN	Koto Tandun	3
9	TANDUN	Tandun Barat	3
10	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	3
11	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	3
12	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	3
13	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	3
14	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	3
15	RAMBAH	Suka Maju	3
16	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	3
17	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	3
18	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	3
19	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	3
20	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	3
21	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	3
22	BANGUN PURBA	Bangun Purba	3
23	BANGUN PURBA	Pasir Agung	3
31	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	3
32	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	3
33	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	3

34	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	3
35	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	3
36	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	3
37	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	3
71	RAMBAH	Tanjung Belit	2
72	RAMBAH	Sialang Jaya	2
73	RAMBAH	Koto Tinggi	2
74	RAMBAH	Pematang Berangan	2
75	RAMBAH	Babussalam	2
76	RAMBAH	Pasir Maju	2
77	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	2
78	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	2
79	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	2
80	BANGUN PURBA	Pasir Intan	2
81	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	2
82	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	2
83	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	2
84	BANGUN PURBA	Tangun	2
85	TAMBUSAI	Sungai Kumango	2
86	TAMBUSAI	Tali Kumain	2
87	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	2
88	TAMBUSAI	Sialang Rindang	2
89	TAMBUSAI	Tambusai Timur	2
90	TAMBUSAI	Batang Kumu	2
91	TAMBUSAI	Lubuk Soting	2
92	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	2
93	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	2
94	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	2
95	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	2
96	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	2
97	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	2
98	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	2
99	TAMBUSAI UTARA	Mahato	2
100	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	2
101	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	2
102	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	2
103	KEPENUHAN	Ulak Patian	2
104	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	2
105	KEPENUHAN HULU	Kepayang	2
106	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	2

107	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	2
108	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	2
109	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	2

110	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kuti	2
111	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	2
112	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	2
113	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	2
114	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	2
115	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	2
116	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	2
117	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	2
118	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	2
119	BONAI DARUSSALAM	Sontang	2
120	BONAI DARUSSALAM	Pauh	2
121	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	1
122	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	1
123	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	1
124	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	1
125	ROKAN IV KOTO	Rokan	1
126	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	1
127	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	1
128	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	1
129	ROKAN IV KOTO	Alahan	1
130	ROKAN IV KOTO	Pemandang	1
131	KABUN	Kabun	1
132	KABUN	Aliantan	1
133	KABUN	Koto Ranah	1
134	KABUN	Bencah Kesuma	1
135	KABUN	Batu Langkah Besar	1
136	KABUN	Giti	1
137	RAMBAH HILIR	Rambah	1
138	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	1
139	RAMBAH HILIR	Muara Musu	1
140	RAMBAH HILIR	Sejati	1
141	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	1
142	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	1
143	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	1

144	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	1
145	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	1

Sumber : Instrumen SSK 2024

Faktor pengaruh resiko :

- 1. Angka IRS (indek resiko sanitasi / EHRA)
- 2. Angka kemiskinan
- 3. Data sekunder
- 4. Jumlah penduduk
- 5. Kepadatan penduduk
- 6. Fungsi Urban -Urban/rural
- 7. Persepsi OPD

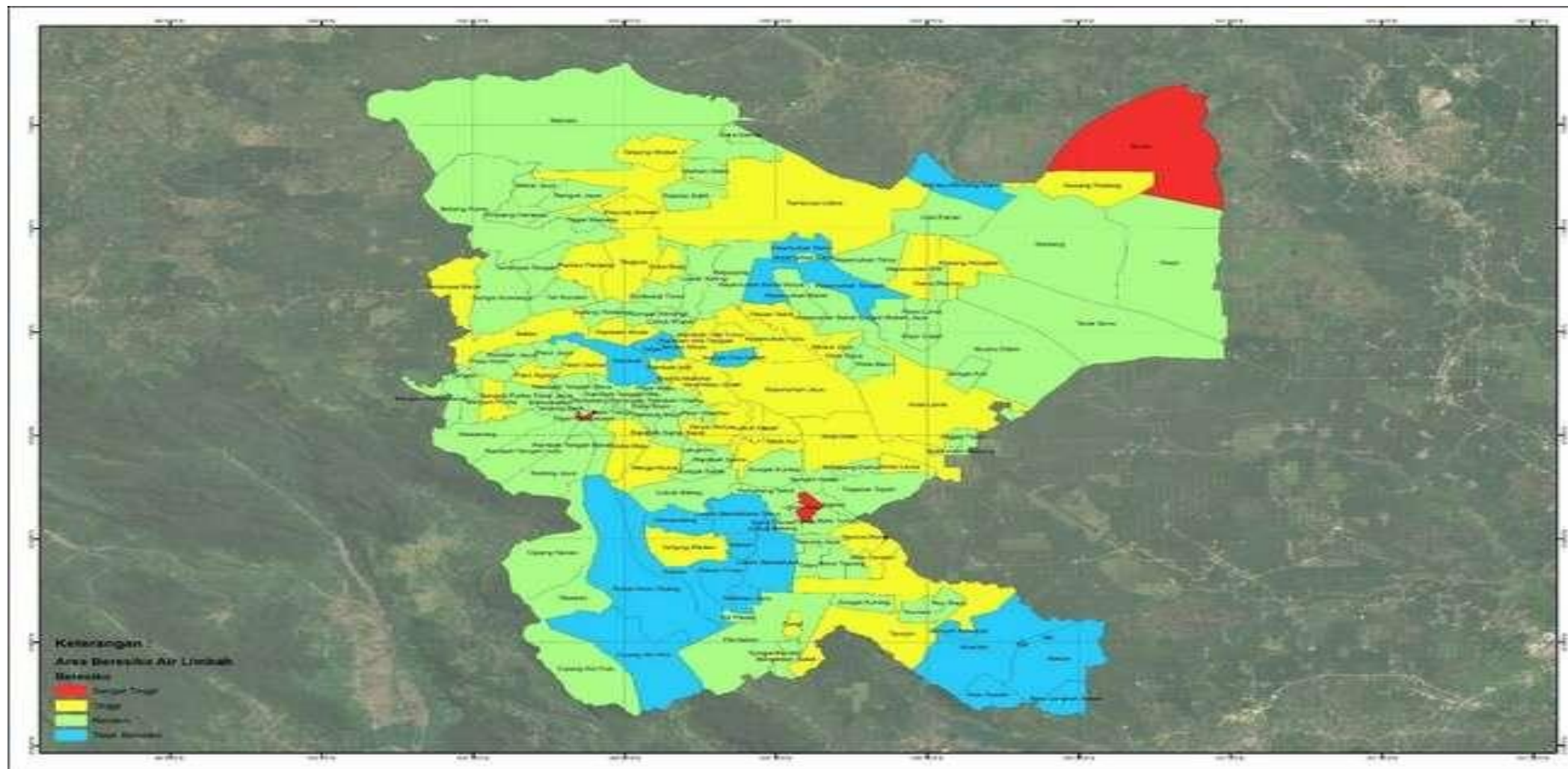
Keterangan :

Area beresiko 4 = Resiko Sangat Tinggi

Area beresiko 3 = Resiko Tinggi

Area beresiko 2 = Resiko Rendah

Area beresiko 1 = Tidak beresiko



Gambar 2.21 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik
(sumber : Instrumen SSK 2024)

Tabel 2.40 Permasalahan Mendesak Air Limbah
Pemetaan Permasalahan SPALD Setempat

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran Serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pengolahan Setempat	- Akses Layak Individu = 81,0% - Akses Belum Layak = 3,50 - BABS = 5,45%	Perda masih kurang oftimal/sosialisasi belum oftimal	UPTD belum ada, masih dibawah dinas (Perkim)	- Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian ada tetapi kemampuan ekonomi rendah. - Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian tidak ada padahal ekonomi mampu.	- Adanya MBR. - Bantuan pendanaan akan tangkiseptick individual dari Swasta belum ada.
Sub Sistem Penyedotan	Penyedotan = 0%				
Sub Sistem Pengangkutan	- Ada truck tinja 1 Unit Milik Pemda, tidak berfungsi. - Truck swasta ada tapi tidak tercatat.				
Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja	IPLT belum berfungsi maksimal				

Sub Sistem Pembuangan/Reuse Yang Aman	Akses Aman = 1,19% (SPALDS 2020 sd 2024 tetapi tidak melakukan penyedotan untuk diolah ke IPLT)				
--	--	--	--	--	--

Pemetaan Permasalahan SPALD Terpusat

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pelayanan	Akses Aman = 0,20% (518 SR)	Perda masih kurang optimal/ sosialis asi belum optimal	▪ KSM Sebagian tidak berjalan, sehingga bangunan IPALD tidak terawat.	• Rasa akan memiliki Prasarana IPALD masih minim. • Sebagian Masyarakat memutuskan SR nya dari IPALD karena membangun sendiri Tangkiseptiknya	• Iuran untuk operasional IPALD masih minim.
Sub Sistem Pengumpulan/Pengangkutan					
Sub Sistem PENGOLAHAN TERPUSAT					
Sub Sistem PEMBUANGAN/REUSE YANG AMAN	Pemeriksaan Effluen Semesteran Tidak Dilakukan				

Sumber : Data Sekunder, Instrumen SSK 2024

2.3.2. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

Tabel 2.41 Area Beresiko Persampahan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
1	UJUNG BATU	Ujung Batu	4
2	RAMBAH	Pasir Pengaraian	4
3	BANGUN PURBA	Bangun Purba	4
4	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	4
5	BONAI DARUSSALAM	Bonai	4
6	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hulu	3
7	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	3
8	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	3
9	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	3
10	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	3
11	ROKAN IV KOTO	Rokan	3
12	ROKAN IV KOTO	Cipang Kanan	3
13	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	3
14	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	3
15	ROKAN IV KOTO	Tibawan	3
16	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	3
17	ROKAN IV KOTO	Alahan	3
18	ROKAN IV KOTO	Pemandang	3
19	PENDALIAN IV KOTO	Pendalian	3
20	PENDALIAN IV KOTO	Bengkolan Salak	3
21	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	3
22	PENDALIAN IV KOTO	Air Panas	3
23	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	3
24	TANDUN	Kumain	3
25	TANDUN	Bono Tapung	3
26	TANDUN	Dayo	3
27	TANDUN	Tapung Jaya	3
28	TANDUN	Tandun	3
29	TANDUN	Puo Raya	3
30	TANDUN	Koto Tandun	3
31	TANDUN	Tandun Barat	3
32	KABUN	Koto Ranah	3
33	KABUN	Giti	3
34	UJUNG BATU	Ujung Batu Timur	3
35	UJUNG BATU	Ngaso	3
36	UJUNG BATU	Suka Damai	3

37	UJUNG BATU	Pematang Tebih	3
38	RAMBAH SAMO	Rambah Samo Barat	3
39	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	3
40	RAMBAH SAMO	Rambah Samo	3
41	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	3
42	RAMBAH SAMO	Rambah Baru	3
43	RAMBAH SAMO	Rambah Utama	3
44	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	3
45	RAMBAH SAMO	Langkitin	3
46	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	3
47	RAMBAH SAMO	Sungai Salak	3
48	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	3
49	RAMBAH SAMO	Lubuk Bilang	3
50	RAMBAH	Menaming	3
51	RAMBAH	Rambah Tengah Hulu	3
52	RAMBAH	Rambah Tengah Barat	3
53	RAMBAH	Rambah Tengah Hilir	3
54	RAMBAH	Pasir Baru	3
55	RAMBAH	Tanjung Belit	3
56	RAMBAH	Sialang Jaya	3
57	RAMBAH	Suka Maju	3
58	RAMBAH	Pasir Maju	3
59	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	3
60	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	3
61	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	3
62	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	3
63	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	3
64	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	3
65	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	3
66	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	3
67	RAMBAH HILIR	Rambah	3
68	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	3
69	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	3
70	RAMBAH HILIR	Muara Musu	3
71	RAMBAH HILIR	Sejati	3
72	BANGUN PURBA	Pasir Agung	3
73	BANGUN PURBA	Pasir Intan	3
74	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	3
75	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	3
76	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	3

77	BANGUN PURBA	Tangun	3
78	TAMBUSAI	Tambusai Barat	3
79	TAMBUSAI	Sungai Kumango	3
80	TAMBUSAI	Batas	3
81	TAMBUSAI	Tali Kumain	3
82	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	3
83	TAMBUSAI	Rantau Panjang	3
84	TAMBUSAI	Sialang Rindang	3
85	TAMBUSAI	Tambusai Timur	3
86	TAMBUSAI	Sukamaju	3
87	TAMBUSAI	Batang Kumu	3
88	TAMBUSAI	Tingkok	3
89	TAMBUSAI	Lubuk Soting	3
90	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	3
91	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	3
92	TAMBUSAI UTARA	Payung Sekaki	3
93	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	3
94	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	3
95	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	3
96	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	3
97	TAMBUSAI UTARA	Tambusai Utara	3
98	TAMBUSAI UTARA	Mahato	3
99	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	3
100	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	3
101	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	3
102	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	3
103	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	3
104	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	3
105	KEPENUHAN	Ulak Patian	3
106	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	3
107	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	3
108	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	3
109	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	3
110	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	3
111	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	3
112	KEPENUHAN HULU	Kepayang	3
113	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	3
114	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	3
115	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	3
116	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	3

117	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	3
118	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kuti	3
119	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	3
120	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	3
121	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	3
122	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	3
123	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	3
124	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	3
125	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	3
126	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	3
127	BONAI DARUSSALAM	Sontang	3
128	BONAI DARUSSALAM	Pauh	3
129	BONAI DARUSSALAM	Kasang Padang	3
130	BONAI DARUSSALAM	Kasang Mungkal	3
131	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	2
132	RAMBAH SAMO	Pasir Makmur	2
133	RAMBAH SAMO	Sungai Kuning	2
134	RAMBAH	Rambah Tengah Utara	2
135	RAMBAH	Koto Tinggi	2
136	RAMBAH	Pematang Berangan	2
137	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	2
138	TANDUN	Sungai Kuning	1
139	KABUN	Kabun	1
140	KABUN	Aliantan	1
141	KABUN	Bencah Kesuma	1
142	KABUN	Batu Langkah Besar	1
143	RAMBAH	Babussalam	1
144	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	1
145	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	1

Sumber : Instrumen SSK 2024

Faktor pengaruh resiko :

1. Angka IRS (indek resiko sanitasi / EHRA)
2. Angka kemiskinan
3. Data sekunder
4. Jumlah penduduk
5. Kepadatan penduduk
6. Fungsi Urban -Urban/rural
7. Persepsi OPD

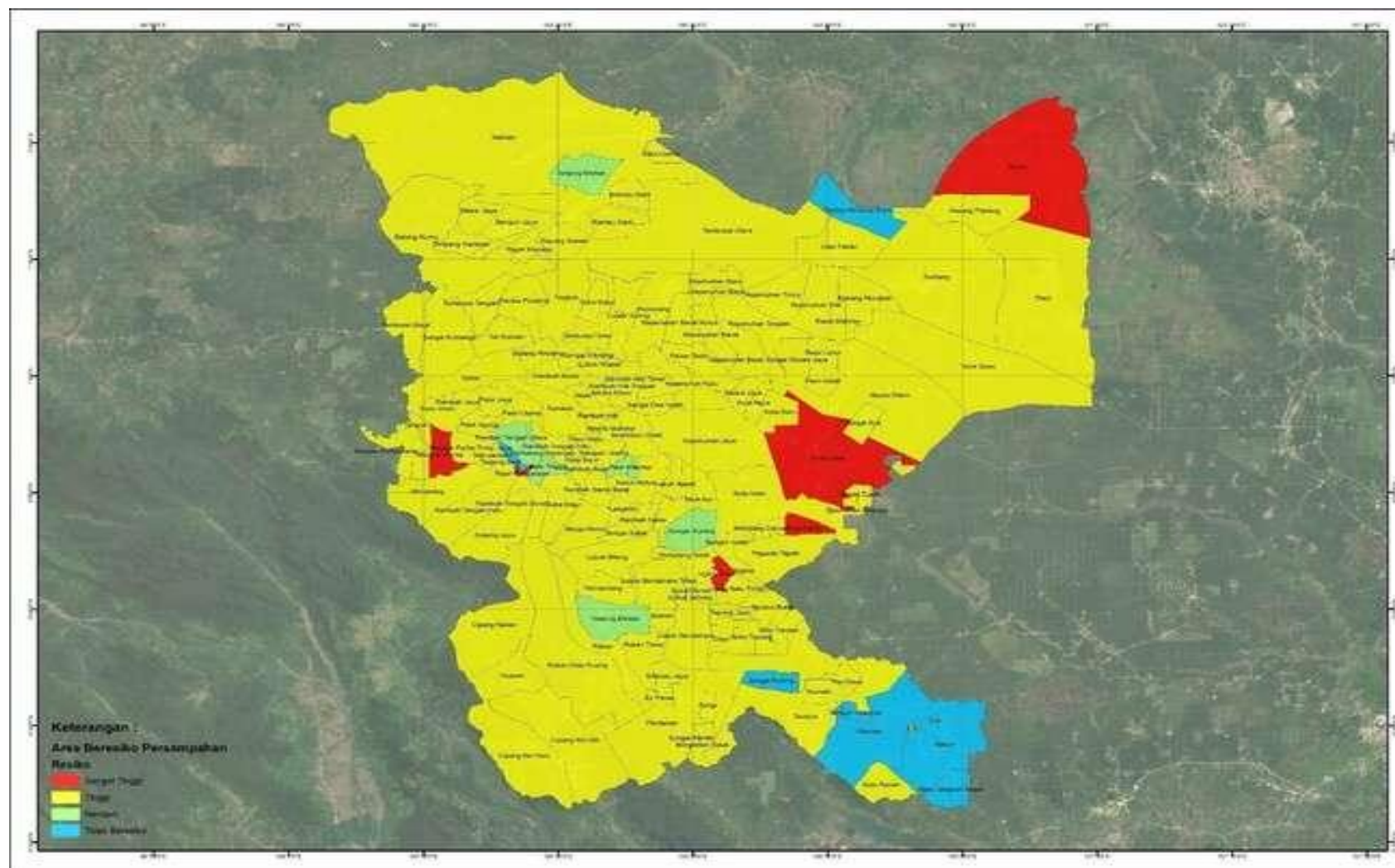
Keterangan :

Area beresiko 4 = Resiko Sangat Tinggi

Area beresiko 3 = Resiko Tinggi

Area beresiko 2 = Resiko Rendah

Area beresiko 1 = Tidak beresiko



Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
----------------	--------------	----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

Sub Sistem Pemilahan	- Pemilahan dimasyarakat masih tidak ada data - Pengurangan sampah wilayah perkotaan 6,8%, ada GAP 8,2% (2029)	Perda kurang berjalan optimal	- SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas dimana masih Kurangnya personil yang kompeten dalam penanganan sampah yang menguasai teknis pengelolaan persampahan. - Kelembagaan dimasyarakat belum optimal.	- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. - Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya terhadap akses informasi, dan mengolah sampah secara benar dan membuang sampah disembarang tempat. - Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	- Minimnya pendanaan dari APBD Kabupaten. - Belum ada penggalan pendanaan dari sektor swasta.
Sub Sistem Pewadahan dan Pengumpulan	- TPS tidak tersebar merata sehingga Masyarakat menumpuk sampah pada titik titik TPS Liar. - Terbatasnya sarana prasarana (seperti tempat penampungan sampah sementara (TPS), kontainer, bin/tong, bak permanen) diwilayah perkotaan yang menjadi layanan TPA.				
Sub Sistem Pengangkutan	Sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan terbatas/minim dan sudah			Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengangkutan persampahan.	

	berumur tua				
--	-------------	--	--	--	--

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pengolahan	- Sampah belum terolah secara optimal seperti sampah organik menjadi kompos. - TPS3R belum berfungsi optimal (1 TPS3R berfungsi, 4 tidak berfungsi) - Bank sampah cuman ada 3 unit, masih kurang. - TPST belum ada.			- Kurangnya sosialisasi, edukasi dan penyadaran. - Belum dikembangkannya potensi masyarakat secara sistematis. - Tidak ada investasi dunia usaha / swasta. - Belum adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.	

Sub Sistem Pemrosesan Akhir	• Penanganan Perkotaan masih minim 66,9% • Usia alat berat sudah tua tingkat kerusakan cukup tinggi • Kondisi TPA/Landfil aktif sudah mendekati batas ketentuan daya tampung/overload. • Laboratorium, Hanggar Alat Berat tidak memadai.				
------------------------------------	--	--	--	--	--

2.3.3. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase

Tabel 2.43 Area Beresiko Drainase

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
1	RAMBAH	Pasir Pengaraian	4
2	UJUNG BATU	Ujung Batu	3
3	RAMBAH SAMO	Sungai Kuning	3
4	RAMBAH	Babussalam	3
5	KEPENUHAN	Ulak Patian	3
6	BONAI DARUSSALAM	Kasang Padang	3
7	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	2
8	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	2
9	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	2
10	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	2
11	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hulu	1
12	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	1
13	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	1
14	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	1
15	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	1
16	ROKAN IV KOTO	Rokan	1
17	ROKAN IV KOTO	Cipang Kanan	1
18	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	1
19	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	1
20	ROKAN IV KOTO	Tibawan	1
21	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	1
22	ROKAN IV KOTO	Alahan	1
23	ROKAN IV KOTO	Pemandang	1
24	PENDALIAN IV KOTO	Pendalian	1
25	PENDALIAN IV KOTO	Bengkolan Salak	1
26	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	1
27	PENDALIAN IV KOTO	Air Panas	1
28	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	1
29	TANDUN	Kumain	1
30	TANDUN	Bono Tapung	1
31	TANDUN	Dayo	1
32	TANDUN	Tapung Jaya	1
33	TANDUN	Tandun	1
34	TANDUN	Puo Raya	1
35	TANDUN	Sungai Kuning	1
36	TANDUN	Koto Tandun	1

37	TANDUN	Tandun Barat	1
38	KABUN	Kabun	1
39	KABUN	Aliantan	1
40	KABUN	Koto Ranah	1
41	KABUN	Bencah Kesuma	1
42	KABUN	Batu Langkah Besar	1
43	KABUN	Giti	1
44	UJUNG BATU	Ujung Batu Timur	1
45	UJUNG BATU	Ngaso	1
46	UJUNG BATU	Suka Damai	1
47	UJUNG BATU	Pematang Tebih	1
48	RAMBAH SAMO	Rambah Samo Barat	1
49	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	1
50	RAMBAH SAMO	Rambah Samo	1
51	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	1
52	RAMBAH SAMO	Rambah Baru	1
53	RAMBAH SAMO	Rambah Utama	1
54	RAMBAH SAMO	Pasir Makmur	1
55	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	1
56	RAMBAH SAMO	Langkitin	1
57	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	1
58	RAMBAH SAMO	Sungai Salak	1
59	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	1
60	RAMBAH SAMO	Lubuk Bilang	1
61	RAMBAH	Menaming	1
62	RAMBAH	Rambah Tengah Hulu	1
63	RAMBAH	Rambah Tengah Barat	1
64	RAMBAH	Rambah Tengah Utara	1
65	RAMBAH	Rambah Tengah Hilir	1
66	RAMBAH	Pasir Baru	1
67	RAMBAH	Tanjung Belit	1
68	RAMBAH	Sialang Jaya	1
69	RAMBAH	Koto Tinggi	1
70	RAMBAH	Suka Maju	1
71	RAMBAH	Pematang Berangan	1
72	RAMBAH	Pasir Maju	1
73	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	1
74	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	1
75	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	1
76	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	1

77	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	1
78	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	1
79	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	1
80	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	1
81	RAMBAH HILIR	Rambah	1
82	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	1
83	RAMBAH HILIR	Muara Musu	1
84	RAMBAH HILIR	Sejati	1
85	BANGUN PURBA	Bangun Purba	1
86	BANGUN PURBA	Pasir Agung	1
87	BANGUN PURBA	Pasir Intan	1
88	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	1
89	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	1
90	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	1
91	BANGUN PURBA	Tangun	1
92	TAMBUSAI	Tambusai Barat	1
93	TAMBUSAI	Sungai Kumango	1
94	TAMBUSAI	Batas	1
95	TAMBUSAI	Tali Kumain	1
96	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	1
97	TAMBUSAI	Rantau Panjang	1
98	TAMBUSAI	Sialang Rindang	1
99	TAMBUSAI	Tambusai Timur	1
100	TAMBUSAI	Sukamaju	1
101	TAMBUSAI	Batang Kumu	1
102	TAMBUSAI	Tingkok	1
103	TAMBUSAI	Lubuk Soting	1
104	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	1
105	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	1
106	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	1
107	TAMBUSAI UTARA	Payung Sekaki	1
108	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	1
109	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	1
110	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	1
111	TAMBUSAI UTARA	Tambusai Utara	1
112	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	1
113	TAMBUSAI UTARA	Mahato	1
114	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	1
115	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	1
116	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	1

117	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	1
118	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	1
119	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	1
120	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	1
121	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	1
122	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	1
123	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	1
124	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	1
125	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	1
126	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	1
127	KEPENUHAN HULU	Kepayang	1
128	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	1
129	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	1
130	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	1
131	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	1
132	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	1
133	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	1
134	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kuti	1
135	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	1
136	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	1
137	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	1
138	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	1
139	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	1
140	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	1
141	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	1
142	BONAI DARUSSALAM	Sontang	1
143	BONAI DARUSSALAM	Bonai	1
144	BONAI DARUSSALAM	Pauh	1
145	BONAI DARUSSALAM	Kasang Mungkal	1

Sumber : Instrumen SSK 2024

Faktor pengaruh resiko :

1. Angka IRS (indek resiko sanitasi / EHRA)
2. Angka kemiskinan
3. Data sekunder
4. Jumlah penduduk
5. Kepadatan penduduk
6. Fungsi Urban -Urban/rural
7. Persepsi OPD

Keterangan :

Area beresiko 4 = Resiko Sangat Tinggi

Area beresiko 3 = Resiko Tinggi

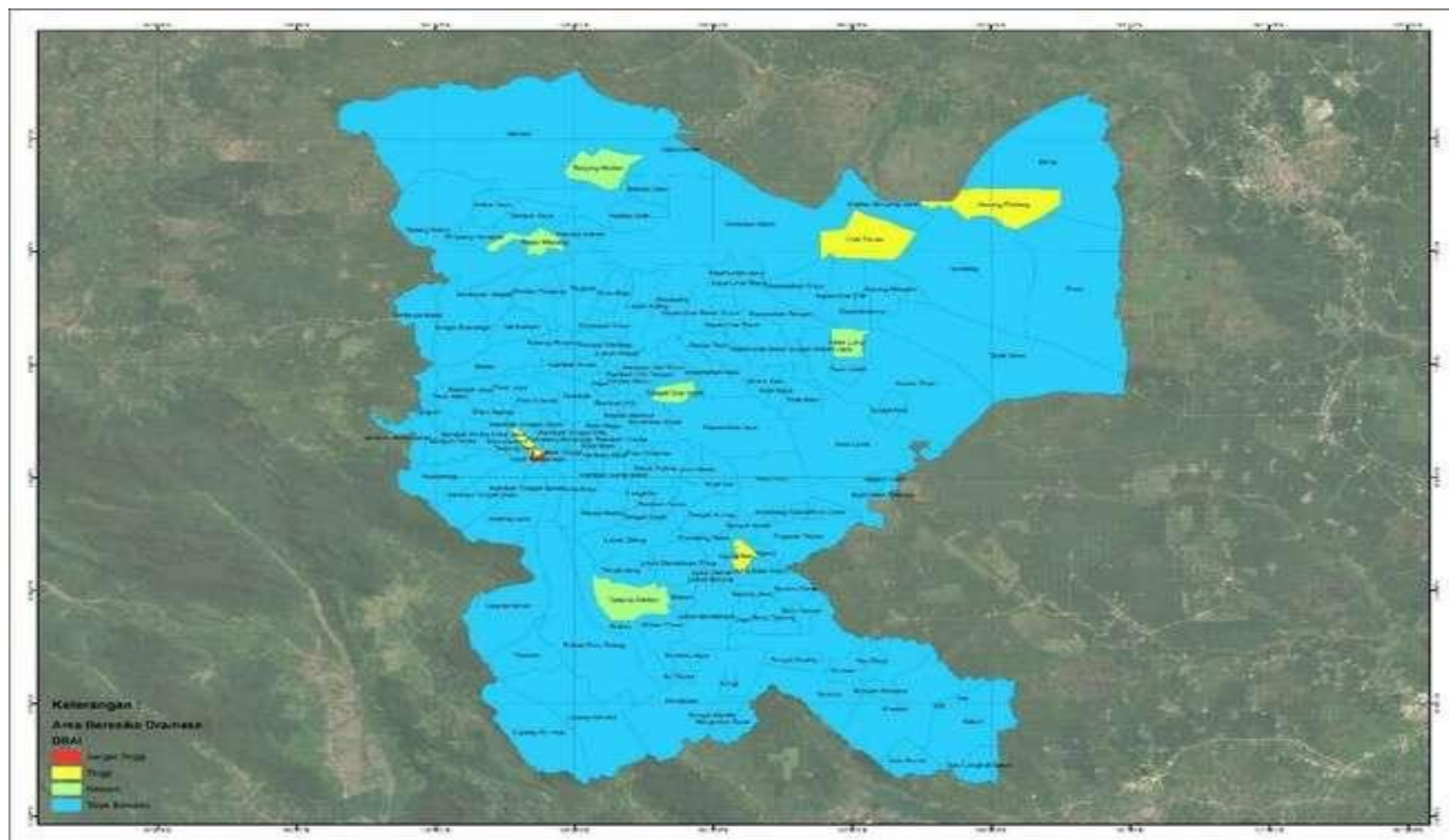
Area beresiko 2 = Resiko Rendah

Area beresiko 1 = Tidak beresiko

Tabel 2.44 Permasalahan Mendesak Drainase

Permasalahan Mendesak	
Teknis	
User Interface	Berdasarkan Data EHRA : - Rumah tangga yang mengalami banjir secara rutin di Kab. Rokan Hulu : 39,4 % - Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari : 49,6 % - Adanya terjadi genangan air (banjir) : 28,9 % Berdasarkan Analisi Intrumen Profil Luas area pemukiman rawan genangan/banjir 3,878 (ha) atau 5 % dari luas area terbangun
Penampungan	Gray water masih bercampur dengan saluran drainase Penanganan drainase masih belum terpadu.
Non Teknis	
Aspek Peraturan dan perundangan	- Belum adanya Perda tentang pengelolaan drainase skala kabupaten. - Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase.
Aspek Regulasi	Belum ada perda pengelolaan drainase
Aspek Masyarakat	- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi drainase. - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran drainase yang ada.
Aspek Komunikasi	Belum ada media dialog dan komunikasi ke masyarakat pentingnya pengelolaan drainase lingkungan
Aspek Pendanaan	Belum optimalnya pendanaan untuk sektor Drainase lingkungan.

Sumber : Study EHRA dan data sekunder 2024



Gambar 2.23 Peta Area Beresiko Drainase

(sumber : Instrumen SSK 2024)

BAB 3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN

3.1. VISI DAN MISI SANITASI

Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program. Kabupaten Rokan Hulu telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu.

Pokja PKP telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang diturunkan dari visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam RPJMD. Tabel di bawah ini merupakan gambaran tentang Visi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dan Misi per-subsektor.

Tabel 3.1 Visi Dan Misi Sanitasi Kabupaten Rokan *Hulu*

Visi Kab. Rokan Hulu	Misi Kab. Rokan Hulu	Visi Sanitasi Kab. Rokan Hulu	Misi Sanitasi Kab. Rokan Hulu
“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai-nilai Agama Menuju Masyarakat Sejahtera”	1. Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Misi 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah. 3. Misi 3: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 4. Misi 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda. 5. Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.	“TERWUJUDNYA SANITASI AMAN DAN BERKELANJUTAN MENUJU ROKAN HULU LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING”	Misi Air Limbah Domestik: 1. Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah domestik. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik. 4. Meningkatkan kualitas SDM pengelola air limbah domestik. Misi Persampahan: 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan 2. Meningkatkan cakupan layanan dan peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan.

Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

3.2. RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 2 (dua) sektor yaitu Air Limbah Domestik dan Persampahan.

a. Air Limbah Domestik

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan sektor Air Limbah

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Tercapainya Sanitasi yang berkelanjutan dengan peningkatan akses aman dalam pengelolaan air limbah domestik.	1. Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. 2. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. 3. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. 4. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029. 5. Adanya jadwal operasional truk tinja sesuai layanan IPLT. 6. Dioperasionalkannya IPLT. 7. Adanya Sosialisai Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. 8. Adanya/terbentuknya dan Pengesahan UPTD sebagai lembaga Air Limbah Domestik yang memisahkan regulator dan Operator untuk mendukung L2T2. 9. Tersedianya kapasitas SDM operator yang berdaya, dan memahami operasional IPAL/IPLT serta manajerial. 10. Tersusunnya rencana kerja UPTD baru. 11. Adanya bantuan Tangkiseptick untuk MBR.	1. Masih ada BABS sebesar 5,45% (8.154 KK) 2. Masih ada akses belum layak sebesar 3,5%. 3. Akses Layak masih 91,05%. 4. Akses Aman masih rendah sebesar 1,39%. 5. Penyedotan Tangkiseptick dari RT ke IPLT sebesar 0% 6. Belum diopersionalkannya sarana pengangkutan resmi/truk tinja. 7. IPLT tidak berfungsi maksimal 8. Perda belum tersosialisasi dengan maksimal. 9. UPTD belum ada 10. Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian ada tetapi kemampuan ekonomi rendah. 11. Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian tidak ada padahal ekonomi mampu. 12. Masih ada masyarakat yang enggan menyambung SR nya ke SPALDT. 13. Iuran masyarakat untuk operasional kurang. 14. Rasa akan memiliki prasarana kurang.

	12. Adanya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam kegiatan Promosi/ Kampanye/ Edukasi Higiene dan sanitasi aman berkelanjutan serta adanya dukungan aturan lokal (Perdes). 13. untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas lingkungan. 14. Adanya KPP Pengelola Tangki Septik Komunal dengan SK Kepala Desa. 15. Adanya pemahaman masyarakat pengguna layanan Tangki Septik Komunal untuk memelihara infrastruktur terbangun. 16. Adanya dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah dan swasta	15. Bantuan pendanaan akan tangkiseptick individual (SPALDS dan SPALDT) baik dari APBD dan lainnya rendah.
--	--	---

Sumber: Pokja PKP Kab.Rokan Hulu 2024

a. Persampahan

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan sektor Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Tercapainya Sanitasi yang berkelanjutan dengan peningkatan penanganan dan pengurangan sampah.	1. Meningkatkan capaian pengurangan sampah wilayah perkotaan dari 6,8% menjadi 15% pada tahun 2029. 2. Adanya pembangunan sarana TPS pada daerah padat layanan TPA. 3. Tersedianya sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan. 4. Berfungsinya TPS3R (4 Unit) 5. Adanya infrastruktur bank sampah baru. 6. Adanya gerakan bersama untuk semua lapisan masyarakat komposting sampah organik dari rumah. 7. Meningkatkan capaian penanganan sampah wilyah perkotaan dari 66,9% menjadi 80% pada tahun 2029.	1. Pengurangan sampah wilayah perkotaan 6,8% dari jumlah penduduk perkotaan. 2. Adanya TPS (Tempat Pengumpulan Sampah) liar 3. Sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sudah berumur tua. 4. TPS3R ada tidak berfungsi (4 Unit) 5. Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih rendah sebesar 0,02%. 6. Sampah belum terolah secara optimal seperti sampah organik menjadi kompos. 7. Penanganan sampah wilayah perkotaan sebesar 66,9%.

8. Berjalannya Perda yang menjangkau semua lapisan Masyarakat.

8. Alat Berat masih kurang.
9. Tersedianya tenaga operator yang mempunyai keahlian dalam pengolahan sampah di TPS3R dan TPA.

9. Perda tidak berjalan maksimal.
10. Adanya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam kegiatan Promosi/ Kampanye/ Edukasi Higiene dan sanitasi aman berkelanjutan.

10. SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas.
11. Adanya dukungan aturan lokal (Perdes) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas lingkungan

11. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah & perilaku membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
12. Adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.

12. Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya terhadap akses informasi, dan mengolah sampah secara benar dan tidak membuang sampah disembarang tempat.
13. Terbentuknya Forum CSR.

13. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan penyadaran.
14.

14. Belum dikembangkan potensi masyarakat secara sistematis.
15.

15. Belum adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.
16.

16. Belum ada penggalan pendanaan dari sektor swasta.

Sumber: Pokja PKP Kab.Rokan Hulu 2024.

3.3.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Rencana pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota. Tahapan pengembangan dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tabel tahapan pengembangan sanitasi memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan air limbah domestik dan persampahan hingga lima (5) tahun kedepan. Rencana pengembangan sanitasi dibagi 2 tahapan yaitu:

1. Tahapan jangka pendek.
Tahapan jangka pendek dihitung dua tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).

2. Tahapan jangka menengah.

Tahapan jangka menengah dihitung lima tahun dari penyusunan dokumen (n+5) tahapan jangka menengah di rumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

a. Tahapan jangka pendek

Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan persentase eksisting air limbah domestik serta target jangka pendek dan menengah dari sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), maka terdapat dua SPALD yaitu SPALD Setempat (SPALDS) dan SPALD Terpusat (SPALDT).

Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Komponen	Target RPJMN 2025-2029 (%)	Target - 2029(%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu				
Akses Aman	15%	11,0%	10,0%	5,0%	1,39%	8,6%	3,6%
Akses Layak	90%	90,0%	95,0%	93,0%	91,05%	4,0%	2,0%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	90,0%	85,0%	81,00%	9,0%	4,0%
Akses Layak Bersama	0%*	0%**	5,0%	3,0%	1,76%	3,2%	1,2%
Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	3,0%	6,89%	-6,89%	-3,89%
Akses Belum Layak*	0%	0,0%	0,0%	1,5%	3,50%	-3,50%	-2,0%
BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	3,0%	5,45%	-5,45%	-2,45%

Sumber: Instrumen SSK 2024

Berdasarkan Instrumen SSK 2024 Kabupaten Rokan Hulu, dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah, Kabupaten Rokan Hulu hanya terdapat satu kondisi pengembangan yang direferensikan yaitu pengelolaan dengan SPALD–Setempat. Tahapan pengembangan dibagi dalam target jangka pendek dan menengah:

Kondisi 1	Pengelolaan dengan SPALD-Setempat jangka pendek;
Kondisi 2	Pengelolaan dengan SPALD-Setempat jangka

	menengah.
--	-----------

Tabel berikut berisi analisis sistem yang disarankan dalam pengembangan air limbah domestik serta analisis tipe penyesuaian kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Sistem Pengembangan Pembangunan sistem
Air Limbah Domestik**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal	Jumlah jiwa perlu mendapatkan akses di tahun akhir perencanaan perkelurahan desa")
1	Rokan Iv Koto	Cipang Kiri Hulu	SPALDS	SPALDS	2.169
2	Rokan Iv Koto	Cipang Kiri Hilir	SPALDS	SPALDS	1.580
3	Rokan Iv Koto	Sikebau Jaya	SPALDS	SPALDS	48
4	Rokan Iv Koto	Lubuk Bendahara	SPALDS	SPALDS	459
5	Rokan Iv Koto	Lubuk Bendahara Timur	SPALDS	SPALDS	52
6	Rokan Iv Koto	Tanjung Medan	SPALDS	SPALDS	80
7	Rokan Iv Koto	Rokan	SPALDS	SPALDS	265
8	Rokan Iv Koto	Cipang Kanan	SPALDS	SPALDS	800
9	Rokan Iv Koto	Rokan Koto Ruang	SPALDS	SPALDS	131
10	Rokan Iv Koto	Rokan Timur	SPALDS	SPALDS	117
11	Rokan Iv Koto	Tibawan	SPALDS	SPALDS	398
12	Rokan Iv Koto	Lubuk Betung	SPALDS	SPALDS	302
13	Rokan Iv Koto	Alahan	SPALDS	SPALDS	25
14	Rokan Iv Koto	Pemandang	SPALDS	SPALDS	94
15	Pendalian Iv Koto	Pendalian	SPALDS	SPALDS	344
16	Pendalian Iv Koto	Bengkolan Salak	SPALDS	SPALDS	431
17	Pendalian Iv Koto	Suligi	SPALDS	SPALDS	638
18	Pendalian Iv Koto	Air Panas	SPALDS	SPALDS	-
19	Pendalian Iv Koto	Sungai Kandis	SPALDS	SPALDS	571
20	Tandun	Kumain	SPALDS	SPALDS	-
21	Tandun	Bono Tapung	SPALDS	SPALDS	-
22	Tandun	Dayo	SPALDS	SPALDS	-
23	Tandun	Tapung Jaya	SPALDS	SPALDS	-
24	Tandun	Tandun	SPALDS	SPALDS	3.971
25	Tandun	Puo Raya	SPALDS	SPALDS	882
26	Tandun	Sungai Kuning	SPALDS	SPALDS	299
27	Tandun	Koto Tandun	SPALDS	SPALDS	1.317
28	Tandun	Tandun Barat	SPALDS	SPALDS	675
29	Kabun	Kabun	SPALDS	SPALDS	6.147

30	Kabun	Aliantan	SPALDS	SPALDS	254
31	Kabun	Koto Ranah	SPALDS	SPALDS	200
32	Kabun	Bencah Kesuma	SPALDS	SPALDS	34
33	Kabun	Batu Langkah Besar	SPALDS	SPALDS	147
34	Kabun	Giti	SPALDS	SPALDS	421
35	Ujung Batu	Ujung Batu	SPALDS	SPALDS	636
36	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	SPALDS	SPALDS	220
37	Ujung Batu	Ngaso	SPALDS	SPALDS	136
38	Ujung Batu	Suka Damai	SPALDS	SPALDS	487
39	Ujung Batu	Pematang Tebih	SPALDS	SPALDS	415
40	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	SPALDS	SPALDS	114
41	Rambah Samo	Marga Mulya	SPALDS	SPALDS	-
42	Rambah Samo	Rambah Samo	SPALDS	SPALDS	384
43	Rambah Samo	Karya Mulya	SPALDS	SPALDS	-
44	Rambah Samo	Rambah Baru	SPALDS	SPALDS	269
45	Rambah Samo	Rambah Utama	SPALDS	SPALDS	256
46	Rambah Samo	Pasir Makmur	SPALDS	SPALDS	-
47	Rambah Samo	Masda Makmur	SPALDS	SPALDS	-
48	Rambah Samo	Langkitin	SPALDS	SPALDS	316
49	Rambah Samo	Lubuk Napal	SPALDS	SPALDS	272
50	Rambah Samo	Sungai Salak	SPALDS	SPALDS	287
51	Rambah Samo	Teluk Aur	SPALDS	SPALDS	214
52	Rambah Samo	Lubuk Bilang	SPALDS	SPALDS	583
53	Rambah Samo	Sungai Kuning	SPALDS	SPALDS	-
54	Rambah	Menaming	SPALDS	SPALDS	15
55	Rambah	Rambah Tengah Hulu	SPALDS	SPALDS	1.228
56	Rambah	Rambah Tengah Barat	SPALDS	SPALDS	1.202
57	Rambah	Pasir Pengaraian	SPALDS	SPALDS	-
58	Rambah	Rambah Tengah Utara	SPALDS	SPALDS	1
59	Rambah	Rambah Tengah Hilir	SPALDS	SPALDS	-
60	Rambah	Pasir Baru	SPALDS	SPALDS	-
61	Rambah	Tanjung Belit	SPALDS	SPALDS	-
62	Rambah	Sialang Jaya	SPALDS	SPALDS	-
63	Rambah	Koto Tinggi	SPALDS	SPALDS	183
64	Rambah	Suka Maju	SPALDS	SPALDS	199
65	Rambah	Pematang Berangan	SPALDS	SPALDS	-
66	Rambah	Babussalam	SPALDS	SPALDS	28
67	Rambah	Pasir Maju	SPALDS	SPALDS	-
68	Rambah Hilir	Pasir Jaya	SPALDS	SPALDS	-
69	Rambah Hilir	Pasir Utama	SPALDS	SPALDS	-

70	Rambah Hilir	Rambah Hilir	SPALDS	SPALDS	-
71	Rambah Hilir	Rambah Muda	SPALDS	SPALDS	-
72	Rambah Hilir	Sungai Sitolang	SPALDS	SPALDS	-
73	Rambah Hilir	Lubuk Krapat	SPALDS	SPALDS	-
74	Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	SPALDS	SPALDS	44
75	Rambah Hilir	Rambah Hilir Timur	SPALDS	SPALDS	62
76	Rambah Hilir	Rambah	SPALDS	SPALDS	-
77	Rambah Hilir	Serombau Indah	SPALDS	SPALDS	981
78	Rambah Hilir	Sungai Dua Indah	SPALDS	SPALDS	285
79	Rambah Hilir	Muara Musu	SPALDS	SPALDS	357
80	Rambah Hilir	Sejati	SPALDS	SPALDS	-
81	Bangun Purba	Bangun Purba	SPALDS	SPALDS	139
82	Bangun Purba	Pasir Agung	SPALDS	SPALDS	-
83	Bangun Purba	Pasir Intan	SPALDS	SPALDS	-
84	Bangun Purba	Rambah Jaya	SPALDS	SPALDS	-
85	Bangun Purba	Bangun Purba Timur Jaya	SPALDS	SPALDS	639
86	Bangun Purba	Bangun Purba Barat	SPALDS	SPALDS	212
87	Bangun Purba	Tangun	SPALDS	SPALDS	710
88	Tambusai	Tambusai Barat	SPALDS	SPALDS	243
89	Tambusai	Sungai Kumango	SPALDS	SPALDS	432
90	Tambusai	Batas	SPALDS	SPALDS	-
91	Tambusai	Tali Kumain	SPALDS	SPALDS	-
92	Tambusai	Tambusai Tengah	SPALDS	SPALDS	2.705
93	Tambusai	Rantau Panjang	SPALDS	SPALDS	100
94	Tambusai	Sialang Rindang	SPALDS	SPALDS	-
95	Tambusai	Tambusai Timur	SPALDS	SPALDS	227
96	Tambusai	Sukamaju	SPALDS	SPALDS	501
97	Tambusai	Batang Kumu	SPALDS	SPALDS	1.255
98	Tambusai	Tingkok	SPALDS	SPALDS	293
99	Tambusai	Lubuk Soting	SPALDS	SPALDS	1.124
100	Tambusai Utara	Suka Damai	SPALDS	SPALDS	-
101	Tambusai Utara	Mahato Sakti	SPALDS	SPALDS	-
102	Tambusai Utara	Rantau Sakti	SPALDS	SPALDS	-
103	Tambusai Utara	Payung Sekaki	SPALDS	SPALDS	-
104	Tambusai Utara	Pagar Mayang	SPALDS	SPALDS	-
105	Tambusai Utara	Simpang Harapan	SPALDS	SPALDS	-
106	Tambusai Utara	Mekar Jaya	SPALDS	SPALDS	-
107	Tambusai Utara	Bangun Jaya	SPALDS	SPALDS	80
108	Tambusai Utara	Tambusai Utara	SPALDS	SPALDS	-
109	Tambusai Utara	Tanjung Medan	SPALDS	SPALDS	-
110	Tambusai Utara	Mahato	SPALDS	SPALDS	89
111	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	SPALDS	SPALDS	682

112	Kepenuhan	Kepenuhan Barat	SPALDS	SPALDS	180
113	Kepenuhan	Kepenuhan Raya	SPALDS	SPALDS	846
114	Kepenuhan	Kepenuhan Baru	SPALDS	SPALDS	666
115	Kepenuhan	Kepenuhan Timur	SPALDS	SPALDS	209
116	Kepenuhan	Kepenuhan Hilir	SPALDS	SPALDS	91
117	Kepenuhan	Ulak Patian	SPALDS	SPALDS	347
118	Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	SPALDS	SPALDS	201
119	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Mulya	SPALDS	SPALDS	625
120	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	SPALDS	SPALDS	186
121	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Jaya	SPALDS	SPALDS	33
122	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	SPALDS	SPALDS	206
123	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SPALDS	SPALDS	50
124	Kepenuhan Hulu	Pekan Tebih	SPALDS	SPALDS	136
125	Kepenuhan Hulu	Kepayang	SPALDS	SPALDS	30
126	Kunto Darussalam	Kota Intan	SPALDS	SPALDS	202
127	Kunto Darussalam	Kota Lama	SPALDS	SPALDS	-
128	Kunto Darussalam	Bukit Intan Makmur	SPALDS	SPALDS	-
129	Kunto Darussalam	Bagan Tujuh	SPALDS	SPALDS	-
130	Kunto Darussalam	Kota Raya	SPALDS	SPALDS	85
131	Kunto Darussalam	Kota Baru	SPALDS	SPALDS	105
132	Kunto Darussalam	Sungai Kutu	SPALDS	SPALDS	-
133	Kunto Darussalam	Pasir Indah	SPALDS	SPALDS	10
134	Kunto Darussalam	Muara Dilam	SPALDS	SPALDS	-
135	Kunto Darussalam	Pasir Luhur	SPALDS	SPALDS	-
136	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	SPALDS	SPALDS	-
137	Pagaran Tapah Darussalam	Kembang Damai	SPALDS	SPALDS	-
138	Pagaran Tapah Darussalam	Sangkir Indah	SPALDS	SPALDS	-
139	Bonai Darussalam	Teluk Sono	SPALDS	SPALDS	544
140	Bonai Darussalam	Rawa Makmur	SPALDS	SPALDS	71
141	Bonai Darussalam	Sontang	SPALDS	SPALDS	258
142	Bonai Darussalam	Bonai	SPALDS	SPALDS	2.563
143	Bonai Darussalam	Pauh	SPALDS	SPALDS	607
144	Bonai Darussalam	Kasang Padang	SPALDS	SPALDS	761
145	Bonai Darussalam	Kasang Mungkal	SPALDS	SPALDS	161

Sumber: Instrumen SSK 2024

b. Tahapan Pengembangan Persampahan

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun : 2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	82,0%	80,0%	73,0%	66,9%	13,1%	6,1%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	18,0%	15,0%	10,0%	6,8%	8,2%	3,2%

Sumber: Instrumen SSK 2024

Pada tabel diatas mengilustrasikan rencana target pengelolaan sampah yang akan dicapai pada jangka pendek dan jangka menengah. Terlihat bahwa masih terdapat gap capaian yang cukup tinggi untuk dicapai hingga akhir tahun 2029. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pengembangan persampahan Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

- a. Kondisi 1 : sampah tertangani ke pemrosesan akhir
- b. Kondisi 2 : sampah tertangani skala rumah tangga
- c. Kondisi 3 : pengurangan sampah

Adapun tahapan pengembangan yang disarankan berdasarkan analisis instrumen SSK 2024, untuk target 80% penanganan dan 15% pengurangan hingga akhir tahun perencanaan (2029) digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Sistem Pengembangan Pembangunan *Persampahan*

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
1	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hulu	452,27	32,44	0,44	-	-	-	-	-
2	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	376,89	27,03	0,37	-	-	-	-	-
3	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	383,35	27,50	0,37	-	-	-	-	-
4	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	438,63	31,46	319,52	472,19	94,44	377,76	62,98	58,24
5	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	413,51	29,66	0,40	-	-	-	-	-
6	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	188,09	13,49	0,19	-	-	-	-	-
7	ROKAN IV KOTO	Rokan	419,97	30,12	0,41	-	-	-	-	-
8	ROKAN IV KOTO	Cipang Kanan	315,87	22,66	0,31	-	-	-	-	-
9	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	405,61	29,09	0,39	-	-	-	-	-
10	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	293,62	21,06	0,29	-	-	-	-	-
11	ROKAN IV KOTO	Tibawan	203,17	14,58	0,20	-	-	-	-	-
12	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	264,19	18,95	0,26	-	-	-	-	-
13	ROKAN IV KOTO	Alahan	193,12	13,85	0,19	-	-	-	-	-
14	ROKAN IV KOTO	Pemandang	270,65	19,41	0,26	-	-	-	-	-
15	PENDALIAN IV KOTO	Pendalian	569,29	40,83	0,55	-	-	-	-	-
16	PENDALIAN IV KOTO	Bengkolan Salak	261,31	18,75	0,26	-	-	-	-	-
17	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	502,52	36,04	0,49	-	-	-	-	-

18	PENDALIAN IV KOTO	Air Panas	463,04	33,21	0,45	-	-	-	-	-
19	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	256,29	18,39	0,25	-	-	-	-	-
20	TANDUN	Kumain	452,99	32,49	0,44	-	-	-	-	-
21	TANDUN	Dayo	783,93	56,23	0,76	-	-	-	-	-
22	TANDUN	Dayo	783,93	56,23	0,76	-	-	-	-	-
23	TANDUN	Tapung Jaya	689,17	49,43	0,67	-	-	-	-	-
24	TANDUN	Tandun	1.212,51	86,96	883,25	1.261,86	252,38	1.009,49	165,42	126,24
25	TANDUN	Puo Raya	429,30	30,79	0,42	-	-	-	-	-
26	TANDUN	Sungai Kuning	338,13	24,25	0,33	-	-	-	-	-
27	TANDUN	Koto Tandun	431,45	30,95	314,29	449,04	89,81	359,24	58,86	44,95
28	TANDUN	Tandun Barat	279,26	20,03	203,43	290,75	58,15	232,60	38,12	29,17
29	KABUN	Kabun	2.871,53	205,95	2.091,77	3.052,62	610,53	2.442,10	404,58	350,33
30	KABUN	Aliantan	1.469,51	105,40	1,41	-	-	-	-	-
31	KABUN	Koto Ranah	341,72	24,51	0,33	-	-	-	-	-
32	KABUN	Bencah Kesuma	604,46	43,36	0,58	-	-	-	-	-
33	KABUN	Batu Langkah Besar	492,47	35,32	0,48	-	-	-	-	-
34	KABUN	Giti	362,54	26,01	0,35	-	-	-	-	-
35	UJUNG BATU	Ujung Batu	3.020,85	216,65	2.200,54	3.244,83	648,97	2.595,87	432,32	395,33
36	UJUNG BATU	Ujung Batu Timur	1.021,55	73,27	744,15	1.097,29	219,46	877,84	146,19	133,69
37	UJUNG BATU	Ngaso	911,72	65,39	664,14	979,38	195,88	783,51	130,49	119,37
38	UJUNG BATU	Suka Damai	1.073,24	76,98	781,80	1.152,92	230,59	922,34	153,61	140,54
39	UJUNG BATU	Pematang Tebih	1.428,59	102,46	1.040,66	1.534,48	306,90	1.227,59	204,44	186,93
40	RAMBAH SAMO	Rambah Samo Barat	692,04	49,64	504,12	719,86	143,98	575,89	94,34	71,77
41	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	440,78	31,62	0,43	-	-	-	-	-
42	RAMBAH SAMO	Rambah Samo	481,70	34,55	350,90	501,09	100,22	400,88	65,67	49,98
43	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	536,26	38,46	0,52	-	-	-	-	-

44	RAMBAH SAMO	Rambah Baru	533,39	38,26	0,52	-	-	-	-	-
45	RAMBAH SAMO	Rambah Utama	665,48	47,73	484,77	692,22	138,45	553,78	90,72	69,01
46	RAMBAH SAMO	Pasir Makmur	268,49	19,26	0,26	-	-	-	-	-
47	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	227,57	16,33	0,22	-	-	-	-	-
48	RAMBAH SAMO	Langkitin	315,16	22,61	0,31	-	-	-	-	-
49	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	198,14	14,21	0,20	-	-	-	-	-
50	RAMBAH SAMO	Sungai Salak	136,40	9,79	0,14	-	-	-	-	-
51	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	450,83	32,34	328,41	468,96	93,80	375,17	61,46	46,76
52	RAMBAH SAMO	Lubuk Bilang	199,58	14,32	0,20	-	-	-	-	-
53	RAMBAH SAMO	Sungai Kuning	568,57	40,78	0,55	-	-	-	-	-
54	RAMBAH	Menaming	506,83	36,35	369,20	531,78	106,36	425,43	70,01	56,23
55	RAMBAH	Rambah Tengah Hulu	434,32	31,15	0,42	-	-	-	-	-
56	RAMBAH	Rambah Tengah Barat	539,85	38,72	0,52	-	-	-	-	-
57	RAMBAH	Pasir Pengaraian	577,18	41,40	420,45	605,54	121,11	484,44	79,71	63,99
58	RAMBAH	Rambah Tengah Utara	593,69	42,58	432,48	622,77	124,56	498,22	81,98	65,74
59	RAMBAH	Rambah Tengah Hilir	564,98	40,52	411,56	592,80	118,56	474,24	78,04	62,68
60	RAMBAH	Pasir Baru	252,70	18,13	0,25	-	-	-	-	-
61	RAMBAH	Tanjung Belit	385,51	27,65	0,37	-	-	-	-	-
62	RAMBAH	Sialang Jaya	189,53	13,60	0,19	-	-	-	-	-
63	RAMBAH	Koto Tinggi	1.289,32	92,47	939,21	1.352,49	270,50	1.082,00	178,03	142,79
64	RAMBAH	Suka Maju	702,81	50,41	511,96	737,27	147,46	589,82	97,05	77,86
65	RAMBAH	Pematang Berangan	903,82	64,82	658,39	948,15	189,63	758,52	124,81	100,13
66	RAMBAH	Babussalam	430,02	30,84	313,25	451,19	90,24	360,96	59,40	47,71
67	RAMBAH	Pasir Maju	271,36	19,47	0,27	-	-	-	-	-
68	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	585,08	41,97	0,57	-	-	-	-	-
69	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	963,40	69,10	0,93	-	-	-	-	-

70	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	671,22	48,14	0,65	-	-	-	-	-
71	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	735,12	52,73	0,71	-	-	-	-	-
72	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	428,58	30,74	0,42	-	-	-	-	-
73	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	333,82	23,95	0,33	-	-	-	-	-
74	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	437,20	31,36	0,42	-	-	-	-	-
75	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	452,99	32,49	0,44	-	-	-	-	-
76	RAMBAH HILIR	Rambah	1.676,26	120,22	1.221,07	1.723,82	344,77	1.379,06	224,55	157,99
77	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	427,86	30,69	0,42	-	-	-	-	-
78	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	245,52	17,61	0,24	-	-	-	-	-
79	RAMBAH HILIR	Muara Musu	553,49	39,70	403,19	569,29	113,86	455,44	74,16	52,25
80	RAMBAH HILIR	Sejati	384,07	27,55	0,37	-	-	-	-	-
81	BANGUN PURBA	Bangun Purba	435,76	31,26	0,42	-	-	-	-	-
82	BANGUN PURBA	Pasir Agung	550,62	39,49	0,53	-	-	-	-	-
83	BANGUN PURBA	Pasir Intan	423,56	30,38	0,41	-	-	-	-	-
84	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	448,68	32,18	0,44	-	-	-	-	-
85	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	824,13	59,11	0,80	-	-	-	-	-
86	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	388,38	27,86	0,38	-	-	-	-	-
87	BANGUN PURBA	Tangun	412,07	29,56	0,40	-	-	-	-	-
88	TAMBUSAI	Tambusai Barat	784,65	56,28	0,76	-	-	-	-	-
89	TAMBUSAI	Sungai Kumango	959,81	68,84	0,93	-	-	-	-	-
90	TAMBUSAI	Batas	477,40	34,24	0,46	-	-	-	-	-
91	TAMBUSAI	Tali Kumain	368,28	26,42	0,36	-	-	-	-	-
92	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	1.463,05	104,93	1.065,76	1.490,33	298,07	1.192,27	193,14	126,51
93	TAMBUSAI	Rantau Panjang	421,40	30,23	0,41	-	-	-	-	-
94	TAMBUSAI	Sialang Rindang	564,26	40,47	0,55	-	-	-	-	-
95	TAMBUSAI	Tambusai Timur	564,98	40,52	0,55	-	-	-	-	-

96	TAMBUSAI	Sukamaju	816,95	58,60	595,11	832,21	166,45	665,77	107,85	70,66
97	TAMBUSAI	Batang Kumu	1.919,62	137,68	1,85	-	-	-	-	-
98	TAMBUSAI	Tingkok	397,71	28,53	0,39	-	-	-	-	-
99	TAMBUSAI	Lubuk Soting	1.221,12	87,58	1,18	-	-	-	-	-
100	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	702,09	50,36	0,68	-	-	-	-	-
101	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	717,89	51,49	0,69	-	-	-	-	-
102	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	885,15	63,49	0,85	-	-	-	-	-
103	TAMBUSAI UTARA	Payung Sekaki	615,23	44,13	0,60	-	-	-	-	-
104	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	441,50	31,67	0,43	-	-	-	-	-
105	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	478,11	34,29	0,46	-	-	-	-	-
106	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	389,81	27,96	0,38	-	-	-	-	-
107	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	1.404,90	100,76	1.023,40	1.461,43	292,29	1.169,15	191,53	145,75
108	TAMBUSAI UTARA	Tambusai Utara	1.947,62	139,68	1,87	-	-	-	-	-
109	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	933,25	66,94	0,90	-	-	-	-	-
110	TAMBUSAI UTARA	Mahato	5.312,33	381,00	5,10	-	-	-	-	-
111	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	1.071,08	76,82	1,03	-	-	-	-	-
112	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	503,96	36,15	0,49	-	-	-	-	-
113	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	475,96	34,14	0,46	-	-	-	-	-
114	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	475,24	34,09	0,46	-	-	-	-	-
115	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	585,80	42,02	0,57	-	-	-	-	-
116	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	255,57	18,33	0,25	-	-	-	-	-
117	KEPENUHAN	Ulak Patian	265,62	19,05	0,26	-	-	-	-	-
118	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	145,74	10,46	0,14	-	-	-	-	-
119	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	663,33	47,58	0,64	-	-	-	-	-
120	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	295,77	21,22	0,29	-	-	-	-	-
121	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	567,13	40,68	0,55	-	-	-	-	-

122	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	1.475,97	105,86	1,42	-	-	-	-	-
123	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	863,62	61,94	0,83	-	-	-	-	-
124	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	620,97	44,54	452,35	660,46	132,10	528,37	87,56	76,02
125	KEPENUHAN HULU	Kepayang	501,09	35,94	0,49	-	-	-	-	-
126	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	1.347,47	96,64	1,30	-	-	-	-	-
127	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	2.958,40	212,18	2.155,05	3.065,00	613,00	2.452,00	400,82	296,95
128	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	391,97	28,12	0,38	-	-	-	-	-
129	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	297,21	21,32	0,29	-	-	-	-	-
130	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	852,13	61,12	620,74	882,82	176,57	706,26	115,45	85,52
131	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	994,27	71,31	0,96	-	-	-	-	-
132	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kuti	399,87	28,68	0,39	-	-	-	-	-
133	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	305,82	21,94	0,30	-	-	-	-	-
134	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	1.135,69	81,45	1,09	-	-	-	-	-
135	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	396,28	28,42	0,39	-	-	-	-	-
136	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	867,92	62,25	0,84	-	-	-	-	-
137	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	458,01	32,85	0,44	-	-	-	-	-
138	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	266,34	19,11	0,26	-	-	-	-	-
139	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	681,28	48,86	0,66	-	-	-	-	-
140	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	279,98	20,08	0,27	-	-	-	-	-
141	BONAI DARUSSALAM	Sontang	1.019,40	73,11	0,98	-	-	-	-	-
142	BONAI DARUSSALAM	Bonai	895,20	64,21	652,11	985,12	197,03	788,10	132,82	135,99
143	BONAI DARUSSALAM	Pauh	1.103,39	79,14	1,06	-	-	-	-	-
144	BONAI DARUSSALAM	Kasang Padang	654,71	46,96	0,63	-	-	-	-	-
145	BONAI DARUSSALAM	Kasang Mungkal	638,20	45,78	0,62	-	-	-	-	-

Sumber: Instrumen SSK 2024

3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Skenario pencapaian sasaran hingga akhir tahun perencanaan diambil berdasarkan pada tabel tahapan pengembangan mulai N atau tahun penyusunan atau capaian eksisting, jangka pendek atau N+2 dan jangka menengah N+5. Berikut tabel skenario pencapaian sasaran untuk sektor Air Limbah Domestik dan Persampahan:

Tabel 3.7 Skenario Capaian Sasaran Sanitasi

Komponen	Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	1,39%	2%	3,2%	5%	8%	10%
Akses Layak	91,05%	91,6%	92,2%	93%	94%	95%
Akses Layak Perdesaan	6,89%	5%	4%	3%	1,5%	0%
Akses Belum Layak	3,5%	2,9%	2%	1,5%	0,9%	0%
BABS Tertutup	-					
BABS Terbuka	5,45%	4,45%	3,90%	3%	1,8%	0%
Persampahan						
Penanganan Perkotaan	66,9%	68%	70%	73%	76%	80%
Pengurangan Perkotaan	6,8%	7,5%	8,5%	10%	13%	15%

Sumber: Analisa Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

3.3. KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Analisis perkiraan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten. Dari analisis belanja APBD Kabupaten akan terlihat tren pertumbuhan belanja sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Tren ini yang akan digunakan untuk memperkirakan besaran belanja sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu hingga akhir periode perencanaan SSK. Untuk menetapkan besaran belanja sanitasi yang lebih terstruktur, maka selain hal-hal di atas perlu juga dilakukan identifikasi biaya operasional dan pemeliharaan untuk aset sanitasi yang telah terbangun. Secara spesifik, informasi ini dapat dilihat melalui tabel-tabel pendanaan berikut:

Tabel 3.8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata2 pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2)	2.611.000.000,00	5.400.081.000,00	6.354.989.227,00	3.476.634.400,00	3.412.520.000,00	19,34
1,1	Air Limbah Domestik	1.244.000.000,00	1.900.000.000,00	1.650.000.000,00	1.675.000.000,00	2.010.000.000,00	2,79
1,2	Sampah rumah tangga	1.367.000.000,00	3.500.081.000,00	4.704.989.227,00	1.801.634.400,00	1.402.520.000,00	26,65
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	-	3.710.000.000,00	750.000.000,00	3.339.000.000,00	3.377.500.000,00	88,86
2,1	DAK Sanitasi	-	3.710.000.000,00	750.000.000,00	3.339.000.000,00	3.377.500.000,00	88,86
2,2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
2,3	DAK Perumahan Dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		2.611.000.000,00	1.690.081.000,00	5.604.989.227,00	137.634.400,00	35.020.000,00	6,07
Total Belanja Langsung		861.489.846.000,00	1.254.904.393.000,00	1.136.694.964.000,00	2.053.709.190.000,00	2.022.883.245.000,00	28,85
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		0,30	0,13	0,49	0,01	0,0017	0,19
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							2

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.9 Perkiraan Besar Pendanaan Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu kedepan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Belanja Langsung	2.045.145.319.439	2.052.561.016.368	2.060.003.602.613	2.067.473.175.676	2.074.969.833.411	10.300.152.947.507
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	40.902.906.389	41.051.220.327	41.200.072.052	41.349.463.514	41.499.396.668	206.003.058.950
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	5.726.406.894	5.747.170.846	5.768.010.087	5.788.924.892	5.809.915.534	28.840.428.253

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.10 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu untuk operasional/ Pemeliharaan dan investasi sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata2 pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	261.100.000	545.008.100	635.498.923	347.663.440	341.252.000	19,55
1,1	Air Limbah Domestik						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan	124.400.000	195.000.000	165.000.000	167.500.000	201.000.000	1,53
1,2	Sampah rumah tangga						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan	136.700.000	350.008.100	470.498.923	180.163.440	140.252.000	26,65

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.11 Perkiraan Besar pendanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu untuk kebutuhan operasional/ pemeliharaan aset sanitasi Terbangun hingga tahun 2029

No	U r a i a n	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	355.038.581	362.139.352	369.382.139	376.769.782	384.305.178	1.847.635.033
1,1	Air Limbah Domestik						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan	209.120.400	213.302.808	217.568.864	221.920.241	226.358.646	1.088.270.960
	(Justified)						
1,2	Sampah rumah tangga						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan	145.918.181	148.836.544	151.813.275	154.849.541	157.946.532	759.364.073
	(Justified)						

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.12 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	U r a i a n	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	355.038.581	362.139.352	369.382.139	376.769.782	384.305.178	1.847.635.033
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	40.902.906.389	41.051.220.327	41.200.072.052	41.349.463.514	41.499.396.668	206.003.058.950

3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	5.726.406.894	5.747.170.846	5.768.010.087	5.788.924.892	5.809.915.534	28.840.428.253
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD murni) (2-1)	40.547.867.808	40.689.080.975	40.830.689.913	40.972.693.731	41.115.091.490	204.155.423.917
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	5.371.368.314	5.385.031.493	5.398.627.948	5.412.155.110	5.425.610.356	26.992.793.220

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

BAB 4. STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN

Pada strategi percepatan pembangunan sanitasi ini akan menjelaskan pernyataan tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai dalam pengembangan sanitasi Kota Pekanbaru periode 5 tahun kedepan. Tujuan dirumuskan berdasarkan hasil dari penetapan Tahapan pengembangan sanitasi, selanjutnya setelah tujuan ditetapkan, maka perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran disusun berdasarkan kaidah SMART atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan berjangka waktu jelas. Untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap sub sektor sanitasi sebagaimana yang telah direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi pelaksanaan.

4.1. AIR LIMBAH DOMESTIK

Strategi Pengembangan air limbah domestik selama lima tahun mendatang di Kabupaten Rokan Hulu dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Strategi 1 :

Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik yang layak dan aman berkelanjutan;

Strategi ini merupakan upaya untuk Menurunkan Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029.

Strategi 2 :

Advokasi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berbagai pihak;

Strategi ini merupakan upaya untuk Menurunkan Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029.

Strategi 3 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara kesehatan dan tidak melakukan BABs;

Strategi ini merupakan upaya untuk Menurunkan Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029.

Strategi 4 :

Mengoptimalkan sarana prasarana pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;

Strategi ini merupakan upaya untuk mengopersionalkannya sarana pengangkutan resmi/truk tinja yang sudah ada dan juga untuk

memfungsikan IPLT yang sudah dibangun tahun 2020.

Strategi 5 :

Adanya Sosialisasi Perda ALD;

Strategi ini merupakan upaya agar semua stakeholder mengetahui peran masing-masing sebagai payung hukum untuk Pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi, ini merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sanitasi aman. Pengelolaan air limbah domestik merupakan pekerjaan panjang dari hulu hingga hilir.

Strategi 6 :

Menyiapkan lembaga dalam pengelolaan air limbah domestik yang memiliki kapasitas kelembagaan dan SDM yang berdaya;

Strategi ini merupakan upaya untuk Adanya/terbentuknya dan Pengesahan UPTD sebagai lembaga Air Limbah Domestik yang memisahkan regulator dan Operator untuk mendukung L2T2, Tersedianya kapasitas SDM operator yang berdaya, dan memahami operasional IPAL/IPLT serta manajerial serta Tersusunnya rencana kerja UPTD baru.

Strategi 7:

Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan;

Adanya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam kegiatan Promosi/ Kampanye/ Edukasi Higiene dan sanitasi aman berkelanjutan serta adanya dukungan aturan lokal (Perdes) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas lingkungan

Strategi 8:

Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola dalam Air Limbah Domestik;

Strategi ini merupakan upaya untuk adanya KPP Pengelola Tangki Septik Komunal dengan SK Kepala Desa dan adanya pemahaman masyarakat pengguna layanan Tangki Septik Komunal untuk memelihara infrastruktur terbangun.

Strategi 8:

Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan air limbah domestik;

Strategi ini merupakan sebagai upaya untuk adanya dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah (Non APBD) dan swasta. Kemampuan anggaran APBD Kabupaten Rokan Hulu terbatas sehingga untuk mempercepat target sanitasi perlu bantuan anggaran dari berbagai sumber pendanaan di luar APBD. Oleh karena itu pemerintah melalui Pokja PKP perlu bekerjasama dengan sumber pendanaan lain seperti Baznas, CSR dan lain-lain.

4.2. PERSAMPAHAN

Strategi 1 :

Meningkatkan Pembangunan & Optimalisasi sarana prasarana pengurangan sampah;

Strategi ini merupakan sebagai upaya untuk Meningkatkan capaian pengurangan sampah wilayah perkotaan dari 6,8% menjadi 15% pada tahun 2029.

Strategi 2 :

Meningkatkan sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampai pemrosesan akhir;

Strategi ini merupakan sebagai upaya karena adanya Sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sudah berumur tua, TPS3R ada tidak berfungsi (4 Unit), Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih rendah ,Sampah belum terolah secara optimal seperti sampah organik menjadi kompos, Penanganan sampah wilayah perkotaan sebesar 66,9%, serta Alat Berat masih kurang.

Strategi 3 :

Meningkatkan sosialisai Perda ke semua lapisan masyarakat & Pengembangan Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan;

Strategi ini merupakan sebagai upaya disebabkan Perda tidak berjalan maksimal. Turunan perda yang bersifat operasional belum ada, serta Kurangnya sosialisasi.

Strategi 4 :

Meningkatkan Jumlah dan kapasitas SDM Pengelola dalam Persampahan;

Strategi ini merupakan sebagai upaya adanya SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas

Strategi 5 :

Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan;

Strategi ini merupakan sebagai upaya disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah & prilaku membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya terhadap akses informasi, dan mengolah sampah secara benar dan tidak membuang sampah disembarang tempat, Kurangnya sosialisasi, edukasi dan penyadaran, Belum dikembangkannya potensi masyarakat secara sistematis, serta belum adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.

Strategi 5 :

Peningkatan Pola Kerjasama pemerintah swasta;

Strategi ini merupakan sebagai upaya untuk adanya dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah (Non APBD) dan swasta. Kemampuan anggaran APBD Kabupaten Rokan Hulu terbatas sehingga untuk mempercepat target sanitasi perlu bantuan anggaran dari berbagai sumber pendanaan di luar APBD. Oleh karena itu pemerintah melalui Pokja PKP perlu bekerjasama dengan sumber pendanaan lain seperti Baznas, CSR dan lain-lain.

BAB 5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI

Program, kegiatan dan indikasi pendanaan berisikan rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dari kegiatan sub sektor air limbah domestik dan persampahan.

5.1. REKAPITULASI KEBUTUHAN

Rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	30.653	31.793	9.477	29.437	28.133	157.765
2	Persampahan	1.315	3.430	1.205	1.575	935	8.460
Jumlah (a)		31.968	35.223	30.682	31.012	29.068	166.225

Sumber : Matrik Program Kegiatan SSK 2024

Tabel diatas menunjukkan total kebutuhan pendanaan sanitasi dari dua sektor yaitu Air Limbah Domestik dan Persampahan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 166.225.000.000; hingga akhir tahun perencanaan di tahun 2029 melalui berbagai sumber pendanaan.

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun (x Rp. 1 Juta)

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	31.968.182.823	35.222.952.823	30.681.737.823	31.012.249.403	29.068.131.203	157.953.254.075
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	.371.368.314	.385.031.493	5.398.627.948	5.412.155.110	5.425.610.356	26.992.793.220
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	26.596.814.510	29.837.921.330	25.283.109.876	25.600.094.293	23.642.520.847	130.960.460.855
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	83,2%	84,7%	82,4%	82,5%	81,3%	83%

Sumber : Matrik Program Kegiatan (Analisa Pokja PKP Kabupaten Rokan Hulu 2024).

Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	

A	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	6.714	8.943	5.573	6.303	5.262	32.795
2	APBD Provinsi	3.202	3.052	3.052	2.761	2.927	14.993
3	APBN	5.503	6.703	5.503	6.422	5.255	29.386
4	DAK	5.503	5.803	5.803	5.222	5.255	27.586
Jumlah A		20.922	24.501	19.931	20.708	18.699	104.760
B	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta/DT	2.792	2.752	2.792	2.611	2.627	13.573
2	Masyarakat	157.306	158.929	154.544	147.378	145.423	763.580
Jumlah B		160.098	161.681	157.336	149.989	148.050	777.153
Total (A+B)		181.020	186.182	177.267	170.697	166.749	881.913

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

5.2. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN

Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan
APBD Kabupaten Rokan Hulu (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.589	7.328	4.713	5.938	4.487	28.055
2	Persampahan	1.125	1.615	860	365	775	4.740
Jumlah		6.714	8.943	5.573	6.303	5.262	32.795

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	2.752	2.752	2.752	2.611	2.627	13.493
2	Persampahan	450	300	300	150	300	1.500
Jumlah		3.202	3.052	3.052	2.761	2.927	14.993

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 5.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.503	5.503	5.503	5.222	5.255	26.986
2	Persampahan	0	1.200	0	1.200	0	2.400
Jumlah		5.503	6.703	5.503	6.422	5.255	29.386

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 5.7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.503	5.503	5.503	5.222	5.255	26.986
2	Persampahan	0	300	300	0	0	600
Jumlah		5.503	5.803	5.803	5.222	5.255	27.586

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

5.3. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH

Tabel 5.8 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	2.752	2.752	2.752	2.611	2.627	13.493
2	Persampahan	40	-	40	-	-	80
Jumlah		2.792	2.752	2.792	2.611	2.627	13.573

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 5.9 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	157.306	158.914	154.539	147.368	145.413	763.540
2	Persampahan	0	15	5	10	10	40
Jumlah		157.306	158.929	154.544	147.378	145.423	763.580

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

BAB 6. PENUTUP

Monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah dalam pengamatan program/kegiatan secara terus menerus, sehingga dapat terlihat tren atau masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program sesuai atau tidak dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain. Juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil Monitoring adalah kesimpulan-kesimpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan tiga hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana.

Hasil evaluasi adalah kesimpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan melihat ketepatan hasil melalui perbandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya. Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan alat manajemen dalam upaya menjamin mutu suatu program/kegiatan, yang terdiri dari 2(dua) aspek yang saling terkait, yaitu monitoring dan evaluasi.

Bab VI tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK berisi mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan. Pelaporannya dilakukan melalui sistem monev berbasis web : www.nawasis.org Pelaporan pemantauan ini mencakup 3 (tiga) modul yaitu :

- Modul Data Teknis yang memuat informasi capaian akses air limbah domestik dan capaian akses sampah perkotaan.
- Modul program dan pendanaan yang memuat informasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai investasinya serta output dan out come masing-masing program/kegiatan.
- Modul sarana dan prasarana yang memuat informasi tentang sistem, jenis dan jumlah infrastruktur eksisting termasuk informasi mengenai keberfungsian.

Jadwal pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi SSK Kabupaten

Indragiri Hulu mencakup tabel Input Capaian Strategis, Input menu investasi, Input menu akses, Input menu insfrastuktur, Input menu progres dan Pelatihan Nawasis serta tabel evaluasi dengan penanggung jawab utama adalah Bapedda. Pengumpul data dan informasi serta pengolah data/pemantau adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Waktu pelaksanaan dijadwalkan pada bulan Oktober- Desember tahun berjalan. Penerima pelaporan adalah Bupati/Kepala OPD. Jadwal Pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi SSK selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1 Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2025-2029

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan/Instansi)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Penanggung jawab utama	Pengumpul data dan dokumentasi	Pengolah Data/pemantauan		
1	Input Capaian Strategis													Bappedda			6 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
2	Input menu investasi													Bappedda			3 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
3	Input menu akses													Bappedda			5 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
4	Input menu insfratuktur													Bappedda			6 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
5	Input DAK													DLH-PERKIM			4 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
6	Input menu progres													Bappedda			12 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
7	Evaluasi Triwulan													Bappedda			Setiap 3 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
8	Input satu data sanitasi													Bappedda			4 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja

9	Input SPM													Bappedda			4 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
10	Koordinasi Pendanaan													Bappedda			7 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja
11	Pelatihan Nawasis													Bappedda			2 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja

Sumber: Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

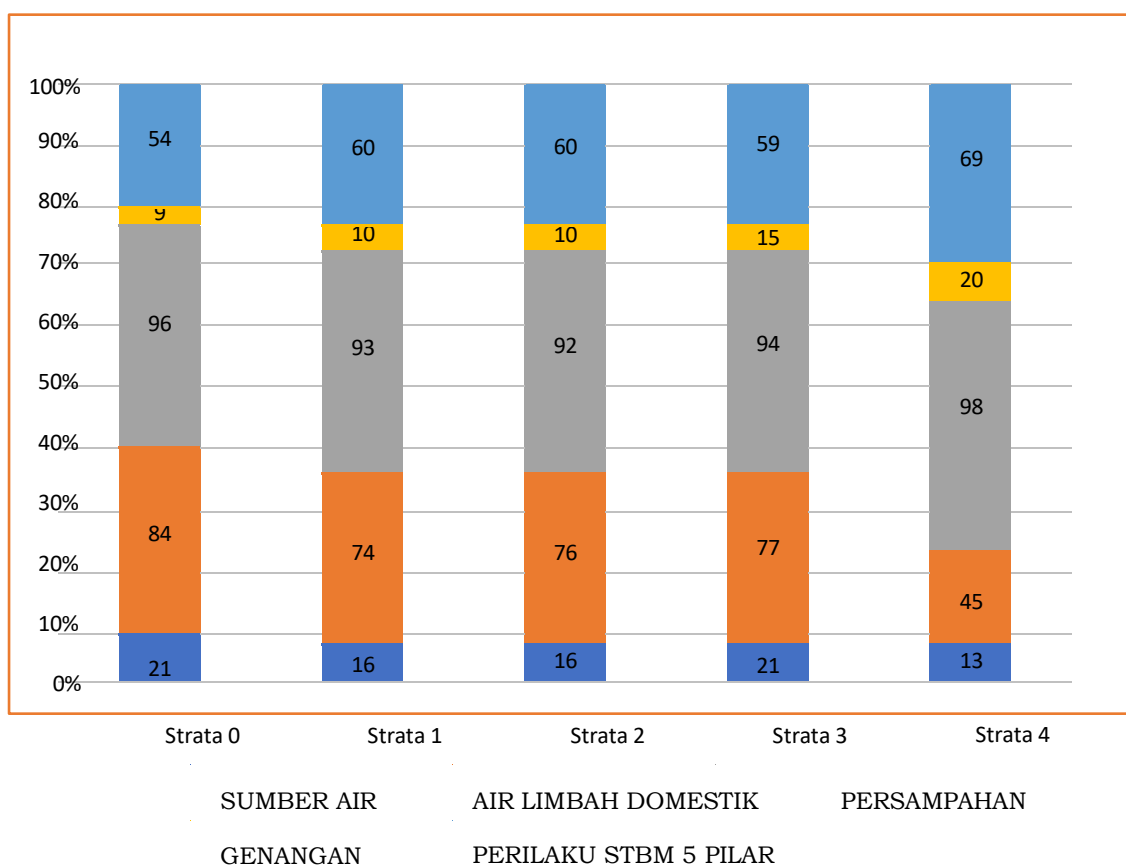
Lampiran 1.

Laporan Studi EHRA

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

1. Indeks Resiko Sanitasi (IRS)

Indeks Risiko Sanitasi (IRS) adalah nilai kuantitatif penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hygiene dan sanitasi. Manfaat penghitungan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) adalah sebagai salah satu komponen dalam menentukan area berisiko sanitasi. Untuk melakukan penilaian digunakan 5 (lima) variabel yaitu sumber air, air limbah domestik, persampahan, genangan air dan perilaku hygiene dan sanitasi. Hasil Indeks Resiko Sanitasi (IRS) hasil studi EHRA berdasarkan 5 variabel yaitu sumber air, air limbah domestik, persampahan, genangan air dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber data : Hasil Analisa data EHRA 2023

Gambar 3.16 Grafik Indeks Resiko Sanitasi Setiap Strata

Berdasarkan hasil analisa studi EHRA didapatkan indeks resiko sanitasi per variabel penilaian sebagai berikut:

1. Sumber Air dengan indek sebesar 87, variabel yang mempengaruhi rendahnya akses rumah tangga terhadap sumber air yaitu sumber air tidak terlindungi, penggunaan sumber air tidak terlindung, kelangkaan air;
2. Air limbah domestik dengan indek sebesar 356 dengan variabel yang mempengaruhi Tangki septik tidak suspek aman, Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik, Pencemaran karena SPAL;
3. Persampahan dengan indek 473, variabel yang mempengaruhi diakibatkan tidak dilakukan pengelolaan sampah, Frekwensi pengangkutan sampah tidak memadai, Waktu pengangkutan sampah tidak tepat waktu dan tidak dilakukan pengolah sampah setempat;
4. Genangan air dengan indek sebesar 64, variable yang mempengaruhi akibat adanya genangan air di sekitar rumah ;
5. Perilaku Hidup Bersih Sehat dengan indek 302, akibat dari tidak melakukan CTPS di lima waktu penting,lantai dan dinding jamban tidak bebas dari tinja, jamban tidak bebas dari kecoa dan lalat, penggelontor tidak berfungsi, tidak terlihat ada sabun di dalam atau di dekat jamban, pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air serta masih ada masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan (BABS);

**Tabel 3.8 Indeks Resiko Berdasarkan Lima Variabel
Di Kabupaten Rokan Hulu 2023**

Parameter	0	1	2	3	4
1. SUMBER AIR	21	16	16	21	13
2. AIR LIMBAH DOMESTIK	84	74	76	77	45
3. PERSAMPAHAN	96	93	92	94	98
4. GENANGAN AIR	9	10	10	15	20
5. PERILAKU STBM 5 PILAR	54	60	60	59	69
TOTAL	264	253	254	266	245

Hasil studi EHRA Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023, diperoleh nilai indek resiko kumulatif berdasarkan strata dengan nilai masing – masing strata adalah strata nol sebesar 264, strata satu 253, strata dua 254, strata tiga 266 dan strata empat sebesar 245.

Skor Nilai indeks risiko sanitasi diartikan sebagai ukuran atau tingkatan risiko sanitasi yang dikategorikan menjadi 4 (empat) area berisiko, yaitu area (1) kurang berisiko; (2) berisiko sedang ; (3) risiko tinggi dan (4) risiko sangat tinggi. dengan menggunakan data interval sehingga didapatkan perhitungan batas bawah dan batas atas per variabel seperti pada Tabel Katagori Daerah Berisiko Sanitasi sebagai berikut :

	Batas nilai risiko	Keterangan
Total Index Risiko Maximum	266	
Total Index Risiko Minimum	245	
Interval	5,25	(Max-Min)/4
Kategori Area Berisiko	Batas Bawah	Batas Atas
Kurang Berisiko	245	249
Berisiko Sedang	250	254
Risiko Tinggi	255	259
Risiko Sangat Tinggi	260	264

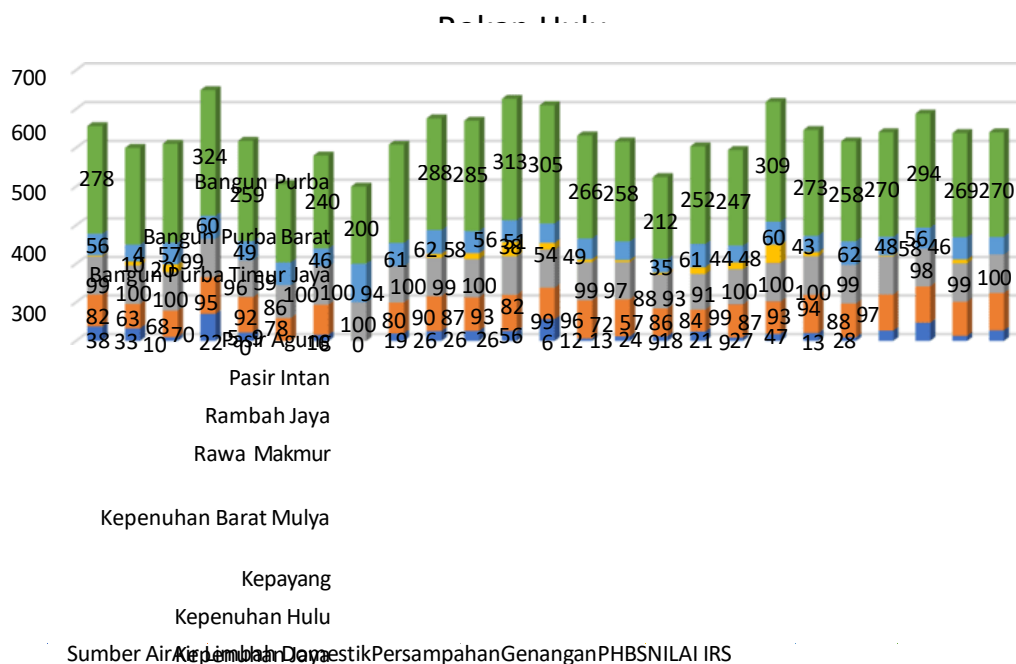
RESUME KATEGORI IRS SETIAP STRATA		
STRATA	NILAI IRS	KATEGORI
0	264	Kurang beresiko
1	253	beresiko sedang
2	254	beresiko sedang
3	266	resiko sangat tinggi
4	245	Kurang beresiko

Setelah Indeks Risiko Sanitasi diketahui, kemudian dikumulatikan sehingga diketahui total indeks maksimal adalah 264 dan terendah adalah 245 dengan interval 5,25. Sehingga diketahui kategori area berisiko sangat tinggi adalah Strata dengan nilai total IRS 260-264, Strata risiko tinggi dengan IRS 255- 259, Strata risiko sedang dengan IRS 250-254, Strata kurang berisiko dengan IRS 245-249.

Berdasarkan hasil studi EHRA di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023, diperoleh hasil bahwa strata nol dan tiga memiliki nilai indeks resiko sanitasi sebesar 264 dan 266 yang termasuk dalam kategori Resiko sangat tinggi. Sedangkan Strata satu dan dua memiliki nilai IRS sebesar 253, 254 dengan kategori resiko sedang, sedangkan pada strata empat masuk dalam kategori kurang resiko dengan nilai IRS 245.

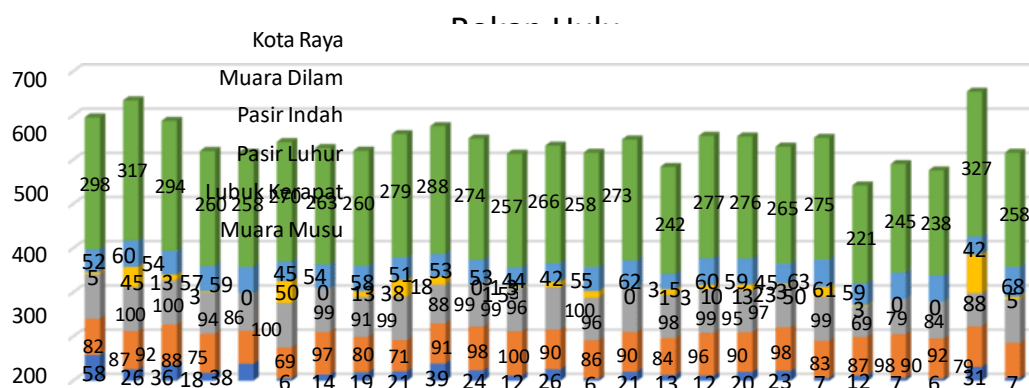
Sedangkan Nilai Indeks resiko sanitasi (IRS) menurut Desa/ Kelurahan hasil studi EHRA di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023, dapat terlihat melalui grafik IRS perdesa/Kelurahan di bawah ini:

Grafik Indek Resiko Sanitasi (IRS) Perdesa Kabupaten



Sumber data : Hasil Analisa data EHRA 2023

Grafik Indek Resiko Sanitasi (IRS) Perdesa Kabupaten



Rambah Hilir Tengah

Rambah Hilir Timur

Rambah Muda

Sejati

Serombou Indah

Sungai Dua Indah

Sungai Sitolang

Langkitin

Lubuk Bilang

Lubuk Napal

Marga Mulya

Rambah Baru

Rambah Samo Barat

Tapung Jaya

Kota Intan

Talikumain

Kota Lama

Tandun

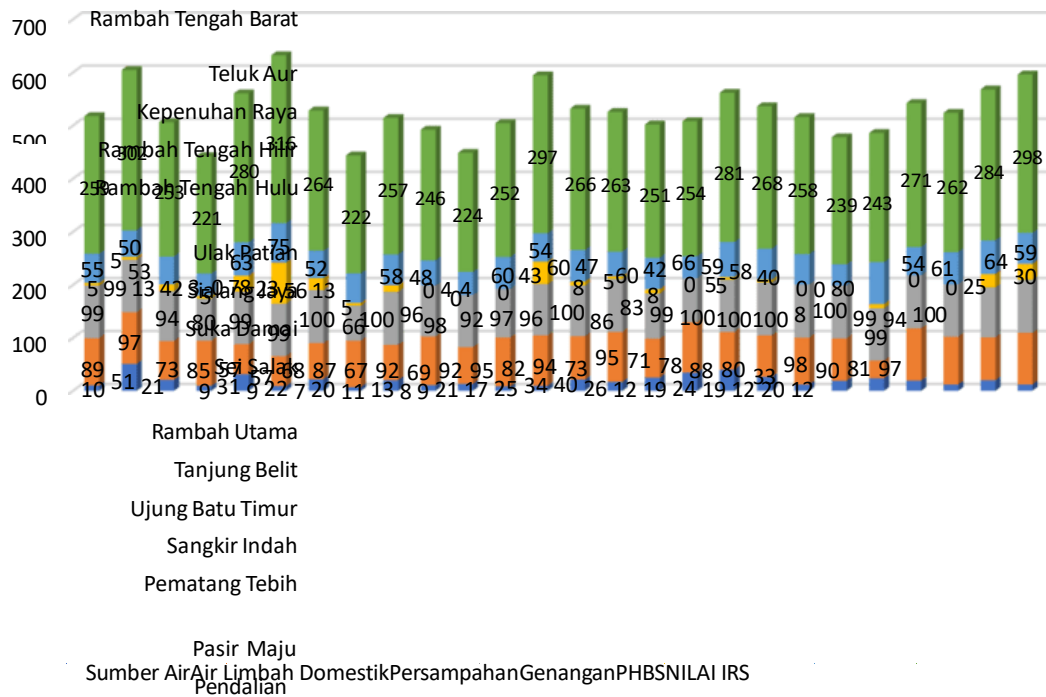
Kumain

Menaming

Rambah Tengah Utara

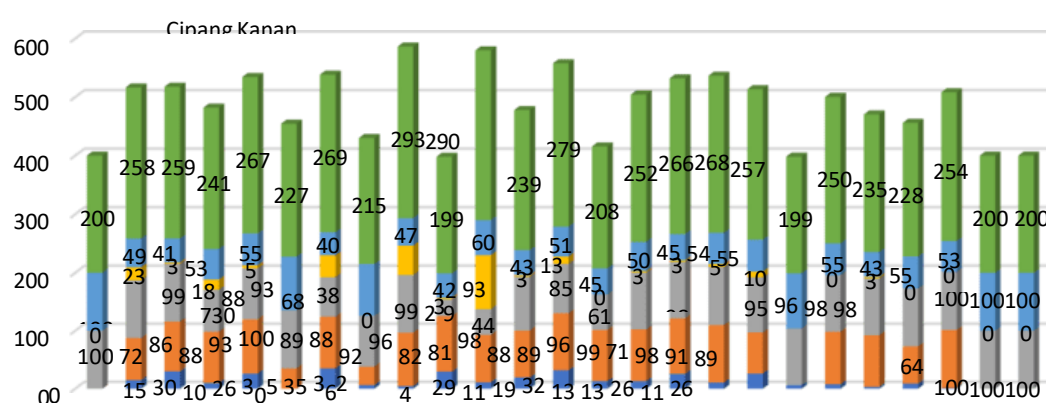
Sumber data : Hasil Analisa data EHRA 2023

Grafik Indeks Resiko Sanitasi (IRS) Perdesa Kabupaten Rokan Hulu



Sumber data : Hasil Aplikasi Data EHRA 2023

Grafik Indeks Resiko Sanitasi (IRS) Perdesa Kabupaten Rokan Hulu



Tangun
Batang Kumu
Pematang Berangan
Payung Sekaki
Kepenuhan Barat
Pasir Pengarayan
Cipang Kiri Hulu
Pagar Mayang

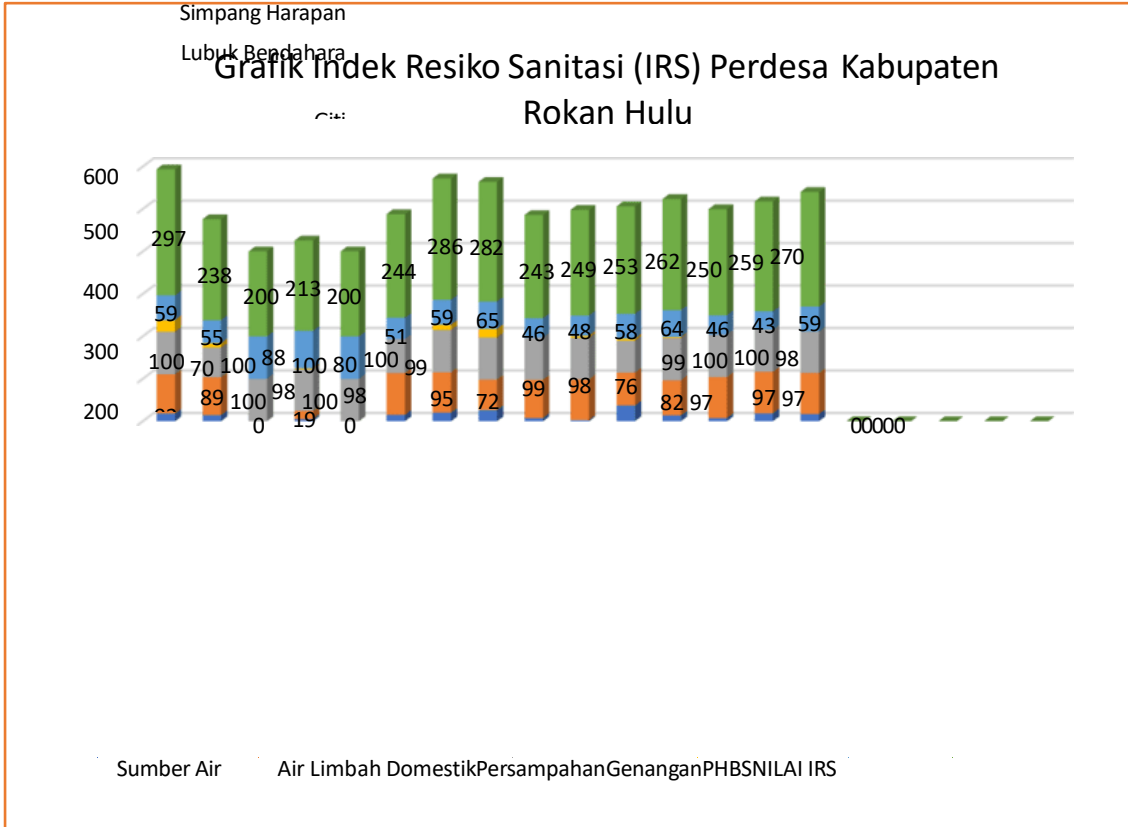
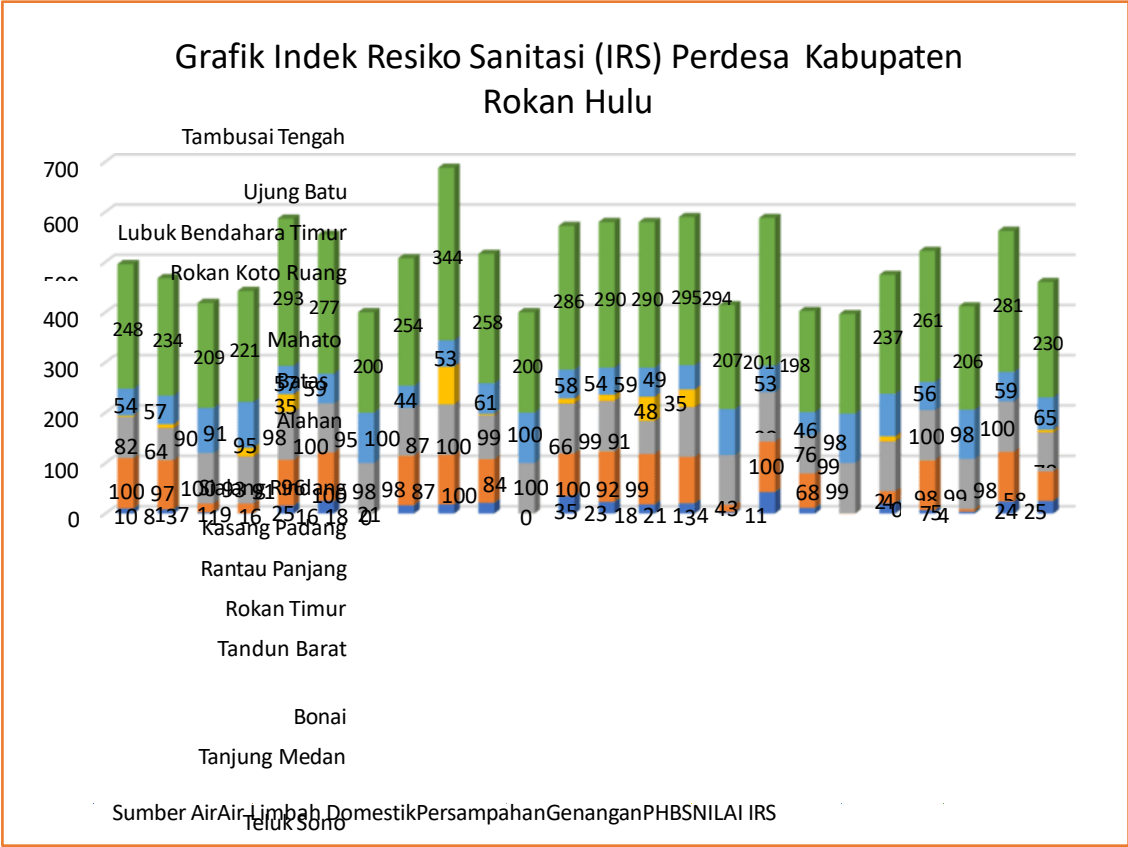
Sei Kuning
Babussalam
Suka Maju
Tambusai Utara
Pasir Makmur
Tambusai Timur

Puo Raya

Pauh
Sungai Kumango

Rokan
Rantau Sakti

Sumber data : Hasil Analisa data EHRA 2023



Sumber data : Hasil Analisa data EHRA 2023

Gambar 3.17 Grafik Indeks Resiko Sanitasi Setiap Desa

Pada gambar 3.17 dapat dilihat terkait permasalahan sanitasi yang terdapat dimasing-masing desa yang menjadi studi EHRA Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023. Dari hasil studi ini diharapkan akan segera dilakukan tindakan dalam upaya perbaikan sanitasi di wilayah desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Sekaligus menjadi penentu prioritas implementasi apa yang sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

Daftar resiko sanitasi 145 desa terpilih berdasarkan kebijakan dalam implementasi studi EHRA tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa ada desa dengan kategori Resiko sangat tinggi, resiko Tinggi , resiko Sedang dan Kurang beresiko.

Tabel 3.9 Daftar Indeks Resiko Sanitasi 145 Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	DESA/PARAMETER	Sumber Air	Air Limbah Domestik	Persampahan	Genangan	PHBS	NILAI IRS	KATEGORI
1	Bangun Purba	38	82	99	3	56	278	Resiko Tinggi
2	Bangun Purba Barat	33	63	100	10	44	250	Beresiko Sedang
3	Bangun Purba Timur Jaya	10	68	100	20	57	255	Beresiko Sedang
4	Pasir Agung	70	95	99	0	60	324	Resiko Sangat Tinggi
5	Pasir Intan	22	92	96	0	49	259	Beresiko Sedang
6	Rambah Jaya	0	59	86	0	59	203	Kurang Beresiko
7	Rawa Makmur	16	78	100	0	46	240	Beresiko Sedang
8	Kepenuhan Barat Mulya	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko
9	Kepayang	19	80	94	0	61	254	Beresiko Sedang
10	Kepenuhan Hulu	26	90	100	10	62	288	Resiko Tinggi

11	Kepenuhan Jaya	26	87	99	15	58	285	Resiko Tinggi
12	Muara Jaya	26	93	100	38	56	313	Resiko Sangat Tinggi
13	Pekan Tebih	56	82	99	18	51	305	Resiko Tinggi
14	Bagan Tujuh	6	99	99	8	54	266	Beresiko Sedang
15	Kota Baru	12	96	97	5	49	258	Beresiko Sedang
16	Kota Raya	13	72	88	5	35	212	Kurang Beresiko
17	Muara Dilam	24	57	93	18	61	252	Beresiko Sedang
18	Pasir Indah	9	86	91	18	44	247	Beresiko Sedang
19	Pasir Luhur	18	84	100	48	60	309	Resiko Tinggi
20	Lubuk Kerapat	21	99	100	10	43	273	Beresiko Sedang
21	Muara Musu	9	87	100	0	62	258	Beresiko Sedang
22	Pasir Jaya	27	93	99	3	48	270	Beresiko Sedang
23	Pasir Utama	47	94	98	0	56	294	Resiko Tinggi
24	Rambah	13	88	99	10	58	269	Beresiko Sedang
25	Rambah Hilir	28	97	100	0	46	270	Beresiko Sedang
26	Rambah Hilir Tengah	58	82	100	5	52	298	Resiko Tinggi
27	Rambah Hilir Timur	26	87	100	45	60	317	Resiko Sangat Tinggi
28	Rambah Muda	36	92	100	13	54	294	Resiko Tinggi
29	Sejati	18	88	94	3	57	260	Beresiko Sedang
30	Serombou Indah	38	75	86	0	59	258	Beresiko Sedang

No	DESA/PARAMETER	Sumber Air	Air Limbah Domestik	Persampahan	Genangan	PHBS	NILAI IRS	KATEGORI
31	Sungai Dua Indah	6	69	100	50	45	270	Beresiko Sedang
32	Sungai Sitolang	14	97	99	0	54	263	Beresiko Sedang
33	Langkitin	19	80	91	13	58	260	Beresiko Sedang
34	Lubuk Bilang	21	71	99	38	51	279	Resiko Tinggi
35	Lubuk Napal	39	91	88	18	53	288	Resiko Tinggi
36	Marga Mulya	24	98	99	0	53	274	Resiko Tinggi
37	Rambah Baru	12	100	99	3	44	257	Beresiko Sedang
38	Rambah Samo Barat	26	90	96	13	42	266	Beresiko Sedang
39	Tapung Jaya	6	86	96	15	55	258	Beresiko Sedang
40	Kota Intan	21	90	100	0	62	273	Beresiko Sedang
41	Talikumain	13	84	98	13	35	242	Beresiko Sedang
42	Kota Lama	12	96	99	10	60	277	Resiko Tinggi
43	Tandun	20	90	95	13	59	276	Resiko Tinggi
44	Kumain	23	98	97	3	45	265	Beresiko Sedang
45	Menaming	7	83	99	23	63	275	Resiko Tinggi
46	Rambah Tengah Utara	12	87	69	3	50	221	Kurang Beresiko
47	Kembang Damai	7	98	79	0	61	245	Beresiko Sedang
48	Pagaran Tapah	6	90	84	0	59	238	Beresiko Sedang
49	Sei Kuning	31	92	75	88	42	327	Resiko Sangat Tinggi
50	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	7	79	99	5	68	258	Beresiko Sedang
51	Rambah Tengah Barat	10	89	99	5	55	259	Beresiko Sedang
52	Teluk Aur	51	97	99	5	50	302	Resiko Tinggi
53	Kepenuhan Raya	21	73	94	13	53	253	Beresiko Sedang
54	Rambah Tengah Hilir	9	85	80	5	42	221	Kurang Beresiko
55	Rambah Tengah Hulu	31	57	99	30	63	280	Resiko Tinggi
56	Ulak Patian	9	57	99	78	75	316	Resiko Sangat Tinggi
57	Sialang Jaya	22	68	100	23	52	264	Beresiko Sedang
58	Suka Damai	7	87	66	5	56	222	Kurang Beresiko
59	Sei Salak	20	67	100	13	58	257	Beresiko Sedang
60	Rambah Utama	11	92	96	0	48	246	Beresiko Sedang
61	Tanjung Belit	13	69	98	0	44	224	Kurang Beresiko
62	Ujung Batu Timur	8	92	92	0	60	252	Beresiko Sedang
63	Sangkir Indah	9	95	97	43	54	297	Resiko Tinggi
64	Pematang Tebih	21	82	96	8	60	266	Beresiko Sedang
65	Pasir Maju	17	94	100	5	47	263	Beresiko Sedang

66	Pendalian	25	73	86	8	60	251	Beresiko Sedang
67	Suka Maju	34	95	83	0	42	254	Beresiko Sedang
68	Tambusai Barat	40	71	99	5	66	281	Resiko Tinggi
69	Koto Tandun	26	78	100	5	59	268	Beresiko Sedang
70	Mekar Jaya	12	88	100	0	58	258	Beresiko Sedang
71	Pasir Baru	19	80	100	0	40	239	Beresiko Sedang
72	Cipang Kanan	24	33	99	8	80	243	Beresiko Sedang

No	DESA/PARAMETER	Sumber Air	Air Limbah Domestik	Persampahan	Genangan	PHBS	NILAI IRS	KATEGORI
73	Kasang Mungkal	19	98	100	0	54	271	Beresiko Sedang
74	Ngaso	12	90	99	0	61	262	Beresiko Sedang
75	Rambah Samo	20	81	94	25	64	284	Resiko Tinggi
76	Sontang	12	97	100	30	59	298	Resiko Tinggi
77	Kepenuhan tengah	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko
78	Tangun	15	72	99	23	49	258	Beresiko Sedang
79	Batang Kumu	30	86	99	3	41	259	Beresiko Sedang
80	Pematang Berangan	10	88	73	18	53	241	Beresiko Sedang
81	Payung Sekaki	26	93	88	5	55	267	Beresiko Sedang
82	Kepenuhan Barat	0	35	100	0	93	227	Kurang Beresiko
83	Pasir Pengarayan	35	89	68	38	40	269	Beresiko Sedang
84	Cipang Kiri Hulu	6	32	88	0	89	215	Kurang Beresiko
85	Pagar Mayang	4	92	99	50	47	293	Resiko Tinggi
86	Sei Kuning	29	96	29	3	42	199	Kurang Beresiko
87	Babussalam	11	82	44	93	60	290	Resiko Tinggi
88	Suka Maju	19	81	93	3	43	239	Beresiko Sedang
89	Tambusai Utara	32	98	85	13	51	279	Resiko Tinggi
90	Pasir Makmur	13	88	61	0	45	208	Kurang Beresiko
91	Tambusai Timur	13	89	98	3	50	252	Beresiko Sedang
92	Puo Raya	26	96	98	3	45	266	Beresiko Sedang
93	Pauh	11	99	100	5	54	268	Beresiko Sedang
94	Sungai Kumango	26	71	95	10	55	257	Beresiko Sedang
95	Rokan	6	0	98	0	96	199	Kurang Beresiko
96	Rantau Sakti	8	91	98	0	55	250	Beresiko Sedang
97	Dayo	3	89	98	3	43	235	Kurang Beresiko
98	Tibawan	9	64	100	0	55	228	Kurang Beresiko
99	Air Panas	1	100	100	0	53	254	Beresiko Sedang
100	Pemandang	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko

101	Tanjung Medan	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko
102	Tambusai Tengah	10	100	82	3	54	248	Beresiko Sedang
103	Ujung Batu	8	97	64	8	57	234	Kurang Beresiko
104	Lubuk Bendahara Timur	3	17	100	0	90	209	Kurang Beresiko
105	Rokan Koto Ruang	1	19	93	18	91	221	Kurang Beresiko
106	Mahato	16	91	95	35	57	293	Resiko Tinggi
107	Batas	25	96	98	0	59	277	Resiko Tinggi
108	Alahan	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko
109	Sialang Rindang	16	98	95	0	44	254	Beresiko Sedang
110	Kasang Padang	18	98	100	75	53	344	Resiko Sangat Tinggi
111	Rantau Panjang	21	87	87	3	61	258	Beresiko Sedang
112	Rokan Timur	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko
113	Tandun Barat	35	84	99	10	58	286	Resiko Tinggi
114	Bonai	23	100	100	13	54	290	Resiko Tinggi

No	DESA/PARAMETER	Sumber Air	Air Limbah Domestik	Persampahan	Genangan	PHBS	NILAI IRS	KATEGORI
115	Tanjung Medan	18	100	66	48	59	290	Resiko Tinggi
116	Teluk Sono	21	92	99	35	49	295	Resiko Tinggi
117	Cipang Kiri Hilir	3	14	99	0	91	207	Kurang Beresiko
118	Masda Makmur	43	100	98	0	53	294	Resiko Tinggi
119	Simpang Harapan	11	68	76	0	46	201	Kurang Beresiko
120	Lubuk Bendahara	0	1	99	0	98	198	Kurang Beresiko
121	Giti	20	24	99	10	85	237	Beresiko Sedang
122	Bono Tapung	7	98	100	0	56	261	Beresiko Sedang
123	Koto Ranah	4	5	99	0	98	206	Kurang Beresiko
124	Sei Kandis	24	98	100	0	59	281	Resiko Tinggi
125	Lubuk Soting	25	58	78	5	65	230	Kurang Beresiko
126	Kepenuhan Hilir	18	92	100	28	59	297	Resiko Tinggi
127	Koto Tinggi	14	89	70	10	55	238	Beresiko Sedang
128	Sikebau Jaya	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko
129	Lubuk Betung	5	19	98	3	88	213	Kurang Beresiko
130	Kepenuhan Baru	0	0	100	0	100	200	Kurang Beresiko
131	Sungai Kuti	15	98	80	0	51	244	Beresiko Sedang
132	Suligi	20	95	100	13	59	286	Resiko Tinggi
133	Kepenuhan Timur	26	72	99	20	65	282	Resiko Tinggi
134	Bangun Jaya	8	90	99	0	46	243	Beresiko Sedang

135	Bukit Intan Makmur	3	96	98	5	48	249	Beresiko Sedang
136	Tingkok	37	77	76	5	58	253	Beresiko Sedang
137	Mahato Sakti	14	82	99	3	64	262	Beresiko Sedang
138	Bengkolan Salak	8	97	100	0	46	250	Beresiko Sedang
139	Suka Damai	19	97	100	0	43	259	Beresiko Sedang
140	Karya Mulya	17	97	98	0	59	270	Beresiko Sedang
141	Rantau Binuang Sakti	0	0	0	0	0	0	Kurang Beresiko
142	Boncah Kesuma	0	0	0	0	0	0	Kurang Beresiko
143	Batu Langkah Besar	0	0	0	0	0	0	Kurang Beresiko
144	Kabun	0	0	0	0	0	0	Kurang Beresiko
145	Aliantan	0	0	0	0	0	0	Kurang Beresiko

Sumber data : Hasil Analisa data EHRA 2023

	Batas nilai risiko	Keterangan
Total Index Risiko Maximum	344	
Total Index Risiko Minimum	198	
Interval	56,5	(Max-Min)/4
Kategori Area Berisiko	Batas Bawah	Batas Atas
Kurang Beresiko	198	235
Beresiko Sedang	236	273
Resiko Tinggi	274	310
Resiko Sangat Tinggi	311	347

Kajian studi tentang *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) merupakan kegiatan survei partisipatif di tingkat kabupaten/kota untuk mengetahui status fasilitas sanitasi dan higiene serta perilaku masyarakat dalam rumah tangga. Tujuannya hasil kajian Studi EHRA adalah memberikan data ilmiah dan faktual tentang ketersediaan layanan sanitasi di tingkat rumah tangga di tingkat kabupaten /kota. Fokus kajian studi EHRA meliputi pengelolaan sampah rumah tangga, limbah cair domestik rumah tangga, limbah padat/sampah, drainase lingkungan, banjir serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) dalam hubungannya terkait resiko kesehatan lingkungan berupa kejadian penyakit diare.

Berdasarkan pelaksanaan studi EHRA dapat diperoleh strategi-strategi yang tepat dalam rangka promosi sanitasi dan perilaku higiene pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Studi EHRA dilakukan dengan melibatkan bidan dan petugas kesehatan, hal ini sangat membantu bagi keberlangsungan dari studi EHRA dikarenakan tingkat pemahaman terkait kondisi sanitasi di wilayah kerjanya. Kegiatan ini juga memberi nilai tambah bagi petugas dalam rangka penajaman dan peningkatan kemampuan dalam melakukan sebuah studi terkait kesehatan masyarakat. Studi EHRA dapat digunakan sebagai alat untuk mengadvokasi pengaruh utama isu-isu sanitasi kepada para pemangku kepentingan. Studi EHRA adalah Studi primer yang didapat data langsung dari lapangan dalam periode waktu terbaru dengan tingkat kepercayaan terhadap kesimpulan survey mencapai 95%. Studi ini sangat potensial untuk di sosialisasikan kepada para pihak untuk lebih melihat sanitasi dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten dan memahami kerugian-kerugian akibat sanitasi buruk. Hasil studi EHRA memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Kabupaten Rokan Hulu, dimana hasil dari studi EHRA dijadikan acuan bagi para pemangku kebijakan untuk memperbaiki segala kekurangan dari segi aspek lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga nantinya dapat meningkatkan pembangunan sanitasi yang lebih baik.

Data yang diperoleh memberikan peran penting dalam rangka keberlanjutannya, soal-soal dalam angket dan lembar observasi berorientasi pada lima pilar Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) yang dikembangkan Kementerian Kesehatan RI. Pengorganisasian pertanyaan angket dan lembar observasi serta penomorannya dilakukan sedemikian rupa untuk memudahkan pelaksanaan penyelidikan, input data dan analisis hasil studi yang dilaksanakan. Hasil studi ini digunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk menyusun dokumen strategi sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Rokan Hulu yang mana hasil ini dijadikan sebagai data primer, diharapkan juga hasil studi EHRA digunakan sebagai *baseline* untuk pelaksanaan studi EHRA selanjutnya.

Kajian terkait Penilaian Resiko Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kondisi sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pelaksanaan Studi EHRA selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala minimal tiga tahun sekali, agar Indeks Risiko Sanitasi dapat diketahui perkembangannya dan menjadi dasar untuk perencanaan program kedepan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan studi EHRA di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 terdapat hambatan selanjutnya seperti yang diuraikan berikut :

1. Terlambatnya proses survey dikarenakan hujan yang terus menerus dan mengakibatkan banjir, sehingga dari 145 Desa yang direncanakan untuk disurvei hanya 140 desa/Kelurahan yang dilaksanakan surveynya;
2. Tidak adanya data nama kepala keluarga di tingkat Rukun Tetangga (RT) di seluruh Kabupaten Rokan Hulu pada OPD terkait sehingga menyulitkan dalam proses penentuan nama responden yang akan dipilih;
3. Terlambatnya proses entry data dikarenakan petugas entry memiliki tugas rangkap dan terkendala juga dengan sinyal internet, dari 5800 responden hanya 5600 yang terekap dalam aplikasi entry data studi EHRA;

4. Terlambatnya pengentrian data sehingga menyebabkan kemunduran waktu dalam pelaksanaan penganalisa data serta penyusunan laporan hasil EHRA.

Poin-poin catatan, rekomendasi dan saran untuk pelaksanaan studi EHRA selanjutnya adalah:

- a. Hasil survei EHRA tahun 2023 akan menjadi data dasar untuk pemutakhiran data EHRA selanjutnya yang akan disusun dalam waktu 4 tahun yang akan datang (tahun2027).
- b. Pemilihan tenaga enumerator perlu dilakukan seleksi untuk menjamin pelaksanaan studi yang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pokja PKP Kabupaten. Penguatan pemahaman tenaga enumerator perlu dilakukan untuk menjamin hasil studi EHRA yang berkualitas.
- c. Penggunaan data hasil analisis studi EHRA untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Rokan Hulu tahun 2025-2029 oleh masing-masing OPD terkait.
- d. Hasil analisis studi EHRA dapat digunakan untuk penentuan RPJMD dan RKPD Kab. Rokan Hulu
- e. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kab. Rokan Hulu untuk pemuktahiran studi EHRA selanjutnya yang akan disusun dalam waktu 4 tahun yang akan datang (Tahun 2027)
- f. Untuk para pemangku kebijakan (*stakeholders*), diharapkan dapat memanfaatkan hasil studi EHRA untuk membenahi segala kekurangan di wilayah tersebut.
- g. Para pemangku kepentingan supaya mengevaluasi dan memberikan input untuk perbaikan studi- studi kedepan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN ROKAN
HULU TAHUN 2025 – 2029

DOKUMEN STRATEGI SANITASI
BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Rokan Hulu adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memberikan layanan Sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada tahun 2016 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Rokan Hulu menyusun dokumen Pemutakhiran SSK, peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan, adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target *Universal Access* di tahun 2019, serta penyesuaian atau perubahan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2017 - 2022 yang menjadi acuan dari SSK.

Sejak diberlakukannya RPJMN 2020-2024, terjadi perubahan paradigma terhadap pembangunan sanitasi dan variabelnya dengan mengadopsi SDGs dengan target akses sanitasi layak sebesar 90%, akses sanitasi aman 15% dan BABs 0% ditahun 2024. Dari target tersebut telah didistribusikan kepada 34 Provinsi di Indonesia dimana Provinsi Riau ditargetkan 90% akses sanitasi layak dan didalamnya 11% akses sanitasi aman dan 0% BABS. Sedangkan target Kabupaten Rokan Hulu yang didistribusikan oleh Pokja PPAS Provinsi Riau yaitu target akses layak tahun 2024 sebesar 96,43%, akses aman 11% dan BABS 0%. Untuk Sektor persampahan Target dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 80% untuk penanganan dan 20% untuk pengurangan. Distribusi target untuk Provinsi Riau adalah 80% Penanganan dan 20% Pengurangan sampah. Untuk Kabupaten Rokan Hulu merujuk pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Persampahan (Jakstrada), penanganan sampah di Targetkan 70% dan pengurangan sampah 30% ditahun 2024.

Definisi Akses sanitasi (Air Limbah Domestik) yang digunakan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Akses Sanitasi Aman; sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah: tanki septik (*septic tank*) yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir; atau rumah tangga yang terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
- b. Akses sanitasi Layak: Layak Sendiri Perkotaan dan Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan, leher angsa dan Bangunan bawah tanki septik yang tidak disedot.

- c. Akses Sanitasi Layak Khusus Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah : Lubang tanah.
- d. Layak Bersama Perkotaan dan Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas:klosetnya menggunakan, leher angsa dan Bangunan bawah tanki septik yang tidak disedot.
- e. Akses Layak Bersama Khusus Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas :klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah: Lubang tanah.
- f. Akses Sanitasi Belum layak.
 1. Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah di Perkotaan
 - Pengguna Fasilitas sanitasi : sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu.
 - Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa.
 - Bangunan bawah: Lubang tanah.
 2. Akses Sanitasi Dasar (non leher angsa)
 - Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu.
 - Bangunan atas: klosetnya menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/cemplung.
 - Bangunan bawah tanki septik, IPAL, atau Lubang Tanah
 3. Fasilitas Umum
- g. Buang Air Besar sembarangan.
 - BABs Terbuka
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
 - BABs Tertutup
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tertutup, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya.

Dengan perubahan target akses dan capaian sanitasi, oleh karena itu, Dokumen SSK Kabupaten Rokan Hulu perlu disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan baik oleh Pokja Provinsi maupun RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029.

Untuk menghasilkan sebuah Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Pokja.

Peran SSK dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

- a. Memberikan arahan serta koridor dalam penyusunan strategi sanitasi didalam penetapan sistem dan pelayanan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu selama 5 tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029.
- c. Sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.

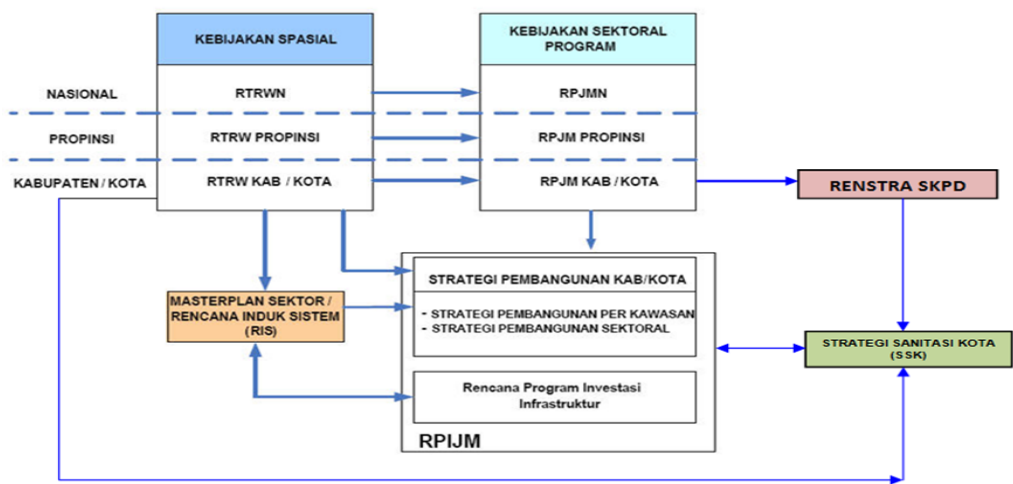
Kaitan antara pemutakhiran SSK dengan SSK sebelumnya adalah menyangkut visi misi pembangunan sanitasi, tujuan, sasaran serta strategi

pengembangan sanitasi. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu yang telah dirumuskan dalam SSK sebelumnya akan dikaji kembali dalam pemutakhiran SSK sejalan dengan perkembangan baru tentang data, permasalahan, kebijakan maupun adanya isu percepatan pembangunan sanitasi sesuai dengan target RPJMN 2025-2029, SPM dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029.

Dokumen SSK merupakan dokumen penting dalam pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi. Untuk itu, dokumen SSK ini dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Masukan terhadap RPJMD menyangkut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi maupun program dan kegiatan sanitasi, sedangkan masukan terhadap RTRW menyangkut lokasi pengembangan untuk sanitasi. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :

- a. Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari layanan sanitasi sektor air limbah domestik, dan layanan sanitasi sektor persampahan.
- b. Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen: (1) Aspek Regulasi Daerah dan Kelembagaan, (2) Aspek Keuangan/Pendanaan, (3) Aspek Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis, (4) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, dan (5) Monitoring dan evaluasi.

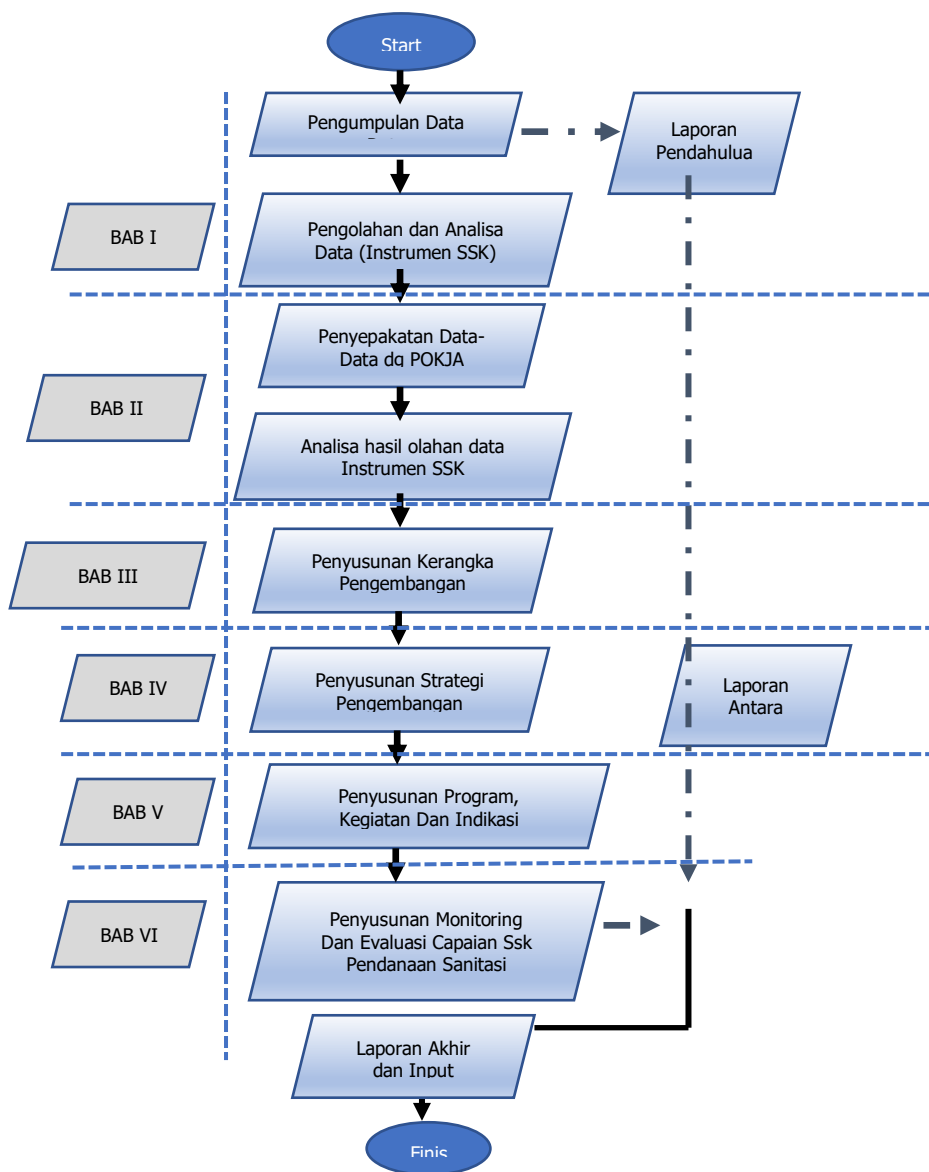
Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dalam dokumen Perencanaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar1.1 Skematik Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten

1.2. Metodologi Penyusunan

Metode merupakan seperangkat langkah dari apa yang harus dikerjakan secara tersusun dan sistematis. Berikut ini dijelaskan metodologi kerja secara umum :



Gambar 1.2. Skema Penyusunan Dokumen SSK

1. Start.
2. Pengumpulan data primer/EHRA.

Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) adalah sebuah studi partisipatif di Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Hasil pengolahan dan analisis data yang dapat menggambarkan penetapan area beresiko dari masing masing wilayah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat desa yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyusunan dan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) sebagai bahan review kebijakan dan advokasi untuk menuju penyehatan sanitasi total yang layak dan aman yang bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

3. Pengumpulan data sekunder.

Data sekunder data teknis, partisipasi swasta, pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan, dan kelembagaan serta keuangan. Data –data tersebut dilakukan penginputan pada tools Instrumen SSK. Sementara Output dari hasil Instrumen SSK antara lain:

- a. Rantai layanan air limbah domestik.
 - b. Rantai layanan persampahan.
 - c. Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Akses Air Limbah Domestik.
 - d. Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Sampah Perkotaan.
 - e. Pemetaan permasalahan mendesak untuk air limbah domestic dan persampahan
4. Pengamatan Langsung
Dilakukan pada daerah atau lokasi yang telah ada infrastruktur terbangun baik air limbah dan persampahan untuk melihat keberfungsian atas bangunan tersebut.
 5. Forum Group Diskusi/ rapat dengan Pokja PKP Kabupaten Rokan Hulu terkait :
 - Menyepakati skor persepsi pokja terhadap area beresiko setiap desa/kelurahan.
 - Menyepakati area beresiko.
 - Penyampaian hasil Instrumen SSK, antara lain : capaian akses eksisting dan Analisis Gap Terhadap Target Akses.
 6. Penyusunan Kerangka Pengembangan Sanitasi
 - Visi Dan Misi Sanitasi
Berisikan penjelasan singkat mengenai visi misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten/kota terbaru.
 - Rencana Pengembangan Sanitasi
Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi.
 - Deskripsikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 2 (dua) sektor:
 - a. Air limbah domestik
 - b. Sampah Perkotaan
 - Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah
Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi yang hasilnya akan menjadi bagian dari Bab 4 dan Bab 5.
 7. Penyusunan Strategi Pengembangan Sanitasi
Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin).
 - Air Limbah Domestik
Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu

strategis yang ada saat ini. Gunakan matrik Kerangka Kerja Logis, analisis SWOT atau perangkat analisis lainnya sebagai alat bantu.

- **Pengelolaan Persampahan**

Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan sampah perkotaan selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Gunakan matrik Kerangka Kerja Logis, analisis SWOT atau perangkat analisis lainnya sebagai alat bantu.

8. **Penyusunan Program, Kegiatan Dan Indikasi Pendanaan Sanitasi**

Pada dasarnya Bab 5 (beserta Lampiran 5) merupakan hasil pembahasan yang diperoleh saat internalisasi dan eksternalisasi program dan kegiatan setelah dilakukan perbaikan- perbaikan seperlunya. Bab ini memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari matriks indikatif program dan kegiatan. Lengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok sasaran / penerima manfaat), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Secara detail informasi dimasukkan dalam Lampiran 5.

9. **Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK.**

Bab ini menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan, yang pelaporannya dilakukan melalui sistem Monev berbasis web: www.nawasis.org.

Pelaporan pemantauan ini mencakup 3 (tiga) modul yaitu:

- Modul Data Teknis yang memuat informasi capaian akses air limbah domestik dan capaian akses sampah perkotaan;
- Modul Program dan Pendanaan yang memuat informasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai investasinya serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan;
- Modul Sarana dan Prasarana yang memuat informasi tentang sistem, jenis dan jumlah infrastruktur eksisting termasuk informasi mengenai keberfungsian.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan informasi terkait peraturan-peraturan baik skala nasional, provinsi, dan kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan pemutakhiran SSK Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut :

A. Undang-Undang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persisten Organic Pollutants*.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peraturan Pemingah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

D. Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

E. Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Lingkungan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi.

F. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Bab. Substansi masing-masing Bab dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari Bab 1 memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan dokumen pemutakhiran SSK tahun 2024.

BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kabupaten Rokan Hulu, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrumen SSK dan peta area beresiko sanitasi serta permasalahan mendesak sanitasi.

BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Pada bab ini menjelaskan visi dan misi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, serta ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang merupakan skenario pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, pentahapan pengembangan sanitasi serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Memuat strategi pengembangan sanitasi untuk sub sektor air limbah domestik, pengelolaan persampahan.

BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Pada bab ini berisi ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah serta antisipasi funding gap.

BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Pada bab 6 ini dirumuskannya strategi untuk monitoring dan evaluasi SSK yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, serta monitoring dan evaluasi capaian SSK yang telah dirumuskan pada dokumen SSK sebelumnya.

BAB 2

PROFIL SANITASI SAAT INI

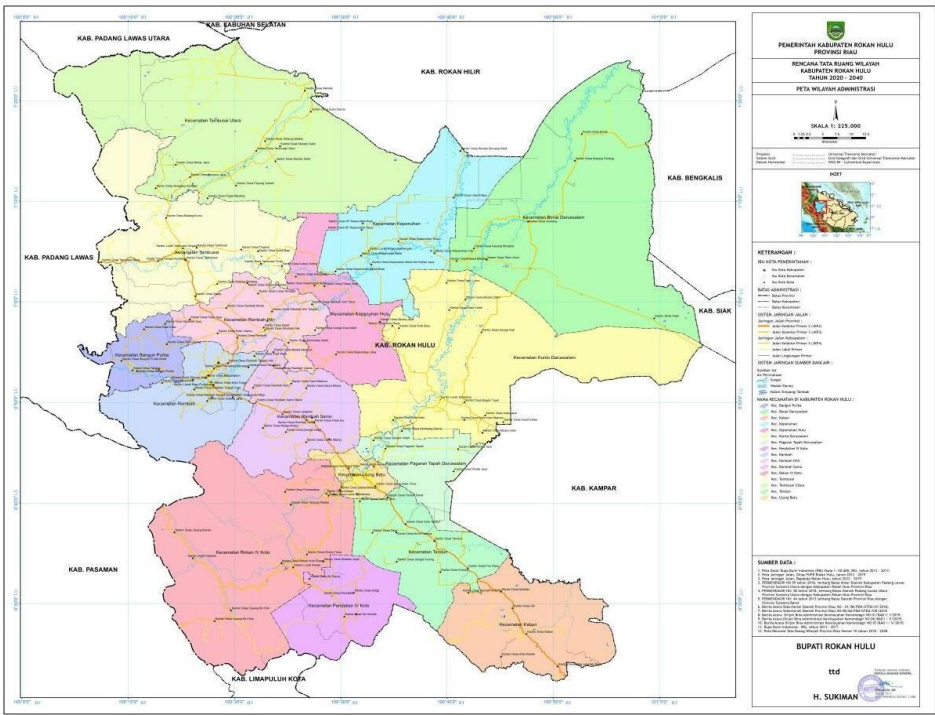
2. Gambaran Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0o 25’ 20” dan 10o 25’ 41” Lintang Utara serta 100o 02’ 56” dan 100o 56’ 59” Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.588,13 km², terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

II.1.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km2 yang terbagi dalam 16 kecamatan. kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 1.119,49 km2 (14,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km² atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa.

Secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

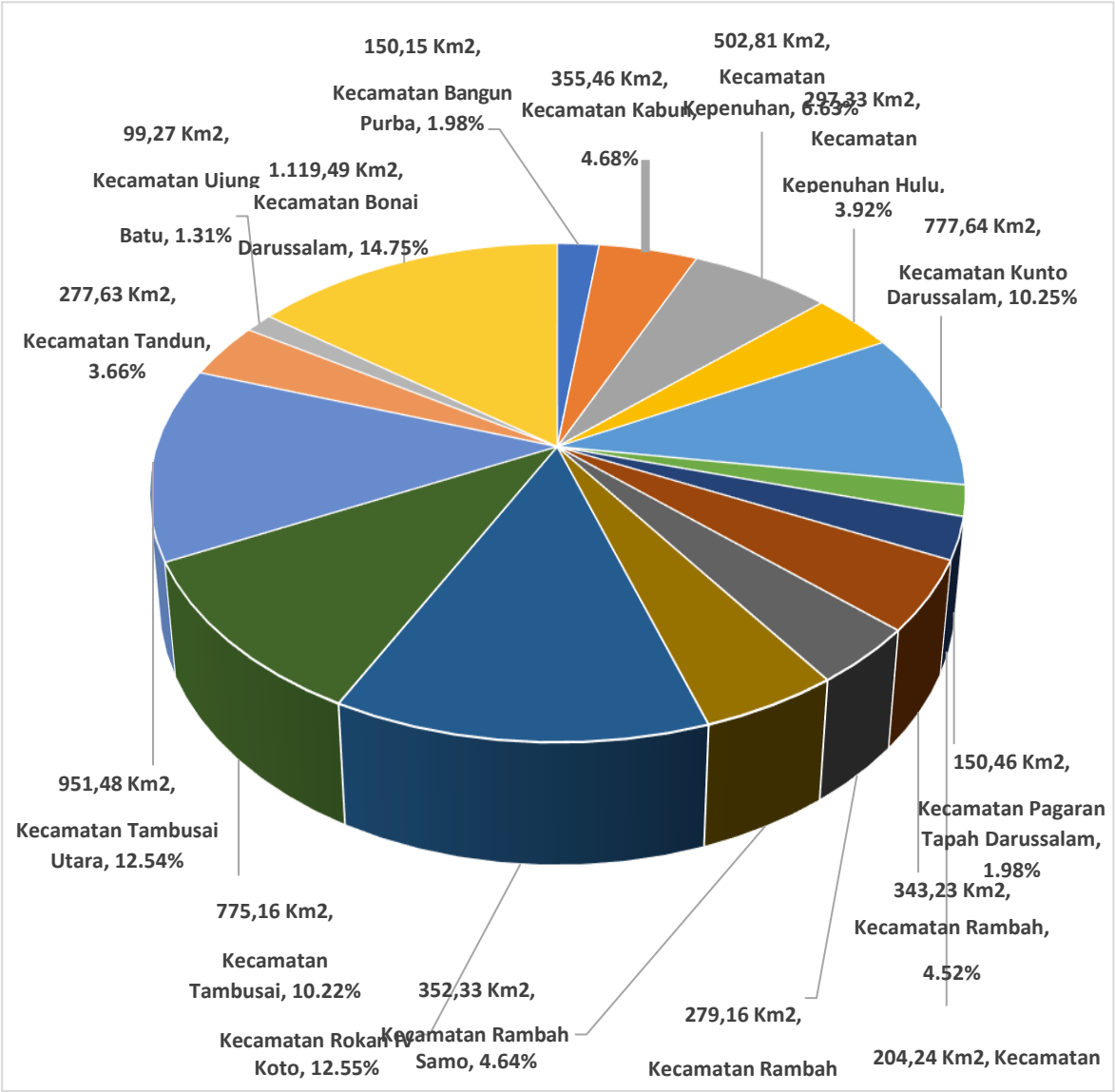
Tabel II-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km2/Sq. Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
1	Kecamatan Bangun Purba	Tangun	150,15	1,98
2	Kecamatan Kabun	Kabun	355,46	4,68
3	Kecamatan Kepenuhan	Kota Tengah	502,81	6,63
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92
5	Kecamatan Kunto Darussalam	Kota Lama	777,64	10,25
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	150,46	1,98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	Pendalian	204,24	2,69
8	Kecamatan Rambah	Pasir Pengaraian	343,23	4,52
9	Kecamatan Rambah Hilir	Muara Rumbai	279,16	3,68
10	Kecamatan Rambah Samo	Rambah Samo	352,33	4,64
11	Kecamatan Rokan IV	Rokan	952,31	12,55

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km2/Sq. Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
	Koto			
12	Kecamatan Tambusai	Dalu - Dalu	775,16	10,22
13	Kecamatan Tambusai Utara	Rantau Kasai	951,48	12,54
14	Kecamatan Tandun	Tandun	277,63	3,66
15	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu	99,27	1,31
16	Kecamatan Bonai Darussalam	Sontang	1.119,49	14,75
	Rokan Hulu	Pasir pengaraian	7.588,13	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024

Gambar II.2 Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

II.1.1.1 Kondisi Topografi

Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata- rata wilayah 72 mdpl. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Rokan IV Koto,Tandun,Kabun dan Kecamatan Bangun Purba, kemudian Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah (111 mdpl. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadap langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl.Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (m dpl), yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto (111 m dpl).

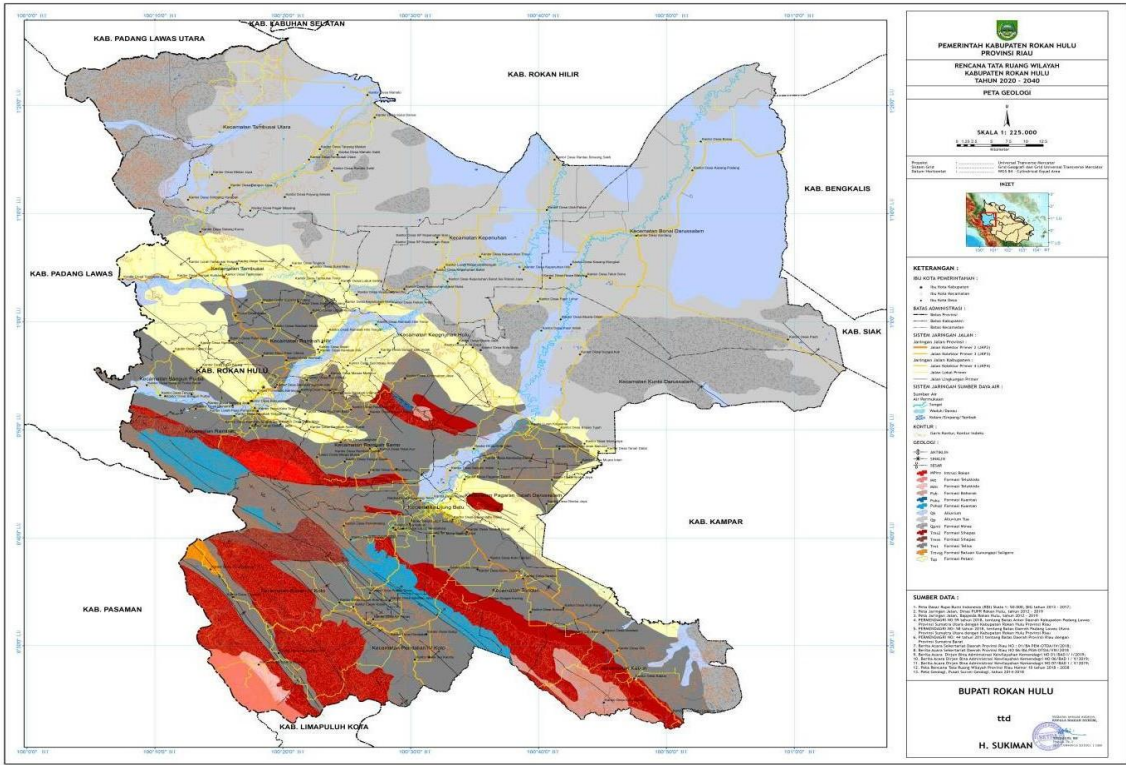
Tabel II-2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Rokan IV Koto	97	57
2	Pendalian IV Koto	11 1	73
3	Tandun	70	55
4	Kabun	63	74
5	Ujung Batu	66	35
6	Rambah Samo	69	12
7	Rambah	67	-
8	Rambah Hilir	55	15
9	Bangun Purba	77	14
10	Tambusai	64	34
11	Tambusai Utara	49	64
12	Kepenuhan	29	45
13	Kepenuhan Hulu	49	32
14	Kunto Darussalam	41	55
15	Pagaran tapah Darussalam	52	40
16	Bonai Darussalam	21	111

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

II.1.1.1 Kondisi Geologi

Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga(Aspden, J.A., dkk., 1982) dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982). Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Untuk melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040
Gambar II.3 Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu

II.1.1.1 Kondisi Hidrologi

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya

agar tidak merusak aliran sungai.Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola- pola aliran sungai yang ada. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi : Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan.

II.1.1.1 Klimatologi

Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan.

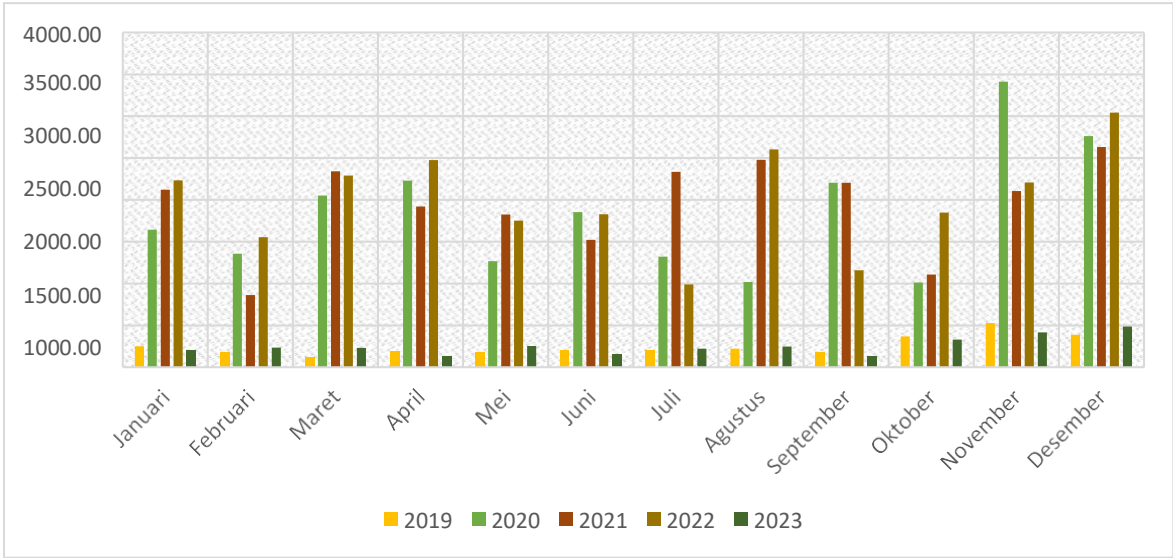
Tabel II-3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2023

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan (hari)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	249,28	1643	2122,70	2234,50	207,72	16,40	126	130	124	16
Februari	178,30	1355	864,00	1553,20	234,09	13,30	116	66	117	15
Maret	126,70	2050	2343,00	2290,30	232,33	10,10	117	112	128	16
April	189,10	2231	1920,50	2475,00	132,33	14,30	120	112	254	13
Mei	177,80	1266	1824,50	1751,50	252,72	10,10	95	127	102	14
Juni	203,90	1853	1523,50	1827,00	152,72	15,10	86	79	108	11
Juli	203,60	1323	2334,50	989,50	221,56	9,70	103	72	75	12
Agustus	221,80	1018	2479,00	2603,50	246,44	6,60	76	127	133	16
September	177,80	2206	2203,00	1158,00	135,44	8,70	138	128	110	9
Oktober	368,10	1012	1108,00	1847,50	329,00	14,80	82	85	145	16
November	527,30	3411	2107,00	2208,50	415,50	16,00	179	119	131	19
Desember	387,10	2763	2631,50	3041,50	486,94	22,30	134	158	166	23

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2023, rata rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli (25,80 o C), sedangkan terendah pada bulan Januari (24,00 o C). Kelembapan udara tertinggi di bulan Maret (93,00 %) dan terendah di bulan Oktober (86,00 %). Kecepatan angin tertinggi di bulan Februari (8,50 knot) dan terendah di bulan September (4,60). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan Desember (486,94 mm) terendah di bulan April (132,33 mm). Jumlah hari hujan tertinggi

di bulan Desember (23 hari) dan terendah di bulan September (9 hari). Jumlah curah dan hari hujan merupakan rata-rata dari unit pengamatan pada kecamatan Rambah, Rambah samo,Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai,Tandun Rokan IV Koto, Ujung Batu dan Kunto Darussalam.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024
Gambar II.4 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tinggi terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Saat itu terjadi cuaca ekstrim, berupa peningkatan intensitas hujan, banjir, angin puting beliung yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Kejadian ini menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur.

II.1.1.2 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670.098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II-4 Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha)

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Danau/Situ	279,60	0,03
2	Empang/Kolam	1.409,64	0,17
3	Hutan Rimba	25.965,39	3,16
4	Kebun Campuran	34.068,33	4,14
5	Perkebunan/Kebun	670.098,57	81,43
6	Permukiman	18.198,28	2.21
7	Pertambangan	119,18	0,01
8	Rawa	983,42	0,12

9	Sawah	1.854,60	0,23
10	Semak Belukar	48.100,09	5,85
11	Semak Belukar Rawa	8.137,83	0,99
12	Sungai	4.438,24	0,54
13	Tanah Terbuka	4.619,38	0,56
14	Tegalan/Ladang	4.570,73	0,56
15	Waduk	39,31	0,00
	Total	822.882,59	100

Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

a) Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel II-11 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha)

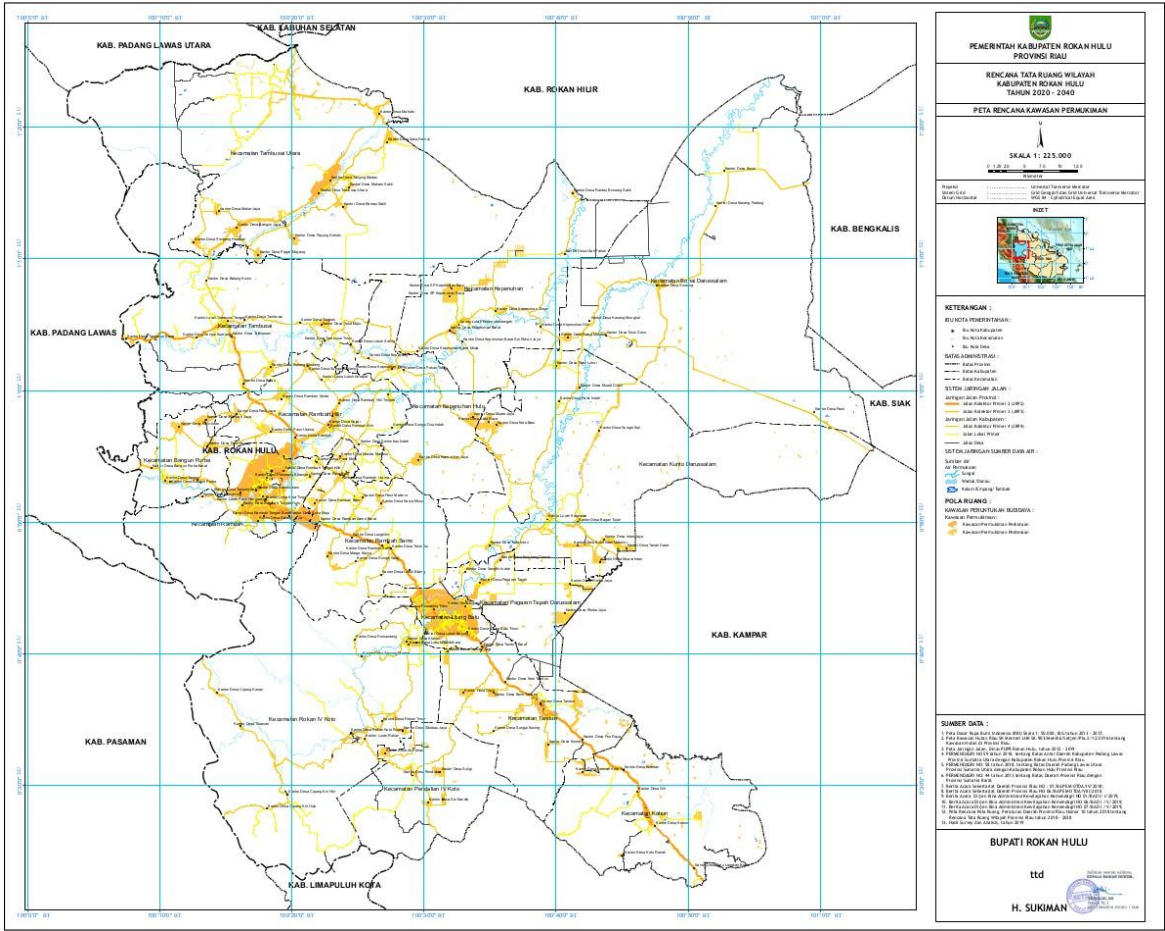
NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	1.280	149	1.429	3,4
2	Kecamatan Kabun	1.498	295	1.793	4,2
3	Kecamatan Kepenuhan	1.566	314	1.880	4,4
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	828	161	989	2,3
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.285	183	3.468	8,2
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.488	314	1.802	4,3
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	766	113	879	2,1
8	Kecamatan Rambah	282	6.200	6.483	15,3
9	Kecamatan Rambah Hilir	2.107	1.044	3.151	7,4
10	Kecamatan Rambah Samo	2.069	465	2.534	6,0
11	Kecamatan Rokan IV Koto	1.115	176	1.291	3,1
12	Kecamatan Tambusai	2.101	215	2.316	5,5
13	Kecamatan Tambusai Utara	4.881	938	5.819	13,8
14	Kecamatan Tandun	2.444	553	2.996	7,1
15	Kecamatan Ujung Batu	97	4.387	4.484	10,6
16	Kecamatan Bonai Darussalam	829	172	1.001	2,4

ROKAN HULU	26.636	15.679	42.316	100
------------	--------	--------	--------	-----

Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat- pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar sebagaimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 42.316 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam belas) hektar.



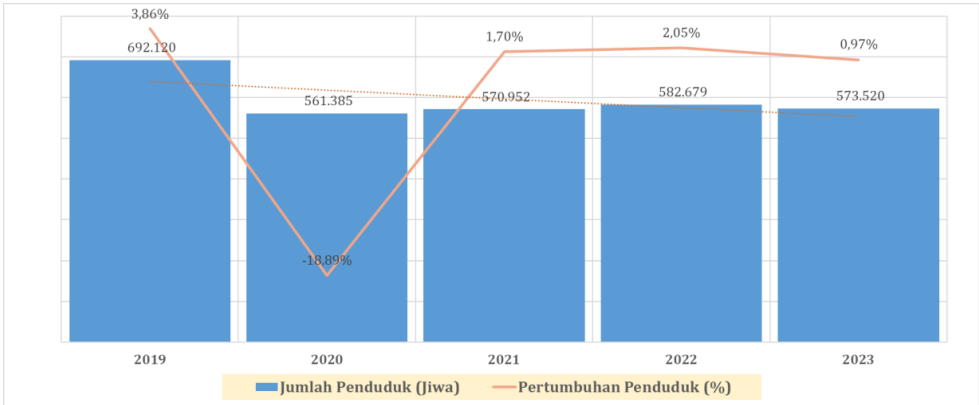
Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040
 Gambar II.10 Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu

2.1.2 Demografi

II.1.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 tercatat sebesar 692.120 jiwa, turun signifikan pada tahun 2020 menjadi 561.385 jiwa,

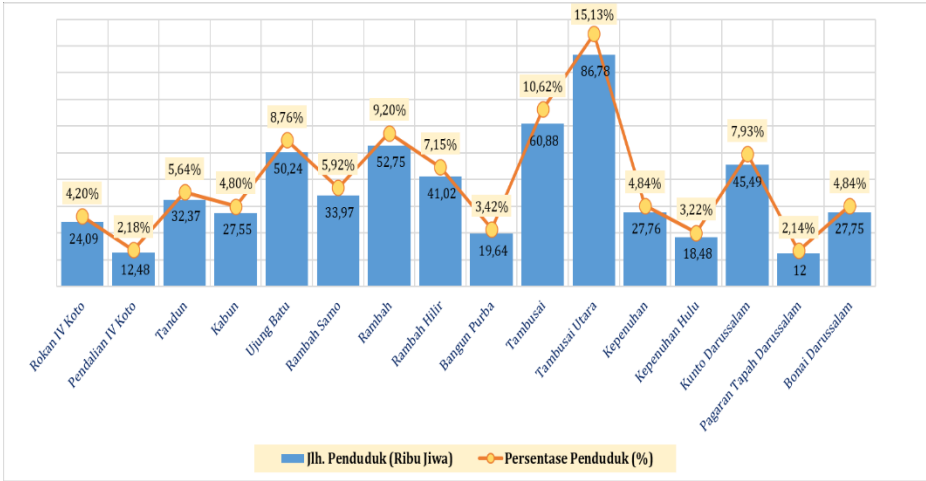
Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu, 2024
 Gambar II.17 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu, 2024
 Gambar II.17 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

kembali naik hingga tahun 2022 menjadi 582.679 jiwa dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 573.520. Penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak Covid-19. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023, yaitu:

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut Kecamatan didominasi oleh jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Tambusai Utara yaitu sebesar 86,78 ribu jiwa atau setara 15,13% dari jumlah penduduk Rokan Hulu. Diposisi kedua adalah Kecamatan Tambusai yaitu sebesar 60,08 ribu jiwa atau setara 10,62% dari total penduduk Rokan Hulu. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 12 ribu jiwa atau setara 2,14% dari total penduduk dan Kecamatan Pendalian IV Koto sebesar 12,48 ribu jiwa atau setara 2,18% dari total penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Berikut disajikan data jumlah penduduk menurut Kecamatan pada tahun 2023, yaitu:

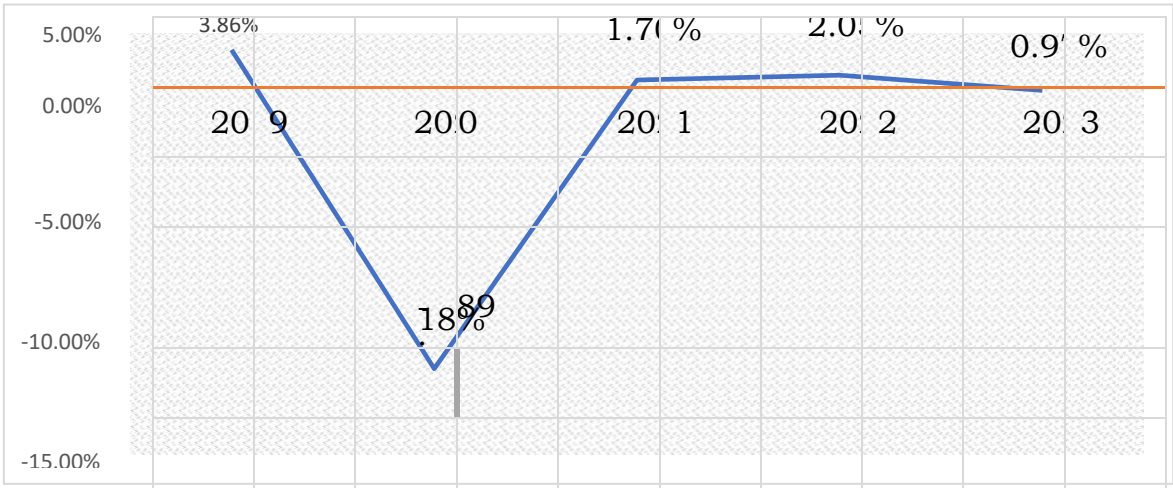


Sumber: BPS Rokan Hulu, 2024
 Gambar II.18 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Tahun 2023

II.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari 3,86% pada tahun 2019, turun signifikan menjadi -18,89% pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak covid 19, selanjutnya meningkat

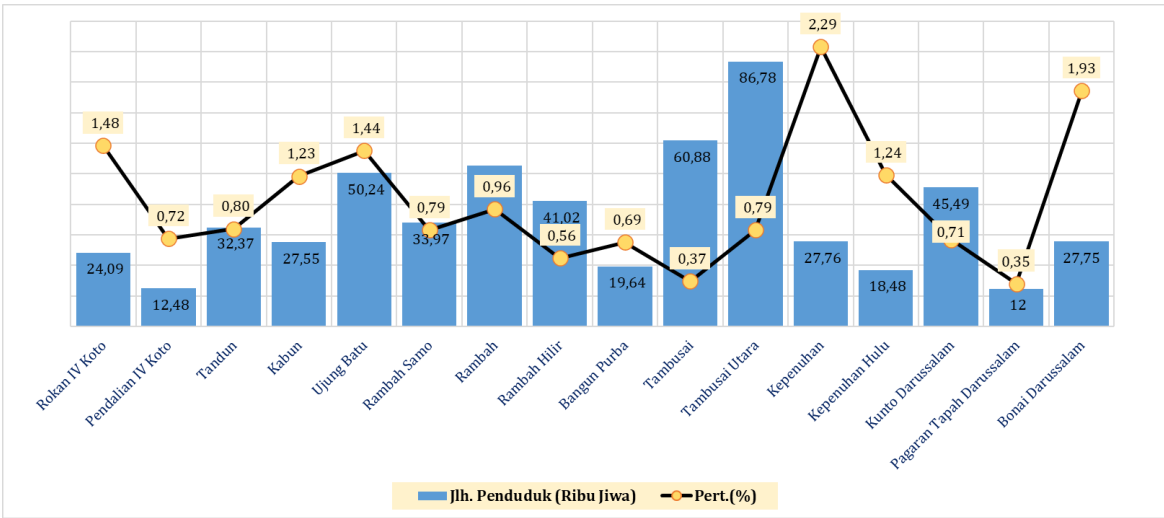
hingga tahun 2022 menjadi 2.05% dan sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 0,97%.



Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu, 2024
Gambar II.19 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023

Sebagai daerah perkebunan, pertumbuhan penduduk Rokan Hulu disebabkan oleh tingkat kelahiran dan juga migrasi masuk baik antar kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun antar provinsi di Indonesia. Keterbukaan wilayah dan aktivitas ekonomi perkebunan dan industri menjadikan mobilitas orang ke Rokan Hulu menjadi sangat mudah.

Pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil.



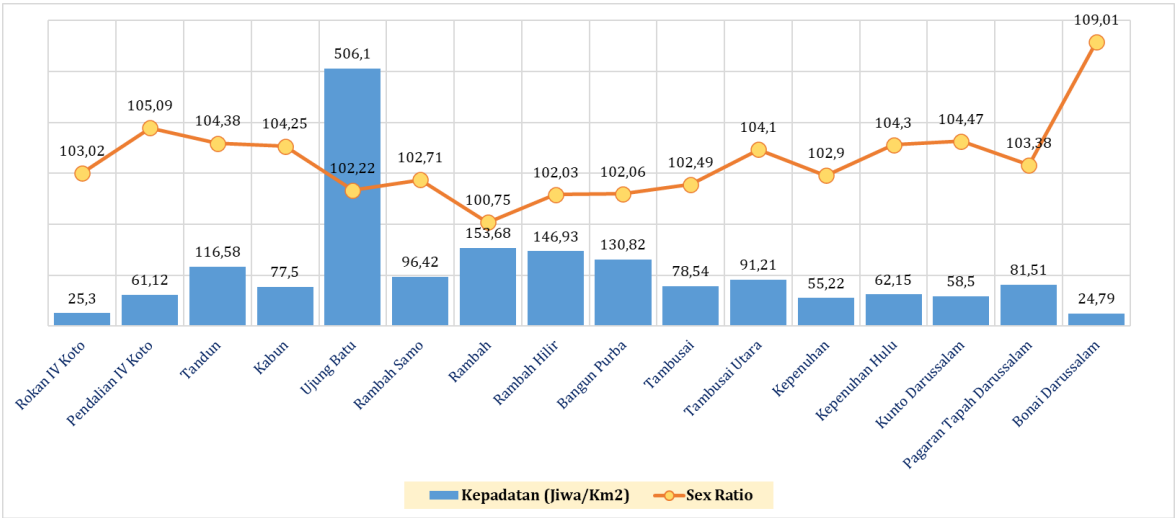
Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024
Gambar II.20 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Kepenuhan pada tahun 2023 sebesar 2,29%, Kecamatan Bonai Darussalam sebesar 1,93% dan Kecamatan Rokan IV Koto tumbuh sebesar 1,48%. Sedangkan Kecamatan Tambusai Utara dengan penduduk terbanyak hanya tumbuh sebesar 0,79% dan Kecamatan Tambusai hanya tumbuh sebesar 0,37%.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

II.1.2.3 Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio

Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 573.520 jiwa dengan kepadatan 75,58 jiwa per Km2 pada tahun 2023. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah dengan penduduk peringkat keenam di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu termasuk kategori penduduk jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembang kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut disajikan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:



Sumber: BPS Rokan Hulu, 2024
Gambar II.21 Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Ujung Batu yaitu sebanyak 506,1 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan

harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

Penduduk berdasarkan sex ratio di Kabupaten Rokan Hulu terlihat masih didominasi oleh penduduk perempuan, dengan perbandingan 103,34 perempuan dari 100 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan pada semua kecamatan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Banai Darussalam sebesar 109,01.

II.1.2.4 Komposisi Penduduk

Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 67,62 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 32,38%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (dependency ratio) sebesar 46,55%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II-23 Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)			
	2022		2023	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
0-4	44.889	7,70	39.968	6,97
5-9	57.318	9,84	58.604	10,22
10-14	57.974	9,95	63.820	11,13
15-19	57.393	9,85	48.254	8,41
20-24	52.767	9,06	52.402	9,14
25-29	49.228	8,45	46.298	8,07
30-34	49.585	8,51	43.466	7,58
35-39	46.479	7,98	46.614	8,13
40-44	41.817	7,18	46.309	8,07
45-49	35.054	6,02	36.944	6,44
50-54	28.006	4,81	29.563	5,15
55-59	22.771	3,91	22.094	3,85
60-64	16.552	2,84	15.957	2,78
65-69	11.13	1,91	10.667	1,86

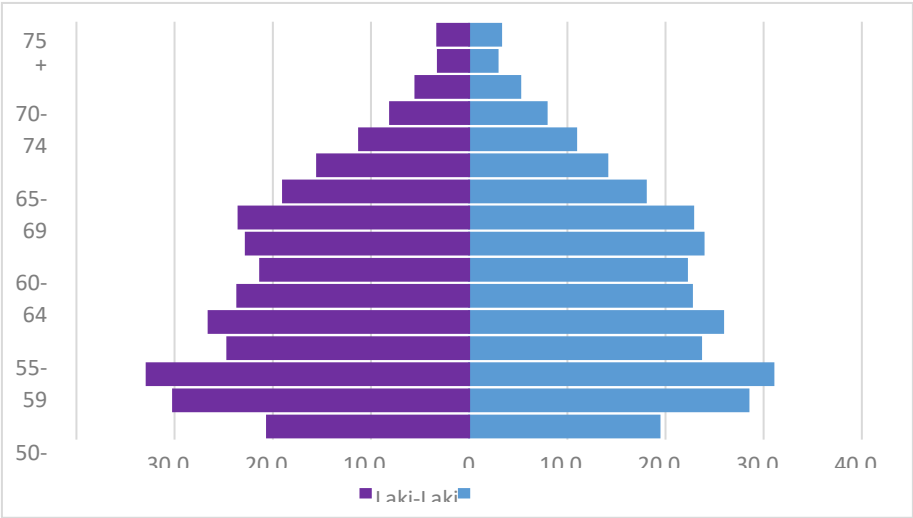
70-74	6.195	1,06	6.072	1,06
75+	5.521	0,95	6.488	1,13
Rokan Hulu	582.679	100	573.520	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Komposisi penduduk dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum masih didominasi jumlah penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya pada setiap 103 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 orang jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,82 persen dan perempuan sebesar 49,18 persen.

Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk muda (*expansive*). Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN,2014), sementara itu Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 60% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Rokan Hulu yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024
 Gambar II.22 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2024

2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

2.2.1.Air Limbah Domestik

2.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur

Berdasarkan hasil pemetaan pada Instrumen SSK Tahun 2024 ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

2.1. Tabel Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,42%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	28,24%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	27,25%
	Akses Layak Bersama	0,56%
C	Akses Belum Layak*	2,76%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	1,26%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,97%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	62,81%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	53,75%
	Akses Layak Bersama	1,20%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa -	6,89%
C	Belum Layak	0,74%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	4,19%
Total		100%

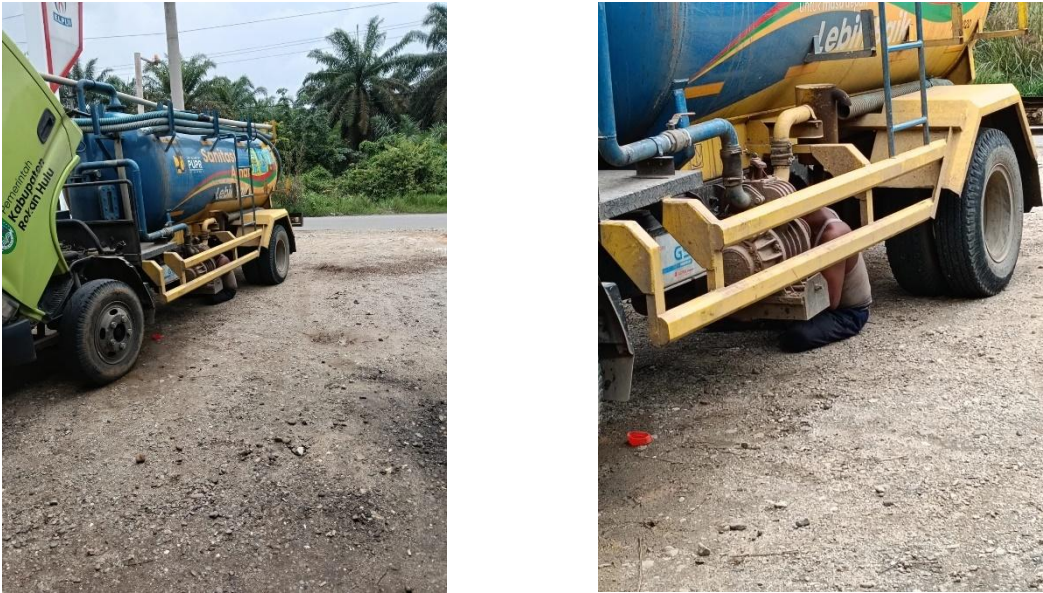
Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.2 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	1
2	Status aset	Sudah serah terima aset	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	5
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	Unit	0
2	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
3	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
4	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur	truk/hari	0

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	tinja ke IPLT		
5	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber : Instrumen SSK 2024



Gambar 2.3 Truk Tinja Kabupaten Rokan Hulu
Tabel 0.1 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT Kabupaten Rokan Hulu	1
2	Status aset	Sudah	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	10
4	Tahun Pembangunan	2020	
5	Tahun Rehabilitasi	2020	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	Kec. Rambah samo, Kec. Kec. Rambah, Kec. Bangun Purba	
7	Wilayah layanan terdekat	km	0,5
8	Wilayah layanan terjauh	km	10
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+bak ekualisasi - Bak Sedimentasi - Kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi - sludge drying bed-pengomposan-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	2	
4	Fasilitas pendukung (sumber	Ada, Memadai	

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	air, pagar, jalan akses)		
5	Kondisi jalan akses		Perkerasan

Sumber : Instrumen SSK 2024



Gambar 2.1 Foto-foto situasi terkini IPLT Kabupaten Rokan Hulu
Tabel 2.2 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Te

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/ Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
1	IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal	Kota Raya	50	30	Kurang Optimal	2022	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
2	IPAL skala permukiman kombinasi MCK	Kepenuhan Jaya	50	35	Optimal	2022	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
3	IPAL Skala Permukiman	Ujung Batu	50	25	Kurang Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
4	IPAL Skala Permukiman	Kepenuhan Tengah	50	28	Kurang Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
5	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Tandun	50	15	Tidak Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
6	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Rambah Utama	50	0	Tidak Beroperasi	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
7	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Bangun Purba	50	16	Kurang Optimal	2020	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
8	IPAL Skala	Kepenuhan Barat	50	19	Kurang	2020	Skala	KSM

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/ Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
	Permukiman Kombinasi MCK	Sei Rokan Jaya			Optimal		Permukiman Berbasis Masyarakat	
9	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Pasir Baru	50	14	Tidak Optimal	2019	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
10	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Lubuk Bendahara Timur	50	9	Tidak Optimal	2019	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
11	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Pendalian	50	12	Tidak Optimal	2019	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
12	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Rambah Muda	50	17	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
13	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Serombou Indah	50	22	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
14	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Lubuk Bilang	50	27	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Suka maju	50	33	Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis	KSM

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/ Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
							Masyarakat	
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Koto Tinggi	50	22	Kurang Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Lubuk Bendahara	50	35	Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Pasir Utama	50	29	Kurang Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
19	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Desa Pasir Baru	50	18	Kurang Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
20	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Desa Pasir Maju	50	4	Tidak Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
21	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Desa Pematang Tebih	50	16	Kurang Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
22	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelurahan Tambusai Tengah	50	8	Tidak Optimal	2017	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/ Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab
23	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Marga Mulya	50	14	Tidak Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
24	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kepunuhan Hulu	50	0	Tidak Beroperasi	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
25	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Giti	50	15	Tidak Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
26	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Suka Damai	50	13	Tidak Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
27	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Alahan	50	16	Kurang Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM
28	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Dayo	50	26	Kurang Optimal	2016	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	KSM

Sumber : Instrumen SSK 2024







Gambar 2.2 Foto IPALD

Tabel 2.3. Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2025-2029

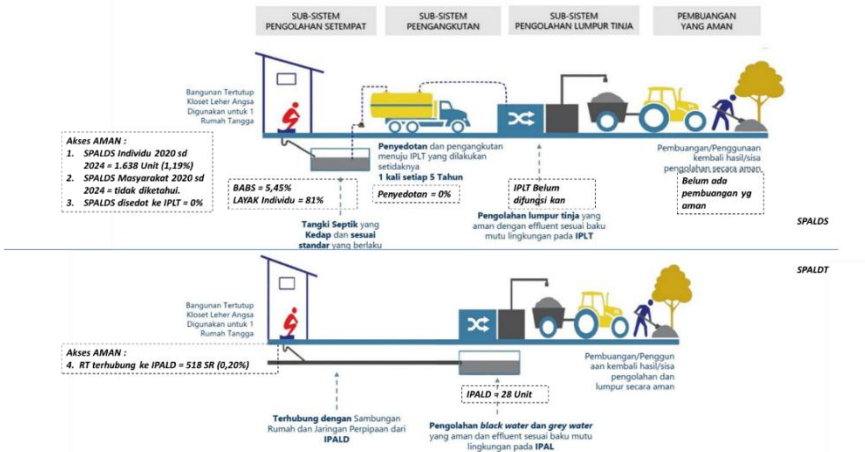
No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029 (%)	Target - 2029 (%) berdasarkan RSP		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Riau	Kab. Rohul	Kab. Rohul			
1	Akses Aman	15%	11,0%	10,0%	5,0%	1,39%	8,6%	3,6%
2	Akses Layak	90%	90,0%	95,0%	93,0%	91,05%	4,0%	2,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	90,0%	85,0%	81,00%	9,0%	4,0%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	5%	3,0%	1,76%	3,2%	1,2%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	3,0%	6,89%	-6,89%	-3,89%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	1,5%	3,50%	-3,50%	-2,0%
4	BABS	0%	0,0%	0,0%	3,0%	5,45%	-5,45%	-2,45%

Sumber: Instrumen SSK 2024

Tabel 2.4 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

No	Infrastruktur	Persentase
SPALD-S		
1	Kapasitas Penggunaan IPLT	0,00%
2	Kapasitas penggunaan truk	0,00%
3	Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0,00%
4	Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0,00%
5	Kapasitas IPLT terhadap total RT	0,00%
SPALDT		
6	Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	37%
7	Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
8	Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber: Instrumen SSK 2024



Gambar 2.3 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Sumber : Instrumen SSK 2024)

Berdasarkan gambar 2.13. diatas bahwa pada SPALD Terpusat ada SR tersambung sebesar 0,20%, persentase ini didapatkan dari IPALD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pada SPALD Setempat BABS masih tinggi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,45%, Layak Individu sebesar 81%, serta terlihat bahwa Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki IPLT namun operasionalnya belum optimal, sehingga tidak ada penyedotan yang dibuang ke IPLT tersebut. Penyedotan pernah dilakukan untuk ujicoba.

1.2.1.1 Kelembagaan dan Kebijakan /Peraturan

2.2.1.2.1. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air Limbah domestik dikabupaten Rokan Hulu, Tugas Utama dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyediakan sarana dan prasarana sektor air limbah untuk masyarakat umum seperti menyediakan MCK, tangki septik individual dan komunal, dan sebagainya yang terkait sanitasi. Sedangkan Dinas kesehatan mempunyai tugas dalam pendidikan masyarakat tentang PHBS khususnya pesan tentang tidak BABS dan pemucuan. Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Tabel 2.5 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah pengelolaan air limbah

Perangkat Daerah	Tugas Dan Fungsi
BAPPEDA, PERKIM, DINKES	Perencanaan
PERKIM	Pengadaan Sarana
PERKIM	Pengelolaan
PERKIM, DINKES, DINAS PMD, DINAS INFOKOM	Pengaturan dan Pembinaan
BAPPEDA, PERKIM, DINKES	Monitoring dan Evaluasi

Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu, 2024

Tabel 2.6 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD & sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	BAPPEDA, PERKIM	–	–
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaianTarget	BAPPEDA , PERKIM	–	–

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD & sebagainya
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA , PERKIM	–	–
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	PERKIM	–	–
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	PERKIM	–	–
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	PERKIM	–	–
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	PERKIM	–	–
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	PERKIM	–	–
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	PERKIM	–	–
Mengelola IPLT dan atau IPAL	PERKIM	–	–
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	PERKIM	–	–
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	PERKIM	–	–
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	PERKIM	–	–
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	PERKIM	–	–
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	BAPPEDA , PERKIM DINKES, INFOKOM	–	–
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestic	SATPOL PP	–	–
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	BAPPEDA, DINKES, PERKIM	–	–
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan	BAPPED, PERKIM	–	–

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD & sebagainya
air limbah domestik			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	BAPPEDA, PERKIM	–	–
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	BAPPEDA, PERKIM	–	–

Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu, 2024

2.2.1.2.2. **Kelembagaan Masyarakat**

Tabel 2.7 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan air limbah

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kota Raya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
2	IPAL skala permukiman kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepenuhan Jaya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Optimal
3	IPAL Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Ujung Batu	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
4	IPAL Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepenuhan Tengah	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
5	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Tandun	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
6	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rambah Utama	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Beroperasi
7	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bangun Purba	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
8	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
9	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Pasir Baru	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
10	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Lubuk Bendahara Timur	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
11	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Pendalian	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
12	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rambah Muda	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
13	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Serombou Indah	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
14	IPAL Komunal Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Lubuk Bilang	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Suka maju	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Optimal

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Koto Tinggi	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Lubuk Bendahara	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Optimal
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Pasir Utama	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
19	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Pasir Baru	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
20	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Pasir Maju	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
21	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Desa Pematang Tebih	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
22	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kelurahan Tambusai Tengah	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
23	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Marga Mulya	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal

No	Fasilitas yang dikelola	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
24	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kepunuhan Hulu	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Beroperasi
25	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Giti	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
26	SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kelompok Swadaya Masyarakat.	7	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Suka Damai	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Tidak Optimal
27	SPALD Terpusat Skala Permukiman				Alahan	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal
28	SPALD Terpusat Skala Permukiman				Dayo	Iuran Warga	IPAL Komunal Dan Perpipaan	Kurang Optimal

Sumber : Survey lapangan, Dinas Perkim 2024

Berdasarkan tabel daftar program dan kegiatan pengelolaan sanitasi oleh masyarakat dapat disampaikan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu sudah ada kerjasama/peran serta masyarakat dengan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, namun belum optimal.

2.2.1.2.3. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Tabel 2.8 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah

Pemangku kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah.
Pengusaha / Swasta: - PT. PN V	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes : - 145 Desa/Kel.	- Melaksanakan UU Desa.	- Adanya dana 15% dari APBD Desa untuk Sanitasi.
Organisasi Massa (Ormas): - Baznas - Laskar Melayu Bersatu	- Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI. - Meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan Melayu	- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi. - Adanya dana organisasi bidang kesejahteraan anak kemenakan Melayu.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): -	-	-
Tokoh Masyarakat	-	-

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.9 Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Sedang	Sedang	Tidak
Organisasi Massa (Ormas): - Baznas	- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat.	Tinggi	Sedang	Tidak
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - Forum Dai Sanitasi	- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat.	Tinggi	Sedang	Tidak

Sumber : Data Sekunder 2024

1.2.1.2 Regulasi

Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

Tabel 2.10 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik

No	Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik		
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
		-	✓
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	✓
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD: SPALD-S dan SPALD-T	-	✓
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	✓
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	✓
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	-	✓
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	✓
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	-	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	-	Belum Ada
		-	✓

Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024

1.2.1.3 Komunikasi dan Media

Tabel 2.11 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (air limbah)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sehat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	2015 s.d 2024	Dinas Kesehatan	Agar masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	• Perangkat desa • TPKK Kecamatan dan Desa • Tokoh masyarakat desa • Kader Kesehatan di Kampung/ Kelurahan	Pelaksanaan 10 indikator Rumah Tangga ber-PHBS	Metode Pembelajaran Ceramah Tanya Jawab dengan topik 10 Indikator rumah tangga ber-PHBS yang meliputi : 1. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. 2. Pemberian ASI Eksklusif 3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan 4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih 5. Menggunakan air bersih 6. Menggunakan jamban sehat 7. Memberantas jentik nyamuk 8. Konsumsi buah dan sayur 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari 10. Tidak merokok di dalam rumah
2.	Pengadaan Media Promosi Kesehatan berupa Poster, Leaflet, spanduk dan baliho	2015 s.d 2024	Dinas Kesehatan	Agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang hygiene dan perilaku hidup bersih	Masyarakat wilayah kerja puskesmas	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi cara mencuci tangan, PHBS di Rumah Tangga, PHBS di Sekolah,	Penggunaan Media Cetak untuk sosialisasi terhadap masyarakat

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
3.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2015-2024	Dinas Kesehatan	Untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 komponen, 1. penciptaan lingkungan yang mendukung 2. Peningkatan Kebutuhan sanitasi 3. Peningkatan Penyediaan sanitasi dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah.	Masyarakat wlayah kerja puskesmas se- • Rumah Tangga • Sekolah • Perangkat desa • TPKK Kecamatan dan Desa • Tokoh masyarakat desa • Natural Leader	Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis masyarakat(STBM) dengan 5 Pilar: • Stop Buang Air Besar Sembarangan • Cuci Tangan Pakai Sabun • Pengelolaan Air Minum dan Makanan • Pengelolaan sampah rumah tangga • Pengelolaan Limbah Cair Rumah tangga	Metode Pembelajaran dengan melaksanakan: • Pemicuan • Identifikasi Masalah • Pasca Pemicuan • Kampanye Ctps Masyarakat • Kampanye Ctps Sekolah • Pembuatan Peta Sanitasi • Penggunaan Media cetak dan Elektronik untuk sosialisasi kepada masyarakat

Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024

Tabel 2.12 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah

No.	Komponen	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1.	Air Limbah Domestik	Media Online	Umum	APBD	Menjaga Kesehatan mulai dari Keluarga dan Lingkungan	BAB tidak di sungai	Efektif
		Leaflet	Masyarakat umum	APBD	Perilaku ramah lingkungan termasuk pengelolaan air limbah rumah tangga	Peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan	Efektif
		Spanduk	Masyarakat umum	APBD	BAB di tempat yang aman	Awas KLB Diare	Efektif

2.2.2.Persampahan

2.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.13 Capaian akses layanan sampah daerah perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	2,2%
2	Penanganan Sampah	20,3%
3	Sampah Tidak Terkelola	9,2%
Wilayah Perdesaan		
1	Pengurangan Sampah	4,5%
2	Penanganan Sampah	1,6%
3	Sampah Tidak Terkelola	62,1%
T O T A L		100,0%

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.14 Timbulan sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	285,78
	Perkotaan	ton/hari	95,14
	Perdesaan	ton/hari	190,64
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	49
		% anorganik	51

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.15 Sub Sistem Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	0
	Pick Up	unit	1
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	0
	Pick Up	m3	2
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.16 Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	25
	Kontainer	unit	3
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	50
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	2
	Kontainer	m3	4
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,08
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	2
	Dump Truk	unit	9
	Pick Up	unit	2
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	10
	Dump Truk	m3	5
	Pick Up	m3	2
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	2

Sumber : Instrumen SSK 2024





Gambar 2.4 Dokumentasi Penampungan Sementara



Gambar 2.5 Dokumentasi Sarana Pengangkutan

Tabel 2.17 Sub Sistem Pengolahan Persampahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/Dinas/UPTD)	Status Aset
1	TPST	0	0	Tidak ada	0	0	Tidak ada	0	0	0	Seksi	Belum
2	TPST	0	0	Tidak ada	0	0	Tidak ada	0	0	0	Seksi	Belum

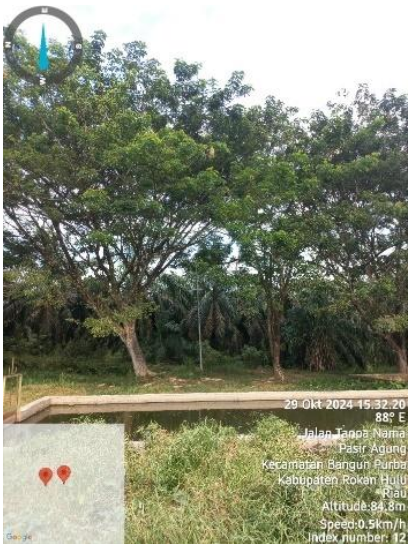
Sumber : Instrumen SSK 2024

Pemrosesan Akhir:

Tabel 2.18 Sub Sistem Pemrosesan Akhir Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	TPA 1	TPA 2
1	Nama dan Lokasi TPA		TPA Tanjung Belit	TPA Ujung Batu
	Wilayah Pelayanan		Kecamatan Rambah	Kec. Ujung Batu, Kec. Tandun (pasar), Kec. Kabun (pasar)
2	Tahun pembangunan		2005	2007
	Tahun Optimalisasi		-	-
	Usia Pakai TPA (tahun)		3	2
3	Status aset (pilih salah satu)		Sudah Aset Pemda	Sudah Aset Pemda
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	5,5	2
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	2	2
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Open Dumping	Open Dumping
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi	Beroperasi
8	Alat berat: <i>bulldozer, excavator, backhoe</i>	Unit	Buldozer 1 unit, Excavator 1 unit (rusak), Backhoe 1 unit (rusak)	Excavator 1 unit
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	-	-
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Jalan Tanah	jalan Tanah
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	30,36	32,22
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	0,07	0
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	tidak ada	tidak ada
14	Listrik	Gwh/hari	0	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		Dilakukan	Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	5	5

Sumber : Instrumen SSK 2024



Gambar 2.6 Dokumentasi TPA Tanjung Belit Kab. Rokan Hulu





Gambar 2.7 Dokumentasi TPA Ujung Batu Kab. Rokan Hulu

Pengurangan Sampah:

Tabel 2.19 Pengurangan Sampah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
1	TPS 3R	Batang Baih Desa Rambah Tengah Hilir, Kh. Dewantara RT 04 RW 1 (Dusun Simpang Tiga) Kec. Rambah (N. 00°54'10,3", E. 100°18'47,8")	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2016	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah
2	TPS 3R	TPS3R Mekar Saroha, Jl. Air Panas RT 06 RW 03 Dusun Pawan Hilir Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah (N. 00°51'01", E. 100°16'10,6")	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2016	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah
3	TPS 3R	TPS3R Samo Bersih, Jl. Sutan Tua RT 02 RW 6 Dusun Batang Samo Hulu Desa Suka Maju Kec. Rambah (N.	Optimal	2016	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi /Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
		00°50'35,4", E. 100°19'49,4")									
4	TPS 3R	TPS3R Pengiraian, RT 22 RW 10 Dusun Sebaya Desa Babussalam Kec. Rambah	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2015	tdk ada	tdk ada	0	0	0	KSM	Sudah
5	TPS3R	TPS3R Karya Utama Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2015	tdk ada	tdk ada	0,26	0,26	0	KSM	Sudah
6	Bank Sampah	Bank Sampah INDUK "Nad's Plastik", Jl. Lingkar Desa Koto Tinggi Kec. Rambah	Optimal	2017	tdk ada	daur ulang	1	1	0	Masyarakat	Sudah
7	Bank Sampah	Bank Sampah Unit "Bunut Mandiri", Jl. Raya Tangun RT 01 RW 01 Desa Tanjung Belit Dusun Sei Bunut Kec. Rambah (N. 00°52'33,33", E. 100°16'34,9")	Optimal	2018	tdk ada	daur ulang	0,204	0,204	0	Masyarakat	Sudah
8	Sektor Informal	Endang Kuswoyo, Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara (N 1°15'4", E	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,564	0,5375	0,0265	PD	Sudah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi /Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
		100°22") Hp 082386313754									
9	Sektor Informal	Suryanto, Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara 082389158434	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,3	0,3	0	PD	Sudah
10	Sektor Informal	Abdul Sani, Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara 82116094444	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	1,7	1,7	0	Masyarakat	Sudah
11	Sektor Informal	Hasibuan, Desa Bangun Jaya	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,7	0,7	0	Masyarakat	Sudah
12	Sektor Informal	Ucok, Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah
13	Sektor Informal	ud. Kali jaga, Desa Kumu Deli (PURWOTO 85365097307)	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,63	0,63	0	Masyarakat	Sudah
14	Sektor Informal	MAMA PATEL Desa BATAS (082286369663)	Optimal	2020	tdk ada	daur ulang	0,67	0,67	0	Masyarakat	Sudah
15	Sektor Informal	ASPAN LUBIS, Desa KUMU SEJATI (085271020380)	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,786	0,786	0	Masyarakat	Sudah
16	Sektor Informal	Tamba Desa Bangun Jaya	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,566	0,566	0	Masyarakat	Sudah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi /Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
17	Sektor Informal	ASRIZAL, Desa Batang Samo Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,266	0,266	0	Masyarakat	Sudah
18	Sektor Informal	Asrizal Heri, Desa Babasussalam Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,8	0,8	0	Masyarakat	Sudah
19	Sektor Informal	Mario, Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,8	0,8	0	Masyarakat	Sudah
20	Sektor Informal	Hotman saragih, Desa Pematang berangan Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,4	0,4	0	Masyarakat	Sudah
21	Sektor Informal	Kamdun, Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,38	0,38	0	Masyarakat	Sudah
22	Sektor Informal	wesley sitompul, Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah
23	Sektor Informal	Bu sari, Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah
24	Sektor Informal	Budi, Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,2	0,2	0	Masyarakat	Sudah
25	Sektor Informal	Yulianis, Desa Tanah datar Kec.	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,6	0,6	0	Masyarakat	Sudah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi /Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
		Ujung batu (0°42'9", 100°31'21")								akut	
26	Sektor Informal	Ujang, Desa ngaso Kec. Ujung batu	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,8	0,8	0	Masyarakat	Sudah
27	Sektor Informal	Beni Widodo, Desa Tranpol Kec. Ujung Batu (0°43'45", 100°31'3")	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,4	0,4	0	Masyarakat	Sudah
28	Sektor Informal	Asril, Kelurahan ujung Batu	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	3,95	3,95	0	Masyarakat	Sudah
29	Sektor Informal	SARIPUDDIN, Desa KUNTO Darussalam (0°50'8,6", 100°41'27,9")	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,35	0,35	0	Masyarakat	Sudah
30	Sektor Informal	ANDI, JL. GARUDA Desa Kunto Darussalam (049'54", 100°41'25") Hp 082172231222	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,11	0,11	0	Masyarakat	Sudah
31	Sektor Informal	SAPRIJAL, Desa SIMPANG BERINGIN Kec. RAMBAH HILIR (081378690590)	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,2	0,2	0	Masyarakat	Sudah
32	Sektor Informal	YASOPATI JALUKU, Desa SIPANG D. Kec. RAMBAH HILIR	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,52	0,52	0	Masyarakat	Sudah

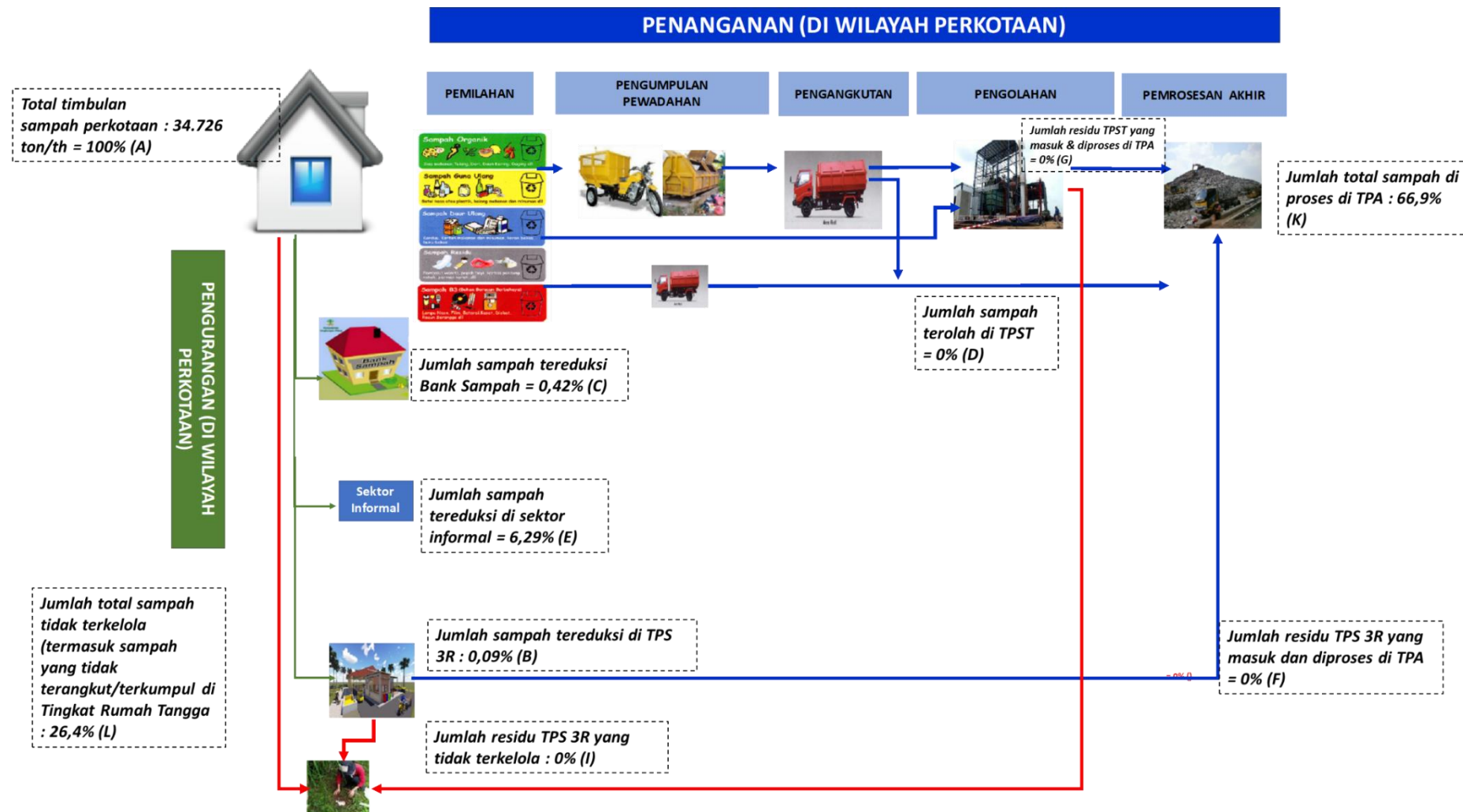
No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi /Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah)										
		(082172587869)									
33	Bank Sampah	IYUN, Desa SUNGAI KUNING Kec. RAMBAH SAMO	Optimal	2019	tdk ada	daur ulang	0,46	0,46	0	Masyarakat	Sudah

Sumber : Instrumen SSK 2024

Tabel 2.20 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2025-2029

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun : 2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	82,0%	80,0%	73,0%	66,9%	13,1%	6,1%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	18,0%	15,0%	10,0%	6,8%	8,2%	3,2%

Sumber : Instrumen SSK 2024



(Sumber : Instrumen SSK 2024)

Gambar 2.8 Rantai Layanan persampahan

2.2.2.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

2.2.2.2.1. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel 2.21 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah pengelolaan persampahan

PERANGKAT DAERAH	TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEDA, DLH	Perencanaan
DLH	Pengadaan Sarana
DLH	Pengelolaan
DLH	Pengaturan Dan Pembinaan
BAPPEDA, DLH	Monitoring Dan Evaluasi

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.22 Pemetaan tugas dan fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota,	BAPPEDA, DLH	–	–
• Menyusun rencana program persampahaan dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA, DLH	–	–
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA, DLH	–	–
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	DLH	–	–
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	DLH	–	–
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	DLH	–	–
• Menyediakan sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat embuangan Akhir (TPA)	DLH	–	–
• Membangun sarana TPA	DLH	–	–
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	DLH		
PENGELOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	DLH	-	-
• Mengelola sampah di TPS	DLH	-	-
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	DLH	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Mengelola TPA	DLH	-	-
• Melakukan pemilahan sampah	DLH	-	-
• Melakukan penarikan retribusi sampah	DLH	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	DPMPTSP, DLH	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	DLH	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	DLH	-	-
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	DLH	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	DLH	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	BAPPEDA, DLH	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	BAPPEDA, DLH	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	BAPPEDA, DLH	-	-

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.2.2.2. Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.23 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional
1	TPS 3R	Batang Baih	Kelompok Swadaya	5	-	Desa Rambah Tengah Hilir	-
2	TPS 3R	TPS3R Mekar	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	-	Desa Rambah	-
3	TPS 3R	TPS3R Samo Bersih	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	-	Desa Suka Maju Kec. Rambah	-
4	TPS 3R	TPS3R Pengiraian	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	-	Desa Babussalam	-
5	TPS 3R	TPS3R Karya Utama	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	daur ulang	Desa Pasir Utama	Iuran Warga
6	Bank Sampah	Bank Sampah INDUK "Nad's Bersih"	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	daur ulang	Desa Koto Tinggi	Iuran Warga
7	Bank Sampah	Bank Sampah Unit	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	daur ulang	Desa Tanjung Belit	Iuran Warga
8	Sektor Informal	Endang Kuswoyo	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara	pribadi
9	Sektor Informal	Suryanto	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara	pribadi
10	Sektor Informal	Abdul Sani	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara	pribadi
11	Sektor Informal	Hasibuan	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Bangun Jaya	pribadi
12	Sektor Informal	Ucok	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara	pribadi
13	Sektor Informal	ud. Kali jaga	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Kumu Deli	pribadi
14	Sektor Informal	MAMA PATEL	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa BATAS	pribadi
15	Sektor Informal	ASPAN LUBIS	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa KUMU SEJATI	pribadi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional
16	Sektor Informal	Tamba	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Bangun Jaya	pribadi
17	Sektor Informal	ASRIZAL	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Batang Samo Kec. Rambah	pribadi
18	Sektor Informal	Asrizal Heri	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Babasussalam Kec. Rambah	pribadi
19	Sektor Informal	Mario	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	pribadi
20	Sektor Informal	Hotman saragih	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Pematang berangan Kec. Rambah	pribadi
21	Sektor Informal	Kamdun	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	pribadi
22	Sektor Informal	wesley sitompul	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	pribadi
23	Sektor Informal	Bu sari	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	pribadi
24	Sektor Informal	Budi	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu	pribadi
25	Sektor Informal	Yulianis	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Tanah datar Kec. Ujung batu	pribadi
26	Sektor Informal	Ujang	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa ngaso Kec. Ujung batu	pribadi
27	Sektor Informal	Beni Widodo	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Tranpol Kec. Ujung Batu	pribadi
28	Sektor Informal	Asril	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Kelurahan ujung Batu	pribadi
29	Sektor Informal	SARIPUDDIN	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa KUNTO Darussalam	pribadi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional
30	Sektor Informal	ANDI	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa Kunto Darussalam	pribadi
31	Sektor Informal	SAPRIJAL	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa SIMPANG BERINGIN Kec. RAMBAH HILIR	pribadi
32	Sektor Informal	YASOPATI JALUKU	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa SIPANG D. Kec. RAMBAH HILIR	pribadi
33	Sektor Informal	IYUN	Kelompok Swadaya Masyarakat.	5	Pengompo san, daur ulang	Desa SUNGAI KUNING Kec. RAMBAH SAMO	pribadi

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.2.2.3. Pemetaan pemangku kepentingan diluar Pemda

Tabel 2.24 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan

Pemangku kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan.
Pengusaha / Swasta: - PT. PN V	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER	- Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan dalam rangka penuntasan persampahan.
Organisasi Massa (Ormas): - Laskar Melayu Bersatu	- Meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan Melayu	- Adanya dana organisasi bidang kesejahteraan anak kemenakan Melayu.

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.25 kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan persampahan dalam APBD. - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan.	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta	- Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan dalam rangka penuntasan akses persampahan	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Sedang	Sedang	Tidak
Organisasi Massa (Ormas): - Laskar Melayu Bersatu	- Pemanfaatan dana kesejahteraan masyarakat.	-	Tinggi	Sedang	Tidak

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.2.3 Regulasi

Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

Tabel 2.26 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan

Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
No			
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	Tidak Ada
		✓	-
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah sebutkan.	-	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten Rokan Hulu	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam Mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada

Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
No			
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Bab IV (Pasal 9 – Pasal 18) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang, Masyarakat dan Pelaku Usaha	-
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Bab VI Pasal 31 Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah	-
c	Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	BAB V Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 19, Paragraf 1 Pasal 20,	-
d	Substansi pengaturan: Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>)	BAB V Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 19, Paragraf 2 Pasal 21-Pasal 28	-
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	BAB VII Bagian Kesatu Pasal 32 Pembiayaan	-
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	BAB VII Bagian Kedua Pasal 33 Kompensasi	-
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	BAB XI Peran Masyarakat Pasal 39-Pasal 41	-
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	BAB XII Larangan Pasal 42 BAB XVII Ketentuan Pidana	-
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	BAB X I II Pembinaan dan Pengawasan Pasal 43-Pasal 44	-
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	BAB XVI Sanksi Administratif	-
k	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	✓
l	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1. Perbup pengelolaan 2. Perbup Retribusi	-

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.2.4 Komunikasi dan Media (Persampahan)

Tabel 2.27 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (persampahan)

No.	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sehat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sektor Persampahan	2015 s.d 2024	Dinas Lingkungan Hidup	Agar Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat terkait persampahan	- Perangkat Desa - TPKK Kecamatan dan Desa - Tokoh masyarakat desa - Kader Kesehatan	Pengelola an sampah yang tepat di setiap desa dan kelurahan	Metode Pembelajaran Ceramah Tanya Jawab dengan topik seperti: 1. Pengelolaan sampah organik pedesaan dengan komposting 2. Pengelolaan sampah anorganik di perdesaan dengan membuat lubang di belakang rumah bukan dengan cara membakar sampah 3. Sosialisasi pengurangan sampah dengan 3R

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.28 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait pengelolaan Persampahan

No.	Komponen	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1.	Persampahan	Leaflet / Spanduk	Umum	APBD	Global Warming	Go Green	Efektif

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2.3.Drainase Lingkungan

Jaringan drainase di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Secara umum, kondisi drainase di Kabupaten masih belum memadai karena berbagai hal misalnya sistem jaringan yang ada belum terpadu dan terpola dengan baik, sebagian besar kondisi salurannya terputus, fisik saluran masih berupa tanah.

Sistem pengaliran umumnya masih mengandalkan sistem gravitasi. Selain itu, kondisi drainase yang ada di Kabupaten Rokan Hulu masih berupa tanah. Keadaan ini menyebabkan besarnya potensi gerusan atau erosi terutama di daerah yang mempunyai tingkat kemiringan lereng sedang sampai dengan tinggi. Banyaknya daerah cekungan dengan tidak dilengkapi saluran drainase yang memadai terhadap timbulnya genangan-genangan akibat arus pembuangan air hujan yang kurang lancar. Dan lagi, curah hujan yang besar

sementara saluran drainase yang tersedia relatif kecil rawan terkadi luapan akibat debit air hujan yang melebihi daya tampung saluran drainasenya.

Tabel 2.29 Lokasi dan perkiraan Luas Genangan

No	Nama Kecamatan/ Kelurahan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket.
		(Ha)	(M)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	ROKAN IV KOTO	1.224	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
2	PENDALIAN IV KOTO	84	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
3	TANDUN	675	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
4	KABUN	70	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
5	UJUNG BATU	49	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
6	RAMBAH SAMO	158	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
7	RAMBAH	1.330	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
8	RAMBAH HILIR	288	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
9	BANGUN PURBA	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
10	TAMBUSAI	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
11	TAMBUSAI UTARA	-	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
12	KEPENUHAN	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
13	KEPENUHAN HULU	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
14	KUNTO DARUSSALAM	-	>30 cm	>2 jam	>1	hujan	-	-
15	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-
16	BONAI DARUSSALAM	-	>30 cm	>2 jam	>1	Hujan/Pasut	-	-

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 2.30 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Berfungsi	Tdk berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1	Saluran Drainase	m	85.000	65.500	19.500	-
	S. Primer A	m	-	-	-	-
	S. Primer B	m	-	-	-	-
2	Saluran Sekunder		56.000	50.500	5.500	

	Saluran Sekunder A1	m	-	-	-	-
	Saluran Sekunder A2	m	-	-	-	-
	Saluran Sekunder B1	m	-	-	-	-
3.	Bangunan Pelengkap					
	Rumah Pompa	unit	17	10	7	-
	Pintu Air	unit	47	40	7	-

Sumber : Data Sekunder 2024

2.2. Area Beresiko

2.3.1. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Tabel 2.31 Area Beresiko Air Limbah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
1	UJUNG BATU	Ujung Batu	4
2	RAMBAH	Pasir Pengaraian	4
3	BONAI DARUSSALAM	Bonai	4
4	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	3
5	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	3
6	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	3
7	TANDUN	Tandun	3
8	TANDUN	Koto Tandun	3
9	TANDUN	Tandun Barat	3
10	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	3
11	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	3
12	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	3
13	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	3
14	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	3
15	RAMBAH	Suka Maju	3
16	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	3
17	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	3
18	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	3
19	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	3
20	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	3
21	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	3
22	BANGUN PURBA	Bangun Purba	3
23	BANGUN PURBA	Pasir Agung	3
24	TAMBUSAI	Tambusai Barat	3
25	TAMBUSAI	Batas	3
26	TAMBUSAI	Rantau Panjang	3
27	TAMBUSAI	Sukamaju	3
28	TAMBUSAI	Tingkok	3
29	TAMBUSAI UTARA	Payung Sekaki	3
30	TAMBUSAI UTARA	Tambusai Utara	3
31	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	3
32	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	3
33	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	3
34	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
35	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	3
36	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	3
37	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	3
38	BONAI DARUSSALAM	Kasang Padang	3
39	BONAI DARUSSALAM	Kasang Mungkal	3
40	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hulu	2
41	ROKAN IV KOTO	Cipang Kanan	2
42	ROKAN IV KOTO	Tibawan	2
43	PENDALIAN IV KOTO	Pendalian	2
44	PENDALIAN IV KOTO	Bengkolan Salak	2
45	PENDALIAN IV KOTO	Air Panas	2
46	TANDUN	Kumain	2
47	TANDUN	Bono Tapung	2
48	TANDUN	Dayo	2
49	TANDUN	Tapung Jaya	2
50	TANDUN	Puo Raya	2
51	TANDUN	Sungai Kuning	2
52	UJUNG BATU	Ujung Batu Timur	2
53	UJUNG BATU	Ngaso	2
54	UJUNG BATU	Suka Damai	2
55	UJUNG BATU	Pematang Tebih	2
56	RAMBAH SAMO	Rambah Samo Barat	2
57	RAMBAH SAMO	Rambah Samo	2
58	RAMBAH SAMO	Rambah Baru	2
59	RAMBAH SAMO	Rambah Utama	2
60	RAMBAH SAMO	Pasir Makmur	2
61	RAMBAH SAMO	Langkitin	2
62	RAMBAH SAMO	Sungai Salak	2
63	RAMBAH SAMO	Lubuk Bilang	2
64	RAMBAH SAMO	Sungai Kuning	2
65	RAMBAH	Menaming	2
66	RAMBAH	Rambah Tengah Hulu	2
67	RAMBAH	Rambah Tengah Barat	2
68	RAMBAH	Rambah Tengah Utara	2
69	RAMBAH	Rambah Tengah Hilir	2
70	RAMBAH	Pasir Baru	2
71	RAMBAH	Tanjung Belit	2
72	RAMBAH	Sialang Jaya	2
73	RAMBAH	Koto Tinggi	2
74	RAMBAH	Pematang Berangan	2
75	RAMBAH	Babussalam	2
76	RAMBAH	Pasir Maju	2
77	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	2
78	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	2
79	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	2
80	BANGUN PURBA	Pasir Intan	2
81	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	2
82	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	2
83	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
84	BANGUN PURBA	Tangun	2
85	TAMBUSAI	Sungai Kumango	2
86	TAMBUSAI	Tali Kumain	2
87	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	2
88	TAMBUSAI	Sialang Rindang	2
89	TAMBUSAI	Tambusai Timur	2
90	TAMBUSAI	Batang Kumu	2
91	TAMBUSAI	Lubuk Soting	2
92	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	2
93	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	2
94	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	2
95	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	2
96	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	2
97	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	2
98	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	2
99	TAMBUSAI UTARA	Mahato	2
100	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	2
101	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	2
102	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	2
103	KEPENUHAN	Ulak Patian	2
104	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	2
105	KEPENUHAN HULU	Kepayang	2
106	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	2
107	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	2
108	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	2
109	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	2
110	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kuti	2
111	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	2
112	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	2
113	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	2
114	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	2
115	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	2
116	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	2
117	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	2
118	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	2
119	BONAI DARUSSALAM	Sontang	2
120	BONAI DARUSSALAM	Pauh	2
121	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	1
122	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	1
123	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	1
124	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	1
125	ROKAN IV KOTO	Rokan	1
126	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	1
127	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	1
128	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	1
129	ROKAN IV KOTO	Alahan	1
130	ROKAN IV KOTO	Pemandang	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
131	KABUN	Kabun	1
132	KABUN	Aliantan	1
133	KABUN	Koto Ranah	1
134	KABUN	Bencah Kesuma	1
135	KABUN	Batu Langkah Besar	1
136	KABUN	Giti	1
137	RAMBAH HILIR	Rambah	1
138	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	1
139	RAMBAH HILIR	Muara Musu	1
140	RAMBAH HILIR	Sejati	1
141	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	1
142	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	1
143	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	1
144	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	1
145	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	1

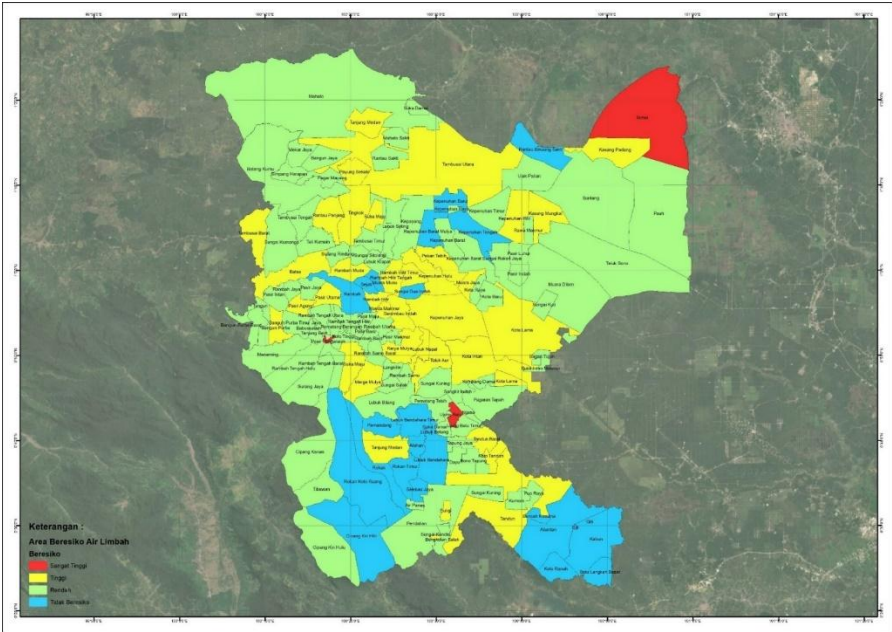
Sumber : Instrumen SSK 2024

Faktor pengaruh resiko :

- 1. Angka IRS (indek resiko sanitasi / EHRA)
- 2. Angka kemiskinan
- 3. Data sekunder
- 4. Jumlah penduduk
- 5. Kepadatan penduduk
- 6. Fungsi Urban -Urban/rural
- 7. Persepsi OPD

Keterangan :

- Area beresiko 4 = Resiko Sangat Tinggi
- Area beresiko 3 = Resiko Tinggi
- Area beresiko 2 = Resiko Rendah
- Area beresiko 1 = Tidak beresiko



(sumber : Instrumen SSK 2024)

Gambar 2.9 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik
Tabel 2.32 Permasalahan Mendesak Air Limbah
Pemetaan Permasalahan SPALD Setempat

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran Serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pengolahan Setempat	- Akses Layak Individu = 81,0% - Akses Belum Layak = 3,50 - BABS = 5,45%	Perda masih kurang optimal/sosialisasi belum optimal	UPTD belum ada, masih dibawah dinas (Perkim)	- Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian ada tetapi kemampuan ekonomi rendah. - Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian tidak ada padahal ekonomi mampu.	- Adanya MBR. - Bantuan pendanaan akan tangkisep tick individual dari Swasta belum ada.
Sub Sistem Penyedotan	Penyedotan = 0%			Sebagian masyarakat ada melakukan penyedotan oleh swasta tetapi tidak dibuang ke IPLT dan data tersebut tidak tercatat/tdk diketahui.	
Sub Sistem Pengangkutan	- Ada truck tinja 1 Unit Milik Pemda, tidak berfungsi i. - Truck swasta ada tapi tidak tercatat.				
Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja	IPLT belum berfungsi maksimal				
Sub Sistem Pembuangan/Reuse Yang Aman	Akses Aman = 1,19% (SPALDS 2020 sd 2024 tetapi tidak melakukan penyedotan untuk diolah ke IPLT)				

Sumber : Data Sekunder, Instrumen SSK 2024

Pemetaan Permasalahan SPALD Terpusat

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pelayanan	Akses Aman = 0,20% (518 SR)	Perda masih kurang optimal/sosialisasi belum optimal	KSM Sebagian tidak berjalan, sehingga bangunan IPALD tidak terawat.	- Rasa akan memiliki Prasarana IPALD masih minim. - Sebagian Masyarakat memutuskan SR nya dari IPALD karena membangun sendiri Tangkiseptik nya	Iuran untuk operasional IPALD masih minim.
Sub Sistem Pengumpulan/Pengangkutan					
Sub Sistem PENGOLAHAN TERPUSAT					
Sub Sistem PEMBUANGAN/REUSE YANG AMAN	Pemeriksaan Effluen Semesteran Tidak Dilakukan				

Sumber : Data Sekunder, Instrumen SSK 202

2.3.2. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

Tabel 2.33 Area Beresiko Persampahan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
1	UJUNG BATU	Ujung Batu	4
2	RAMBAH	Pasir Pengaraian	4
3	BANGUN PURBA	Bangun Purba	4
4	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	4
5	BONAI DARUSSALAM	Bonai	4
6	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hulu	3
7	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	3
8	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	3
9	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	3
10	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	3
11	ROKAN IV KOTO	Rokan	3
12	ROKAN IV KOTO	Cipang Kanan	3
13	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	3
14	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	3
15	ROKAN IV KOTO	Tibawan	3
16	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	3
17	ROKAN IV KOTO	Alahan	3
18	ROKAN IV KOTO	Pemandang	3
19	PENDALIAN IV KOTO	Pendalian	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
20	PENDALIAN IV KOTO	Bengkolan Salak	3
21	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	3
22	PENDALIAN IV KOTO	Air Panas	3
23	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	3
24	TANDUN	Kumain	3
25	TANDUN	Bono Tapung	3
26	TANDUN	Dayo	3
27	TANDUN	Tapung Jaya	3
28	TANDUN	Tandun	3
29	TANDUN	Puo Raya	3
30	TANDUN	Koto Tandun	3
31	TANDUN	Tandun Barat	3
32	KABUN	Koto Ranah	3
33	KABUN	Giti	3
34	UJUNG BATU	Ujung Batu Timur	3
35	UJUNG BATU	Ngaso	3
36	UJUNG BATU	Suka Damai	3
37	UJUNG BATU	Pematang Tebih	3
38	RAMBAH SAMO	Rambah Samo Barat	3
39	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	3
40	RAMBAH SAMO	Rambah Samo	3
41	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	3
42	RAMBAH SAMO	Rambah Baru	3
43	RAMBAH SAMO	Rambah Utama	3
44	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	3
45	RAMBAH SAMO	Langkitin	3
46	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	3
47	RAMBAH SAMO	Sungai Salak	3
48	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	3
49	RAMBAH SAMO	Lubuk Bilang	3
50	RAMBAH	Menaming	3
51	RAMBAH	Rambah Tengah Hulu	3
52	RAMBAH	Rambah Tengah Barat	3
53	RAMBAH	Rambah Tengah Hilir	3
54	RAMBAH	Pasir Baru	3
55	RAMBAH	Tanjung Belit	3
56	RAMBAH	Sialang Jaya	3
57	RAMBAH	Suka Maju	3
58	RAMBAH	Pasir Maju	3
59	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	3
60	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	3
61	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	3
62	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	3
63	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	3
64	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	3
65	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	3
66	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	3
67	RAMBAH HILIR	Rambah	3
68	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
69	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	3
70	RAMBAH HILIR	Muara Musu	3
71	RAMBAH HILIR	Sejati	3
72	BANGUN PURBA	Pasir Agung	3
73	BANGUN PURBA	Pasir Intan	3
74	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	3
75	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	3
76	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	3
77	BANGUN PURBA	Tangun	3
78	TAMBUSAI	Tambusai Barat	3
79	TAMBUSAI	Sungai Kumango	3
80	TAMBUSAI	Batas	3
81	TAMBUSAI	Tali Kumain	3
82	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	3
83	TAMBUSAI	Rantau Panjang	3
84	TAMBUSAI	Sialang Rindang	3
85	TAMBUSAI	Tambusai Timur	3
86	TAMBUSAI	Sukamaju	3
87	TAMBUSAI	Batang Kumu	3
88	TAMBUSAI	Tingkok	3
89	TAMBUSAI	Lubuk Soting	3
90	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	3
91	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	3
92	TAMBUSAI UTARA	Payung Sekaki	3
93	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	3
94	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	3
95	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	3
96	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	3
97	TAMBUSAI UTARA	Tambusai Utara	3
98	TAMBUSAI UTARA	Mahato	3
99	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	3
100	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	3
101	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	3
102	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	3
103	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	3
104	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	3
105	KEPENUHAN	Ulak Patian	3
106	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	3
107	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	3
108	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	3
109	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	3
110	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	3
111	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	3
112	KEPENUHAN HULU	Kepayang	3
113	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	3
114	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	3
115	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	3
116	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
117	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	3
118	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kuti	3
119	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	3
120	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	3
121	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	3
122	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	3
123	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	3
124	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	3
125	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	3
126	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	3
127	BONAI DARUSSALAM	Sontang	3
128	BONAI DARUSSALAM	Pauh	3
129	BONAI DARUSSALAM	Kasang Padang	3
130	BONAI DARUSSALAM	Kasang Mungkal	3
131	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	2
132	RAMBAH SAMO	Pasir Makmur	2
133	RAMBAH SAMO	Sungai Kuning	2
134	RAMBAH	Rambah Tengah Utara	2
135	RAMBAH	Koto Tinggi	2
136	RAMBAH	Pematang Berangan	2
137	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	2
138	TANDUN	Sungai Kuning	1
139	KABUN	Kabun	1
140	KABUN	Aliantan	1
141	KABUN	Bencah Kesuma	1
142	KABUN	Batu Langkah Besar	1
143	RAMBAH	Babussalam	1
144	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	1
145	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	1

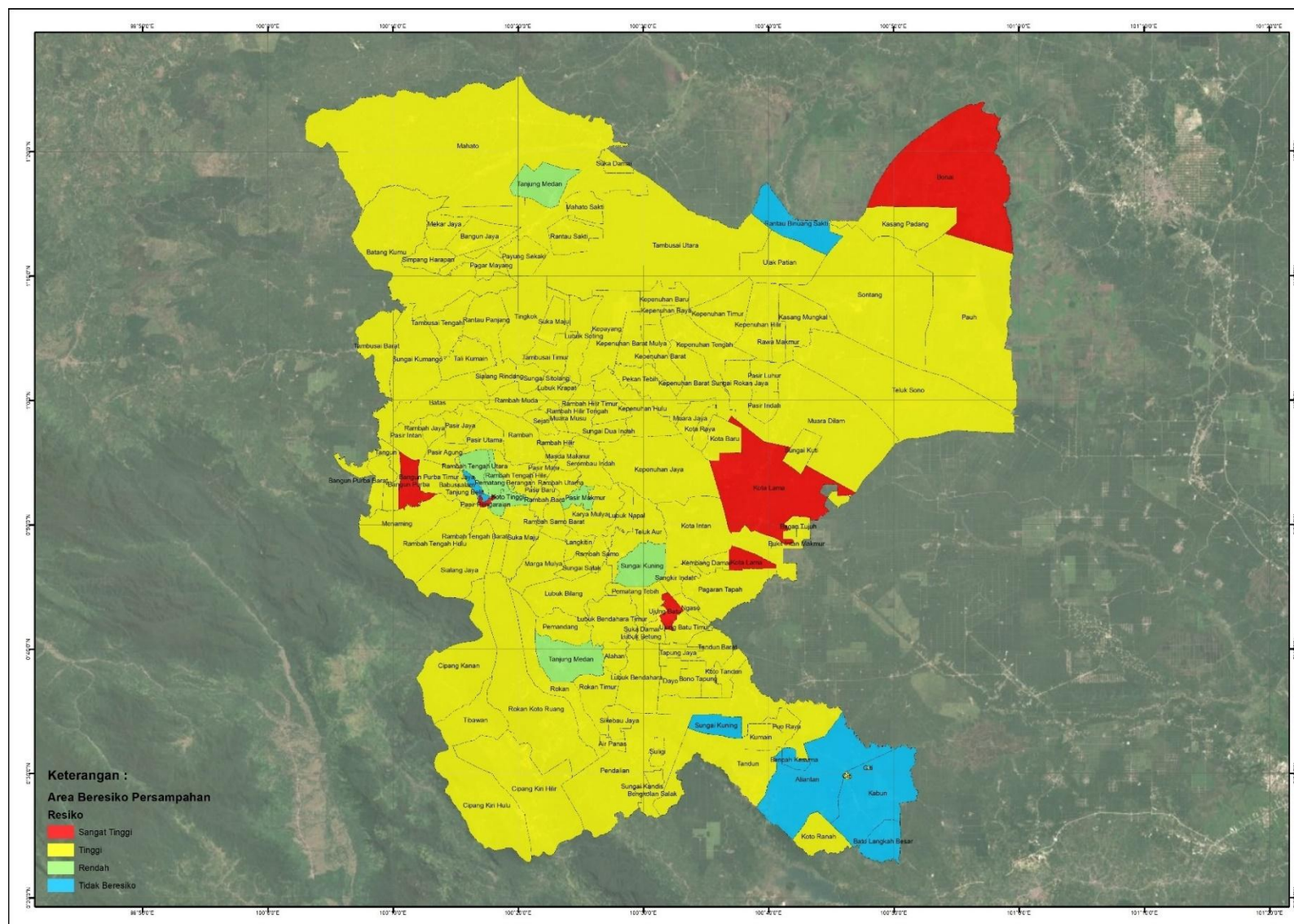
Sumber : Instrumen SSK 2024

Faktor pengaruh resiko :

- 8. Angka IRS (indek resiko sanitasi / EHRA)
- 9. Angka kemiskinan
- 10. Data sekunder
- 11. Jumlah penduduk
- 12. Kepadatan penduduk
- 13. Fungsi Urban -Urban/rural
- 14. Persepsi OPD

Keterangan :

- Area beresiko 4 = Resiko Sangat Tinggi
- Area beresiko 3 = Resiko Tinggi
- Area beresiko 2 = Resiko Rendah
- Area beresiko 1 = Tidak beres



Gambar 2.10 Peta Area Beresiko Persampahan
Tabel 2.34 Permasalahan Mendesak Persampahan

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pemilahan	- Pemilahan dimasyarakat masih tidak ada data - Pengurangan sampah wilayah perkotaan 6,8%, ada GAP 8,2% (2029)	Perda kurang berjalan optimal	- SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas dimana masih Kurangnya personil yang kompeten dalam penanganan sampah yang menguasai teknis pengelolaan persampahan. - Kelembagaan dimasyarakat belum optimal.	- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. - Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya terhadap akses informasi, dan mengolah sampah secara benar dan membuang sampah disembarang tempat. - Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/keompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	- Minimnya pendanaan dari APBD Kabupaten. - Belum ada penggalan pendanaan dari sektor swasta.
Sub Sistem Pewadahan dan Pengumpulan	- TPS tidak tersebar merata sehingga Masyarakat menumpuk sampah pada titik titik TPS Liar. - Terbatasnya sarana prasarana (seperti tempat penampungan sampah sementara (TPS), kontainer, bin/tong, bak permanen) diwilayah perkotaan yang menjadi layanan TPA.				
Sub Sistem Pengangkutan	Sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan terbatas/minim dan sudah berumur tua			Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/keompok masyarakat dalam pengangkutan persampahan.	

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pengolahan	- Sampah belum terolah secara optimal seperti sampah organik menjadi kompos. - TPS3R belum berfungsi optimal (1 TPS3R berfungsi, 4 tidak berfungsi) - Bank sampah cuman ada 3 unit, masih kurang. - TPST belum ada.			- Kurangnya sosialisasi, edukasi dan penyadaran. - Belum dikembangkanya potensi masyarakat secara sistematis. - Tidak ada investasi dunia usaha / swasta. - Belum adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.	
Sub Sistem Pemrosesan Akhir	- Penanganan Perkotaan masih minim 66,9% - Usia alat berat sudah tua tingkat kerusakan cukup tinggi - Kondisi TPA/Landfil aktif sudah mendekati batas ketentuan daya tampung/overload. - Laboratorium, Hanggar Alat Berat tidak memadai.				

Sumber : Data Sekunder Instrumen SSK 2024

2.3.3. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase

Tabel 2.35 Area Beresiko Drainase

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
1	RAMBAH	Pasir Pengaraian	4
2	UJUNG BATU	Ujung Batu	3
3	RAMBAH SAMO	Sungai Kuning	3
4	RAMBAH	Babussalam	3
5	KEPENUHAN	Ulak Patian	3
6	BONAI DARUSSALAM	Kasang Padang	3
7	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	2
8	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	2
9	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	2
10	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	2
11	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hulu	1
12	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	1
13	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	1
14	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	1
15	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	1
16	ROKAN IV KOTO	Rokan	1
17	ROKAN IV KOTO	Cipang Kanan	1
18	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	1
19	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	1
20	ROKAN IV KOTO	Tibawan	1
21	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	1
22	ROKAN IV KOTO	Alahan	1
23	ROKAN IV KOTO	Pemandang	1
24	PENDALIAN IV KOTO	Pendalian	1
25	PENDALIAN IV KOTO	Bengkolan Salak	1
26	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	1
27	PENDALIAN IV KOTO	Air Panas	1
28	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	1
29	TANDUN	Kumain	1
30	TANDUN	Bono Tapung	1
31	TANDUN	Dayo	1
32	TANDUN	Tapung Jaya	1
33	TANDUN	Tandun	1
34	TANDUN	Puo Raya	1
35	TANDUN	Sungai Kuning	1
36	TANDUN	Koto Tandun	1
37	TANDUN	Tandun Barat	1
38	KABUN	Kabun	1
39	KABUN	Aliantan	1
40	KABUN	Koto Ranah	1
41	KABUN	Bencah Kesuma	1
42	KABUN	Batu Langkah Besar	1
43	KABUN	Giti	1
44	UJUNG BATU	Ujung Batu Timur	1
45	UJUNG BATU	Ngaso	1
46	UJUNG BATU	Suka Damai	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
47	UJUNG BATU	Pematang Tebih	1
48	RAMBAH SAMO	Rambah Samo Barat	1
49	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	1
50	RAMBAH SAMO	Rambah Samo	1
51	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	1
52	RAMBAH SAMO	Rambah Baru	1
53	RAMBAH SAMO	Rambah Utama	1
54	RAMBAH SAMO	Pasir Makmur	1
55	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	1
56	RAMBAH SAMO	Langkitin	1
57	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	1
58	RAMBAH SAMO	Sungai Salak	1
59	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	1
60	RAMBAH SAMO	Lubuk Bilang	1
61	RAMBAH	Menaming	1
62	RAMBAH	Rambah Tengah Hulu	1
63	RAMBAH	Rambah Tengah Barat	1
64	RAMBAH	Rambah Tengah Utara	1
65	RAMBAH	Rambah Tengah Hilir	1
66	RAMBAH	Pasir Baru	1
67	RAMBAH	Tanjung Belit	1
68	RAMBAH	Sialang Jaya	1
69	RAMBAH	Koto Tinggi	1
70	RAMBAH	Suka Maju	1
71	RAMBAH	Pematang Berangan	1
72	RAMBAH	Pasir Maju	1
73	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	1
74	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	1
75	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	1
76	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	1
77	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	1
78	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	1
79	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	1
80	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	1
81	RAMBAH HILIR	Rambah	1
82	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	1
83	RAMBAH HILIR	Muara Musu	1
84	RAMBAH HILIR	Sejati	1
85	BANGUN PURBA	Bangun Purba	1
86	BANGUN PURBA	Pasir Agung	1
87	BANGUN PURBA	Pasir Intan	1
88	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	1
89	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	1
90	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	1
91	BANGUN PURBA	Tangun	1
92	TAMBUSAI	Tambusai Barat	1
93	TAMBUSAI	Sungai Kumango	1
94	TAMBUSAI	Batas	1
95	TAMBUSAI	Tali Kumain	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
96	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	1
97	TAMBUSAI	Rantau Panjang	1
98	TAMBUSAI	Sialang Rindang	1
99	TAMBUSAI	Tambusai Timur	1
100	TAMBUSAI	Sukamaju	1
101	TAMBUSAI	Batang Kumu	1
102	TAMBUSAI	Tingkok	1
103	TAMBUSAI	Lubuk Soting	1
104	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	1
105	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	1
106	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	1
107	TAMBUSAI UTARA	Payung Sekaki	1
108	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	1
109	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	1
110	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	1
111	TAMBUSAI UTARA	Tambusai Utara	1
112	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	1
113	TAMBUSAI UTARA	Mahato	1
114	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	1
115	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	1
116	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	1
117	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	1
118	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	1
119	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	1
120	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	1
121	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	1
122	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	1
123	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	1
124	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	1
125	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	1
126	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	1
127	KEPENUHAN HULU	Kepayang	1
128	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	1
129	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	1
130	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	1
131	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	1
132	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	1
133	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	1
134	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kuti	1
135	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	1
136	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	1
137	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	1
138	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	1
139	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	1
140	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	1
141	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	1
142	BONAI DARUSSALAM	Sontang	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tingkat Resiko
143	BONAI DARUSSALAM	Bonai	1
144	BONAI DARUSSALAM	Pauh	1
145	BONAI DARUSSALAM	Kasang Mungkal	1

Sumber : Instrumen SSK 2024

Faktor pengaruh resiko :

1. Angka IRS (indek resiko sanitasi / EHRA)
2. Angka kemiskinan
3. Data sekunder
4. Jumlah penduduk
5. Kepadatan penduduk
6. Fungsi Urban -Urban/rural
7. Persepsi OPD

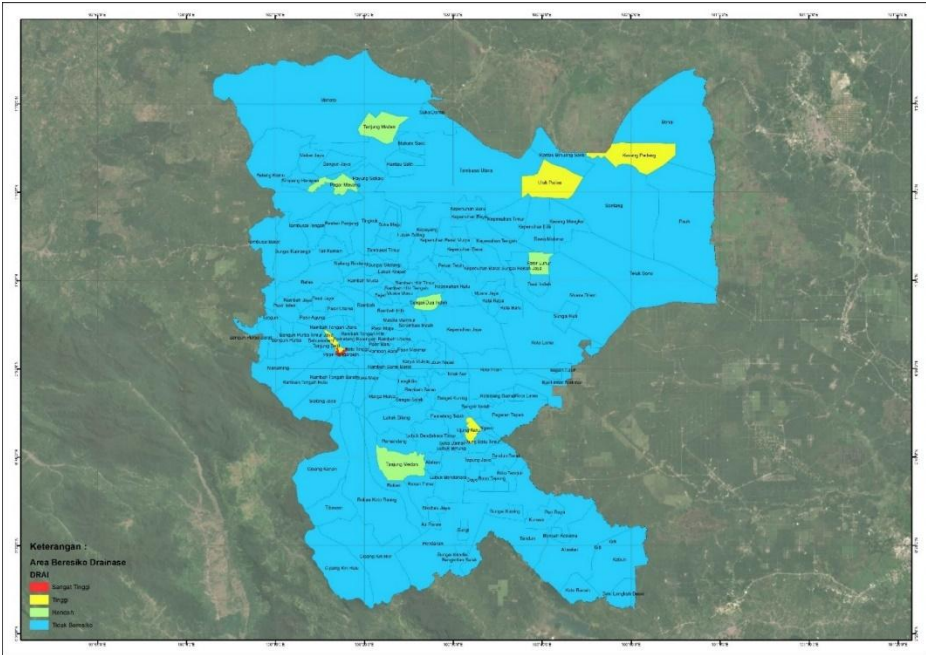
Keterangan :

- Area beresiko 4 = Resiko Sangat Tinggi
- Area beresiko 3 = Resiko Tinggi
- Area beresiko 2 = Resiko Rendah
- Area beresiko 1 = Tidak beresiko

Tabel 2.36 Permasalahan Mendesak Drainase

Permasalahan Mendesak	
Teknis	
User Interface	Berdasarkan Data EHRA : - Rumah tangga yang mengalami banjir secara rutin di Kab. Rokan Hulu : 39,4 % - Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari : 49,6 % - Adanya terjadi genangan air (banjir) : 28,9 % Berdasarkan Analisi Intrumen Profil Luas area pemukiman rawan genangan/banjir 3,878 (ha) atau 5 % dari luas area terbangun
Penampungan	Gray water masih bercampur dengan saluran drainase Penanganan drainase masih belum terpadu.
Non Teknis	
Aspek Peraturan dan perundangan	- Belum adanya Perda tentang pengelolaan drainase skala kabupaten. - Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase.
Aspek Regulasi	Belum ada perda pengelolaan drainase
Aspek Masyarakat	- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi drainase. - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran drainase yang ada.
Aspek Komunikasi	Belum ada media dialog dan komunikasi ke masyarakat pentingnya pengelolaan drainase lingkungan
Aspek Pendanaan	Belum optimalnya pendanaan untuk sektor Drainase lingkungan.

Sumber : Study EHRA dan data sekunder 2024



Area beresiko drainase

BAB 3.
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program. Kabupaten Rokan Hulu telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu.

Pokja PKP telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang diturunkan dari visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam RPJMD. Tabel di bawah ini merupakan gambaran tentang Visi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dan Misi per-subsektor.

Tabel 3.1 Visi Dan Misi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu

Visi Kab. Rokan Hulu	Misi Kab. Rokan Hulu	Visi Sanitasi Kab. Rokan Hulu	Misi Sanitasi Kab. Rokan Hulu
“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai-nilai Agama Menuju Masyarakat Sejahtera”	1. Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Misi 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah. 3. Misi 3: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 4. Misi 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda. 5. Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.	“TERWUJUDN YA SANITASI AMAN DAN BERKELANJU TAN MENUJU ROKAN HULU LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING”	Misi Air Limbah Domestik: 1. Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah domestik. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik. 4. Meningkatkan kualitas SDM pengelola air limbah domestik. Misi Persampahan: 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan cakupan layanan dan peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan.

Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 2 (dua) sektor yaitu Air Limbah Domestik dan Persampahan.

a. Air Limbah Domestik

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan sektor Air Limbah

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Tercapainya Sanitasi yang berkelanjutan dengan peningkatan akses aman dalam pengelolaan air limbah domestik.	1. Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. 2. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. 3. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. 4. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029. 5. Adanya jadwal operasional truk tinja sesuai layanan IPLT. 6. Dioperasionalkannya IPLT. 7. Adanya Sosialisai Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. 8. Adanya/terbentuknya dan Pengesahan UPTD sebagai lembaga Air Limbah Domestik yang memisahkan regulator dan Operator untuk mendukung L2T2. 9. Tersedianya kapasitas SDM operator yang berdaya, dan memahami operasional IPAL/IPLT serta manajerial. 10. Tersusunnya rencana kerja UPTD baru. 11. Adanya bantuan Tangkiseptick untuk MBR. 12. Adanya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam kegiatan Promosi/	1. Masih ada BABS sebesar 5,45% (8.154 KK) 2. Masih ada akses belum layak sebesar 3,5%. 3. Akses Layak masih 91,05%. 4. Akses Aman masih rendah sebesar 1,39%. 5. Penyedotan Tangkiseptick dari RT ke IPLT sebesar 0% 6. Belum diopersionalkannya sarana pengangkutan resmi/truk tinja. 7. IPLT tidak berfungsi maksimal. 8. Perda belum tersosialisasi dengan maksimal. 9. UPTD belum ada 10. Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian ada tetapi kemampuan ekonomi rendah. 11. Kesadaran Masy. Yang tidak punya akses Sebagian tidak ada padahal ekonomi mampu. 12. Masih ada masyarakat yang enggan menyambung SR nya ke SPALDT. 13. Iuran masyarakat untuk operasional kurang. 14. Rasa akan memiliki

Tujuan	Sasaran	Data dasar
	Kampanye/ Edukasi Higiene dan sanitasi aman berkelanjutan serta adanya dukungan aturan lokal (Perdes). 13. untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas lingkungan. 14. Adanya KPP Pengelola Tangki Septik Komunal dengan SK Kepala Desa. 15. Adanya pemahaman masyarakat pengguna layanan Tangki Septik Komunal untuk memelihara infrastruktur terbangun. 16. Adanya dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah dan swasta	prasarana kurang. 15. Bantuan pendanaan akan tangkiseptick individual (SPALDS dan SPALDT) baik dari APBD dan lainnya rendah.

Sumber: Pokja PKP Kab.Rokan Hulu 2024

b. Persampahan

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan sektor Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Tercapainya Sanitasi yang berkelanjutan dengan peningkatan penanganan dan pengurangan sampah.	1. Meningkatkan capaian pengurangan sampah wilayah perkotaan dari 6,8% menjadi 15% pada tahun 2029. 2. Adanya pembangunan sarana TPS pada daerah padat layanan TPA. 3. Tersedianya sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan. 4. Berfungsinya TPS3R (4 Unit) 5. Adanya infrastruktur bank sampah baru. 6. Adanya gerakan bersama untuk semua lapisan masyarakat komposting sampah organik dari rumah. 7. Meningkatkan capaian penanganan sampah wilayah perkotaan dari 66,9%	1. Pengurangan sampah wilayah perkotaan 6,8% dari jumlah penduduk perkotaan. 2. Adanya TPS (Tempat Pengumpulan Sampah) liar 3. Sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sudah berumur tua. 4. TPS3R ada tidak berfungsi (4 Unit) 5. Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih rendah sebesar 0,02%. 6. Sampah belum terolah secara optimal seperti sampah organik menjadi kompos. 7. Penanganan sampah wilayah perkotaan sebesar 66,9%.

Tujuan	Sasaran	Data dasar
	menjadi 80% pada tahun 2029.	8. Alat Berat masih kurang.
	8. Berjalannya Perda yang menjangkau semua lapisan Masyarakat.	9. Perda tidak berjalan maksimal.
	9. Tersedianya tenaga operator yang mempunyai keahlian dalam pengolahan sampah di TPS3R dan TPA.	10. SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas.
	10. Adanya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam kegiatan Promosi/ Kampanye/ Edukasi Higiene dan sanitasi aman berkelanjutan.	11. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah & prilaku membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
	11. Adanya dukungan aturan lokal (Perdes) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas lingkungan.	12. Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya terhadap akses informasi, dan mengolah sampah secara benar dan tidak membuang sampah disembarang tempat.
	12. Adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.	13. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan penyadaran.
	13. Terbentuknya Forum CSR.	14. Belum dikembangkannya potensi masyarakat secara sistematis.
		15. Belum adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.
		16. Belum ada penggalian pendanaan dari sektor swasta.

Sumber: Pokja PKP Kab.Rokan Hulu 2024.

3.2.2.Tahapan Pengembangan Sanitasi

Rencana pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota. Tahapan pengembangan dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tabel tahapan pengembangan sanitasi memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan air limbah domestik dan persampahan hingga lima (5) tahun kedepan. Rencana pengembangan sanitasi dibagi 2 tahapan yaitu:

1. Tahapan jangka pendek.
Tahapan jangka pendek dihitung dua tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).
2. Tahapan jangka menengah.
Tahapan jangka menengah dihitung lima tahun dari penyusunan dokumen (n+5) tahapan jangka menengah di rumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

a. Tahapan jangka pendek

Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan persentase eksisting air limbah domestik serta target jangka pendek dan menengah dari sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), maka terdapat dua SPALD yaitu SPALD Setempat (SPALDS) dan SPALD Terpusat (SPALDT).

Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Komponen	Target RPJMN 2025-2029 (%)	Target - 2029(%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
		Provinsi Riau	Kab. Rohul	Kab. Rohul			
Akses Aman	15%	11,0%	10,0%	5,0%	1,39%	8,6%	3,6%
Akses Layak	90%	90,0%	95,0%	93,0%	91,05%	4,0%	2,0%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	90,0%	85,0%	81,00%	9,0%	4,0%
Akses Layak Bersama	0%*	0%**	5,0%	3,0%	1,76%	3,2%	1,2%
Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	3,0%	6,89%	-6,89%	-3,89%
Akses Belum Layak*	0%	0,0%	0,0%	1,5%	3,50%	-3,50%	-2,0%
BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	3,0%	5,45%	-5,45%	-2,45%

Sumber: Instrumen SSK 2024

Berdasarkan Instrumen SSK 2024 Kabupaten Rokan Hulu, dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah, Kabupaten Rokan Hulu hanya terdapat satu kondisi

pengembangan yang direferensikan yaitu pengelolaan dengan SPALD-Setempat. Tahapan pengembangan dibagi dalam target jangka pendek dan menengah:

Kondisi 1	Pengelolaan dengan SPALD-Setempat jangka pendek; Pengelolaan dengan SPALD-Setempat jangka menengah.
Kondisi 2	

Tabel berikut berisi analisis sistem yang disarankan dalam pengembangan air limbah domestik serta analisis tipe penyesuaian kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Sistem Pengembangan Pembangunan sistem
Air Limbah Domestik**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal	Jumlah jiwa perlu mendapatkan akses di tahun akhir perencanaan perkulurahan desa")
1	Rokan Iv Koto	Cipang Kiri Hulu	SPALDS	SPALDS	2.169
2	Rokan Iv Koto	Cipang Kiri Hilir	SPALDS	SPALDS	1.580
3	Rokan Iv Koto	Sikebau Jaya	SPALDS	SPALDS	48
4	Rokan Iv Koto	Lubuk Bendahara	SPALDS	SPALDS	459
5	Rokan Iv Koto	Lubuk Bendahara Timur	SPALDS	SPALDS	52
6	Rokan Iv Koto	Tanjung Medan	SPALDS	SPALDS	80
7	Rokan Iv Koto	Rokan	SPALDS	SPALDS	265
8	Rokan Iv Koto	Cipang Kanan	SPALDS	SPALDS	800
9	Rokan Iv Koto	Rokan Koto Ruang	SPALDS	SPALDS	131
10	Rokan Iv Koto	Rokan Timur	SPALDS	SPALDS	117
11	Rokan Iv Koto	Tibawan	SPALDS	SPALDS	398
12	Rokan Iv Koto	Lubuk Betung	SPALDS	SPALDS	302
13	Rokan Iv Koto	Alahan	SPALDS	SPALDS	25
14	Rokan Iv Koto	Pemandang	SPALDS	SPALDS	94
15	Pendalian Iv Koto	Pendalian	SPALDS	SPALDS	344
16	Pendalian Iv Koto	Bengkolan Salak	SPALDS	SPALDS	431
17	Pendalian Iv Koto	Suligi	SPALDS	SPALDS	638
18	Pendalian Iv Koto	Air Panas	SPALDS	SPALDS	-
19	Pendalian Iv Koto	Sungai Kandis	SPALDS	SPALDS	571
20	Tandun	Kumain	SPALDS	SPALDS	-

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal	Jumlah jiwa perlu mendapatkan akses di tahun akhir perencanaan perkelurahan desa")
21	Tandun	Bono Tapung	SPALDS	SPALDS	-
22	Tandun	Dayo	SPALDS	SPALDS	-
23	Tandun	Tapung Jaya	SPALDS	SPALDS	-
24	Tandun	Tandun	SPALDS	SPALDS	3.971
25	Tandun	Puo Raya	SPALDS	SPALDS	882
26	Tandun	Sungai Kuning	SPALDS	SPALDS	299
27	Tandun	Koto Tandun	SPALDS	SPALDS	1.317
28	Tandun	Tandun Barat	SPALDS	SPALDS	675
29	Kabun	Kabun	SPALDS	SPALDS	6.147
30	Kabun	Aliantan	SPALDS	SPALDS	254
31	Kabun	Koto Ranah	SPALDS	SPALDS	200
32	Kabun	Bencah Kesuma	SPALDS	SPALDS	34
33	Kabun	Batu Langkah Besar	SPALDS	SPALDS	147
34	Kabun	Giti	SPALDS	SPALDS	421
35	Ujung Batu	Ujung Batu	SPALDS	SPALDS	636
36	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	SPALDS	SPALDS	220
37	Ujung Batu	Ngaso	SPALDS	SPALDS	136
38	Ujung Batu	Suka Damai	SPALDS	SPALDS	487
39	Ujung Batu	Pematang Tebih	SPALDS	SPALDS	415
40	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	SPALDS	SPALDS	114
41	Rambah Samo	Marga Mulya	SPALDS	SPALDS	-
42	Rambah Samo	Rambah Samo	SPALDS	SPALDS	384
43	Rambah Samo	Karya Mulya	SPALDS	SPALDS	-
44	Rambah Samo	Rambah Baru	SPALDS	SPALDS	269
45	Rambah Samo	Rambah Utama	SPALDS	SPALDS	256
46	Rambah Samo	Pasir Makmur	SPALDS	SPALDS	-
47	Rambah Samo	Masda Makmur	SPALDS	SPALDS	-
48	Rambah Samo	Langkitin	SPALDS	SPALDS	316

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal	Jumlah jiwa perlu mendapatkan akses di tahun akhir perencanaan perkelurahan desa")
49	Rambah Samo	Lubuk Napal	SPALDS	SPALDS	272
50	Rambah Samo	Sungai Salak	SPALDS	SPALDS	287
51	Rambah Samo	Teluk Aur	SPALDS	SPALDS	214
52	Rambah Samo	Lubuk Bilang	SPALDS	SPALDS	583
53	Rambah Samo	Sungai Kuning	SPALDS	SPALDS	-
54	Rambah	Menaming	SPALDS	SPALDS	15
55	Rambah	Rambah Tengah Hulu	SPALDS	SPALDS	1.228
56	Rambah	Rambah Tengah Barat	SPALDS	SPALDS	1.202
57	Rambah	Pasir Pengaraian	SPALDS	SPALDS	-
58	Rambah	Rambah Tengah Utara	SPALDS	SPALDS	1
59	Rambah	Rambah Tengah Hilir	SPALDS	SPALDS	-
60	Rambah	Pasir Baru	SPALDS	SPALDS	-
61	Rambah	Tanjung Belit	SPALDS	SPALDS	-
62	Rambah	Sialang Jaya	SPALDS	SPALDS	-
63	Rambah	Koto Tinggi	SPALDS	SPALDS	183
64	Rambah	Suka Maju	SPALDS	SPALDS	199
65	Rambah	Pematang Berangan	SPALDS	SPALDS	-
66	Rambah	Babussalam	SPALDS	SPALDS	28
67	Rambah	Pasir Maju	SPALDS	SPALDS	-
68	Rambah Hilir	Pasir Jaya	SPALDS	SPALDS	-
69	Rambah Hilir	Pasir Utama	SPALDS	SPALDS	-
70	Rambah Hilir	Rambah Hilir	SPALDS	SPALDS	-
71	Rambah Hilir	Rambah Muda	SPALDS	SPALDS	-
72	Rambah Hilir	Sungai Sitolang	SPALDS	SPALDS	-
73	Rambah Hilir	Lubuk Krapat	SPALDS	SPALDS	-
74	Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	SPALDS	SPALDS	44
75	Rambah Hilir	Rambah Hilir Timur	SPALDS	SPALDS	62
76	Rambah Hilir	Rambah	SPALDS	SPALDS	-

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal	Jumlah jiwa perlu mendapatkan akses di tahun akhir perencanaan perkelurahan desa")
77	Rambah Hilir	Serombau Indah	SPALDS	SPALDS	981
78	Rambah Hilir	Sungai Dua Indah	SPALDS	SPALDS	285
79	Rambah Hilir	Muara Musu	SPALDS	SPALDS	357
80	Rambah Hilir	Sejati	SPALDS	SPALDS	-
81	Bangun Purba	Bangun Purba	SPALDS	SPALDS	139
82	Bangun Purba	Pasir Agung	SPALDS	SPALDS	-
83	Bangun Purba	Pasir Intan	SPALDS	SPALDS	-
84	Bangun Purba	Rambah Jaya	SPALDS	SPALDS	-
85	Bangun Purba	Bangun Purba Timur Jaya	SPALDS	SPALDS	639
86	Bangun Purba	Bangun Purba Barat	SPALDS	SPALDS	212
87	Bangun Purba	Tangun	SPALDS	SPALDS	710
88	Tambusai	Tambusai Barat	SPALDS	SPALDS	243
89	Tambusai	Sungai Kumango	SPALDS	SPALDS	432
90	Tambusai	Batas	SPALDS	SPALDS	-
91	Tambusai	Tali Kumain	SPALDS	SPALDS	-
92	Tambusai	Tambusai Tengah	SPALDS	SPALDS	2.705
93	Tambusai	Rantau Panjang	SPALDS	SPALDS	100
94	Tambusai	Sialang Rindang	SPALDS	SPALDS	-
95	Tambusai	Tambusai Timur	SPALDS	SPALDS	227
96	Tambusai	Sukamaju	SPALDS	SPALDS	501
97	Tambusai	Batang Kumu	SPALDS	SPALDS	1.255
98	Tambusai	Tingkok	SPALDS	SPALDS	293
99	Tambusai	Lubuk Soting	SPALDS	SPALDS	1.124
100	Tambusai Utara	Suka Damai	SPALDS	SPALDS	-
101	Tambusai Utara	Mahato Sakti	SPALDS	SPALDS	-
102	Tambusai Utara	Rantau Sakti	SPALDS	SPALDS	-
103	Tambusai Utara	Payung Sekaki	SPALDS	SPALDS	-
104	Tambusai Utara	Pagar Mayang	SPALDS	SPALDS	-

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal	Jumlah jiwa perlu mendapatkan akses di tahun akhir perencanaan perkelurahan desa")
105	Tambusai Utara	Simpang Harapan	SPALDS	SPALDS	-
106	Tambusai Utara	Mekar Jaya	SPALDS	SPALDS	-
107	Tambusai Utara	Bangun Jaya	SPALDS	SPALDS	80
108	Tambusai Utara	Tambusai Utara	SPALDS	SPALDS	-
109	Tambusai Utara	Tanjung Medan	SPALDS	SPALDS	-
110	Tambusai Utara	Mahato	SPALDS	SPALDS	89
111	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	SPALDS	SPALDS	682
112	Kepenuhan	Kepenuhan Barat	SPALDS	SPALDS	180
113	Kepenuhan	Kepenuhan Raya	SPALDS	SPALDS	846
114	Kepenuhan	Kepenuhan Baru	SPALDS	SPALDS	666
115	Kepenuhan	Kepenuhan Timur	SPALDS	SPALDS	209
116	Kepenuhan	Kepenuhan Hilir	SPALDS	SPALDS	91
117	Kepenuhan	Ulak Patian	SPALDS	SPALDS	347
118	Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	SPALDS	SPALDS	201
119	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Mulya	SPALDS	SPALDS	625
120	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	SPALDS	SPALDS	186
121	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Jaya	SPALDS	SPALDS	33
122	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	SPALDS	SPALDS	206
123	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SPALDS	SPALDS	50
124	Kepenuhan Hulu	Pekan Tebih	SPALDS	SPALDS	136
125	Kepenuhan Hulu	Kepayang	SPALDS	SPALDS	30
126	Kunto Darussalam	Kota Intan	SPALDS	SPALDS	202
127	Kunto Darussalam	Kota Lama	SPALDS	SPALDS	-
128	Kunto Darussalam	Bukit Intan Makmur	SPALDS	SPALDS	-
129	Kunto Darussalam	Bagan Tujuh	SPALDS	SPALDS	-
130	Kunto Darussalam	Kota Raya	SPALDS	SPALDS	85
131	Kunto Darussalam	Kota Baru	SPALDS	SPALDS	105
132	Kunto Darussalam	Sungai Kuti	SPALDS	SPALDS	

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal	Jumlah jiwa perlu mendapatkan akses di tahun akhir perencanaan perkelurahan desa")
					-
133	Kunto Darussalam	Pasir Indah	SPALDS	SPALDS	10
134	Kunto Darussalam	Muara Dilam	SPALDS	SPALDS	-
135	Kunto Darussalam	Pasir Luhur	SPALDS	SPALDS	-
136	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	SPALDS	SPALDS	-
137	Pagaran Tapah Darussalam	Kembang Damai	SPALDS	SPALDS	-
138	Pagaran Tapah Darussalam	Sangkir Indah	SPALDS	SPALDS	-
139	Bonai Darussalam	Teluk Sono	SPALDS	SPALDS	544
140	Bonai Darussalam	Rawa Makmur	SPALDS	SPALDS	71
141	Bonai Darussalam	Sontang	SPALDS	SPALDS	258
142	Bonai Darussalam	Bonai	SPALDS	SPALDS	2.563
143	Bonai Darussalam	Pauh	SPALDS	SPALDS	607
144	Bonai Darussalam	Kasang Padang	SPALDS	SPALDS	761
145	Bonai Darussalam	Kasang Mungkal	SPALDS	SPALDS	161

Sumber: Instrumen SSK 2024

b. Tahapan Penegembangan Persampahan

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun : 2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	82,0%	80,0%	73,0%	66,9%	13,1%	6,1%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	18,0%	15,0%	10,0%	6,8%	8,2%	3,2%

Sumber: Instrumen SSK 2024

Pada tabel diatas mengilustrasikan rencana target pengelolaan sampah yang akan dicapai pada jangka pendek dan jangka menengah. Terlihat bahwa masih terdapat gap capaian yang cukup tinggi untuk dicapai hingga akhir tahun 2029.. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pengembangan persampahan Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu:

- 1. Kondisi 1 : sampah tertangani ke pemrosesan akhir
- 2. Kondisi 2 : sampah tertangani skala rumah tangga
- 3. Kondisi 3 : pengurangan sampah

Adapun tahapan pengembangan yang disarankan berdasarkan analisis instrumen SSK 2024, untuk target 80% penanganan dan 15% pengurangan hingga akhir tahun perencanaan (2029) digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Sistem Pengembangan Pembangunan Persampahan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
1	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hulu	452,27	32,44	0,44	-	-	-	-	-
2	ROKAN IV KOTO	Cipang Kiri Hilir	376,89	27,03	0,37	-	-	-	-	-
3	ROKAN IV KOTO	Sikebau Jaya	383,35	27,50	0,37	-	-	-	-	-
4	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara	438,63	31,46	319,52	472,19	94,44	377,76	62,98	58,24
5	ROKAN IV KOTO	Lubuk Bendahara Timur	413,51	29,66	0,40	-	-	-	-	-
6	ROKAN IV KOTO	Tanjung Medan	188,09	13,49	0,19	-	-	-	-	-
7	ROKAN IV KOTO	Rokan	419,97	30,12	0,41	-	-	-	-	-
8	ROKAN IV KOTO	Cipang Kanan	315,87	22,66	0,31	-	-	-	-	-
9	ROKAN IV KOTO	Rokan Koto Ruang	405,61	29,09	0,39	-	-	-	-	-
10	ROKAN IV KOTO	Rokan Timur	293,62	21,06	0,29	-	-	-	-	-
11	ROKAN IV KOTO	Tibawan	203,17	14,58	0,20	-	-	-	-	-
12	ROKAN IV KOTO	Lubuk Betung	264,19	18,95	0,26	-	-	-	-	-
13	ROKAN IV KOTO	Alahan	193,12	13,85	0,19	-	-	-	-	-
14	ROKAN IV KOTO	Pemandang	270,65	19,41	0,26	-	-	-	-	-
15	PENDALIAN IV KOTO	Pendalian	569,29	40,83	0,55	-	-	-	-	-
16	PENDALIAN IV KOTO	Bengkolan Salak	261,31	18,75	0,26	-	-	-	-	-
17	PENDALIAN IV KOTO	Suligi	502,52	36,04	0,49	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
18	PENDALIAN IV KOTO	Air Panas	463,04	33,21	0,45	-	-	-	-	-
19	PENDALIAN IV KOTO	Sungai Kandis	256,29	18,39	0,25	-	-	-	-	-
20	TANDUN	Kumain	452,99	32,49	0,44	-	-	-	-	-
21	TANDUN	Dayo	783,93	56,23	0,76	-	-	-	-	-
22	TANDUN	Dayo	783,93	56,23	0,76	-	-	-	-	-
23	TANDUN	Tapung Jaya	689,17	49,43	0,67	-	-	-	-	-
24	TANDUN	Tandun	1.212,51	86,96	883,25	1.261,86	252,38	1.009,49	165,42	126,24
25	TANDUN	Puo Raya	429,30	30,79	0,42	-	-	-	-	-
26	TANDUN	Sungai Kuning	338,13	24,25	0,33	-	-	-	-	-
27	TANDUN	Koto Tandun	431,45	30,95	314,29	449,04	89,81	359,24	58,86	44,95
28	TANDUN	Tandun Barat	279,26	20,03	203,43	290,75	58,15	232,60	38,12	29,17
29	KABUN	Kabun	2.871,53	205,95	2.091,77	3.052,62	610,53	2.442,10	404,58	350,33
30	KABUN	Aliantan	1.469,51	105,40	1,41	-	-	-	-	-
31	KABUN	Koto Ranah	341,72	24,51	0,33	-	-	-	-	-
32	KABUN	Bencah Kesuma	604,46	43,36	0,58	-	-	-	-	-
33	KABUN	Batu Langkah Besar	492,47	35,32	0,48	-	-	-	-	-
34	KABUN	Giti	362,54	26,01	0,35	-	-	-	-	-
35	UJUNG BATU	Ujung Batu	3.020,85	216,65	2.200,54	3.244,83	648,97	2.595,87	432,32	395,33
36	UJUNG BATU	Ujung Batu Timur	1.021,55	73,27	744,15	1.097,29	219,46	877,84	146,19	133,69
37	UJUNG BATU	Ngaso	911,72	65,39	664,14	979,38	195,88	783,51	130,49	119,37

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
38	UJUNG BATU	Suka Damai	1.073,24	76,98	781,80	1.152,92	230,59	922,34	153,61	140,54
39	UJUNG BATU	Pematang Tebih	1.428,59	102,46	1.040,66	1.534,48	306,90	1.227,59	204,44	186,93
40	RAMBAH SAMO	Rambah Samo Barat	692,04	49,64	504,12	719,86	143,98	575,89	94,34	71,77
41	RAMBAH SAMO	Marga Mulya	440,78	31,62	0,43	-	-	-	-	-
42	RAMBAH SAMO	Rambah Samo	481,70	34,55	350,90	501,09	100,22	400,88	65,67	49,98
43	RAMBAH SAMO	Karya Mulya	536,26	38,46	0,52	-	-	-	-	-
44	RAMBAH SAMO	Rambah Baru	533,39	38,26	0,52	-	-	-	-	-
45	RAMBAH SAMO	Rambah Utama	665,48	47,73	484,77	692,22	138,45	553,78	90,72	69,01
46	RAMBAH SAMO	Pasir Makmur	268,49	19,26	0,26	-	-	-	-	-
47	RAMBAH SAMO	Masda Makmur	227,57	16,33	0,22	-	-	-	-	-
48	RAMBAH SAMO	Langkitin	315,16	22,61	0,31	-	-	-	-	-
49	RAMBAH SAMO	Lubuk Napal	198,14	14,21	0,20	-	-	-	-	-
50	RAMBAH SAMO	Sungai Salak	136,40	9,79	0,14	-	-	-	-	-
51	RAMBAH SAMO	Teluk Aur	450,83	32,34	328,41	468,96	93,80	375,17	61,46	46,76
52	RAMBAH SAMO	Lubuk Bilang	199,58	14,32	0,20	-	-	-	-	-
53	RAMBAH SAMO	Sungai Kuning	568,57	40,78	0,55	-	-	-	-	-
54	RAMBAH	Menaming	506,83	36,35	369,20	531,78	106,36	425,43	70,01	56,23
55	RAMBAH	Rambah Tengah Hulu	434,32	31,15	0,42	-	-	-	-	-
56	RAMBAH	Rambah Tengah Barat	539,85	38,72	0,52	-	-	-	-	-
57	RAMBAH	Pasir Pengaraian	577,18	41,40	420,45	605,54	121,11	484,44	79,71	63,99

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
58	RAMBAH	Rambah Tengah Utara	593,69	42,58	432,48	622,77	124,56	498,22	81,98	65,74
59	RAMBAH	Rambah Tengah Hilir	564,98	40,52	411,56	592,80	118,56	474,24	78,04	62,68
60	RAMBAH	Pasir Baru	252,70	18,13	0,25	-	-	-	-	-
61	RAMBAH	Tanjung Belit	385,51	27,65	0,37	-	-	-	-	-
62	RAMBAH	Sialang Jaya	189,53	13,60	0,19	-	-	-	-	-
63	RAMBAH	Koto Tinggi	1.289,32	92,47	939,21	1.352,49	270,50	1.082,00	178,03	142,79
64	RAMBAH	Suka Maju	702,81	50,41	511,96	737,27	147,46	589,82	97,05	77,86
65	RAMBAH	Pematang Berangan	903,82	64,82	658,39	948,15	189,63	758,52	124,81	100,13
66	RAMBAH	Babussalam	430,02	30,84	313,25	451,19	90,24	360,96	59,40	47,71
67	RAMBAH	Pasir Maju	271,36	19,47	0,27	-	-	-	-	-
68	RAMBAH HILIR	Pasir Jaya	585,08	41,97	0,57	-	-	-	-	-
69	RAMBAH HILIR	Pasir Utama	963,40	69,10	0,93	-	-	-	-	-
70	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir	671,22	48,14	0,65	-	-	-	-	-
71	RAMBAH HILIR	Rambah Muda	735,12	52,73	0,71	-	-	-	-	-
72	RAMBAH HILIR	Sungai Sitolang	428,58	30,74	0,42	-	-	-	-	-
73	RAMBAH HILIR	Lubuk Krapat	333,82	23,95	0,33	-	-	-	-	-
74	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Tengah	437,20	31,36	0,42	-	-	-	-	-
75	RAMBAH HILIR	Rambah Hilir Timur	452,99	32,49	0,44	-	-	-	-	-
76	RAMBAH HILIR	Rambah	1.676,26	120,22	1.221,07	1.723,82	344,77	1.379,06	224,55	157,99
77	RAMBAH HILIR	Serombau Indah	427,86	30,69	0,42	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
78	RAMBAH HILIR	Sungai Dua Indah	245,52	17,61	0,24	-	-	-	-	-
79	RAMBAH HILIR	Muara Musu	553,49	39,70	403,19	569,29	113,86	455,44	74,16	52,25
80	RAMBAH HILIR	Sejati	384,07	27,55	0,37	-	-	-	-	-
81	BANGUN PURBA	Bangun Purba	435,76	31,26	0,42	-	-	-	-	-
82	BANGUN PURBA	Pasir Agung	550,62	39,49	0,53	-	-	-	-	-
83	BANGUN PURBA	Pasir Intan	423,56	30,38	0,41	-	-	-	-	-
84	BANGUN PURBA	Rambah Jaya	448,68	32,18	0,44	-	-	-	-	-
85	BANGUN PURBA	Bangun Purba Timur Jaya	824,13	59,11	0,80	-	-	-	-	-
86	BANGUN PURBA	Bangun Purba Barat	388,38	27,86	0,38	-	-	-	-	-
87	BANGUN PURBA	Tangun	412,07	29,56	0,40	-	-	-	-	-
88	TAMBUSAI	Tambusai Barat	784,65	56,28	0,76	-	-	-	-	-
89	TAMBUSAI	Sungai Kumango	959,81	68,84	0,93	-	-	-	-	-
90	TAMBUSAI	Batas	477,40	34,24	0,46	-	-	-	-	-
91	TAMBUSAI	Tali Kumain	368,28	26,42	0,36	-	-	-	-	-
92	TAMBUSAI	Tambusai Tengah	1.463,05	104,93	1.065,76	1.490,33	298,07	1.192,27	193,14	126,51
93	TAMBUSAI	Rantau Panjang	421,40	30,23	0,41	-	-	-	-	-
94	TAMBUSAI	Sialang Rindang	564,26	40,47	0,55	-	-	-	-	-
95	TAMBUSAI	Tambusai Timur	564,98	40,52	0,55	-	-	-	-	-
96	TAMBUSAI	Sukamaju	816,95	58,60	595,11	832,21	166,45	665,77	107,85	70,66
97	TAMBUSAI	Batang Kumu	1.919,62	137,68	1,85	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
98	TAMBUSAI	Tingkok	397,71	28,53	0,39	-	-	-	-	-
99	TAMBUSAI	Lubuk Soting	1.221,12	87,58	1,18	-	-	-	-	-
100	TAMBUSAI UTARA	Suka Damai	702,09	50,36	0,68	-	-	-	-	-
101	TAMBUSAI UTARA	Mahato Sakti	717,89	51,49	0,69	-	-	-	-	-
102	TAMBUSAI UTARA	Rantau Sakti	885,15	63,49	0,85	-	-	-	-	-
103	TAMBUSAI UTARA	Payung Sekaki	615,23	44,13	0,60	-	-	-	-	-
104	TAMBUSAI UTARA	Pagar Mayang	441,50	31,67	0,43	-	-	-	-	-
105	TAMBUSAI UTARA	Simpang Harapan	478,11	34,29	0,46	-	-	-	-	-
106	TAMBUSAI UTARA	Mekar Jaya	389,81	27,96	0,38	-	-	-	-	-
107	TAMBUSAI UTARA	Bangun Jaya	1.404,90	100,76	1.023,40	1.461,43	292,29	1.169,15	191,53	145,75
108	TAMBUSAI UTARA	Tambusai Utara	1.947,62	139,68	1,87	-	-	-	-	-
109	TAMBUSAI UTARA	Tanjung Medan	933,25	66,94	0,90	-	-	-	-	-
110	TAMBUSAI UTARA	Mahato	5.312,33	381,00	5,10	-	-	-	-	-
111	KEPENUHAN	Kepenuhan Tengah	1.071,08	76,82	1,03	-	-	-	-	-
112	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat	503,96	36,15	0,49	-	-	-	-	-
113	KEPENUHAN	Kepenuhan Raya	475,96	34,14	0,46	-	-	-	-	-
114	KEPENUHAN	Kepenuhan Baru	475,24	34,09	0,46	-	-	-	-	-
115	KEPENUHAN	Kepenuhan Timur	585,80	42,02	0,57	-	-	-	-	-
116	KEPENUHAN	Kepenuhan Hilir	255,57	18,33	0,25	-	-	-	-	-
117	KEPENUHAN	Ulak Patian	265,62	19,05	0,26	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
118	KEPENUHAN	Rantau Binuang Sakti	145,74	10,46	0,14	-	-	-	-	-
119	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Mulya	663,33	47,58	0,64	-	-	-	-	-
120	KEPENUHAN	Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	295,77	21,22	0,29	-	-	-	-	-
121	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Jaya	567,13	40,68	0,55	-	-	-	-	-
122	KEPENUHAN HULU	Kepenuhan Hulu	1.475,97	105,86	1,42	-	-	-	-	-
123	KEPENUHAN HULU	Muara Jaya	863,62	61,94	0,83	-	-	-	-	-
124	KEPENUHAN HULU	Pekan Tebih	620,97	44,54	452,35	660,46	132,10	528,37	87,56	76,02
125	KEPENUHAN HULU	Kepayang	501,09	35,94	0,49	-	-	-	-	-
126	KUNTO DARUSSALAM	Kota Intan	1.347,47	96,64	1,30	-	-	-	-	-
127	KUNTO DARUSSALAM	Kota Lama	2.958,40	212,18	2.155,05	3.065,00	613,00	2.452,00	400,82	296,95
128	KUNTO DARUSSALAM	Bukit Intan Makmur	391,97	28,12	0,38	-	-	-	-	-
129	KUNTO DARUSSALAM	Bagan Tujuh	297,21	21,32	0,29	-	-	-	-	-
130	KUNTO DARUSSALAM	Kota Raya	852,13	61,12	620,74	882,82	176,57	706,26	115,45	85,52
131	KUNTO DARUSSALAM	Kota Baru	994,27	71,31	0,96	-	-	-	-	-
132	KUNTO DARUSSALAM	Sungai Kutu	399,87	28,68	0,39	-	-	-	-	-
133	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Indah	305,82	21,94	0,30	-	-	-	-	-
134	KUNTO DARUSSALAM	Muara Dilam	1.135,69	81,45	1,09	-	-	-	-	-
135	KUNTO DARUSSALAM	Pasir Luhur	396,28	28,42	0,39	-	-	-	-	-
136	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Pagaran Tapah	867,92	62,25	0,84	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Eksisting			Target			Yang harus dipenuhi di akhir tahun perencanaan SSK	
			Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Timbulan sampah Total (Ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)	Penanganan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (ton/tahun)*	Penanganan Sampah (ton/tahun)*
137	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Kembang Damai	458,01	32,85	0,44	-	-	-	-	-
138	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	Sangkir Indah	266,34	19,11	0,26	-	-	-	-	-
139	BONAI DARUSSALAM	Teluk Sono	681,28	48,86	0,66	-	-	-	-	-
140	BONAI DARUSSALAM	Rawa Makmur	279,98	20,08	0,27	-	-	-	-	-
141	BONAI DARUSSALAM	Sontang	1.019,40	73,11	0,98	-	-	-	-	-
142	BONAI DARUSSALAM	Bonai	895,20	64,21	652,11	985,12	197,03	788,10	132,82	135,99
143	BONAI DARUSSALAM	Pauh	1.103,39	79,14	1,06	-	-	-	-	-
144	BONAI DARUSSALAM	Kasang Padang	654,71	46,96	0,63	-	-	-	-	-
145	BONAI DARUSSALAM	Kasang Mungkal	638,20	45,78	0,62	-	-	-	-	-

Sumber: Instrumen SSK 2024

3.2.3.Skenario Pencapaian Sasaran

Skenario pencapaian sasaran hingga akhir tahun perencanaan diambil berdasarkan pada tabel tahapan pengembangan mulai N atau tahun penyusunan atau capaian eksisting, jangka pendek atau N+2 dan jangka menengah N+5. Berikut tabel skenario pencapaian sasaran untuk sektor Air Limbah Domestik dan Persampahan:

Tabel 3.7 Skenario Capaian Sasaran Sanitasi

Komponen	Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	1,39%	2%	3,2%	5%	8%	10%
Akses Layak	91,05 %	91,6%	92,2%	93%	94%	95%
Akses Layak Perdesaan	6,89%	5%	4%	3%	1,5%	0%
Akses Belum Layak	3,5%	2,9%	2%	1,5%	0,9%	0%
BABS Tertutup	-					
BABS Terbuka	5,45%	4,45%	3,90%	3%	1,8%	0%
Persampahan						
Penanganan Perkotaan	66,9%	68%	70%	73%	76%	80%
Pengurangan Perkotaan	6,8%	7,5%	8,5%	10%	13%	15%

Sumber: Analisa Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Analisis perkiraan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten. Dari analisis belanja APBD Kabupaten akan terlihat tren pertumbuhan belanja sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Tren ini yang akan digunakan untuk memperkirakan besaran belanja sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu hingga akhir periode perencanaan SSK. Untuk menetapkan besaran belanja sanitasi yang lebih terstruktur, maka selain hal-hal di atas perlu juga dilakukan identifikasi biaya operasional dan pemeliharaan untuk aset sanitasi yang telah terbangun. Secara spesifik, informasi ini dapat dilihat melalui tabel-tabel pendanaan berikut:

Tabel 3.8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata2 pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2)	2.611.000.000,00	5.400.081.000,00	6.354.989.227,00	3.476.634.400,00	3.412.520.000,00	19,34
1,1	Air Limbah Domestik	1.244.000.000,00	1.900.000.000,00	1.650.000.000,00	1.675.000.000,00	2.010.000.000,00	2,79
1,2	Sampah rumah tangga	1.367.000.000,00	3.500.081.000,00	4.704.989.227,00	1.801.634.400,00	1.402.520.000,00	26,65
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	-	3.710.000.000,00	750.000.000,00	3.339.000.000,00	3.377.500.000,00	88,86
2,1	DAK Sanitasi	-	3.710.000.000,00	750.000.000,00	3.339.000.000,00	3.377.500.000,00	88,86
2,2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
2,3	DAK Perumahan Dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		2.611.000.000,00	1.690.081.000,00	5.604.989.227,00	137.634.400,00	35.020.000,00	6,07
Total Belanja Langsung		861.489.846.000,00	1.254.904.393.000,00	1.136.694.964.000,00	2.053.709.190.000,00	2.022.883.245.000,00	28,85
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		0,30	0,13	0,49	0,01	0,0017	0,19
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							2

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.9 Perkiraan Besar Pendanaan Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu kedepan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Belanja Langsung	2.045.145.319.439	2.052.561.016.368	2.060.003.602.613	2.067.473.175.676	2.074.969.833.411	10.300.152.947.507
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	40.902.906.389	41.051.220.327	41.200.072.052	41.349.463.514	41.499.396.668	206.003.058.950
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	5.726.406.894	5.747.170.846	5.768.010.087	5.788.924.892	5.809.915.534	28.840.428.253

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.10 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu untuk operasional/ Pemeliharaan dan investasi sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata2 pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	261.100.000	545.008.100	635.498.923	347.663.440	341.252.000	19,55
1,1	Air Limbah Domestik						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan	124.400.000	195.000.000	165.000.000	167.500.000	201.000.000	1,53
1,2	Sampah rumah tangga						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan	136.700.000	350.008.100	470.498.923	180.163.440	140.252.000	26,65

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.11 Perkiraan Besar pendanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu untuk kebutuhan operasional/ pemeliharaan aset sanitasi Terbangun hingga tahun 2029

No	Uraian	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3)	355.038.581	362.139.352	369.382.139	376.769.782	384.305.178	1.847.635.033
1,1	Air Limbah Domestik						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Justified)	209.120.400	213.302.808	217.568.864	221.920.241	226.358.646	1.088.270.960
1,2	Sampah rumah tangga						
1	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Justified)	145.918.181	148.836.544	151.813.275	154.849.541	157.946.532	759.364.073

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

Tabel 3.12 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	355.038.581	362.139.352	369.382.139	376.769.782	384.305.178	1.847.635.033
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	40.902.906.389	41.051.220.327	41.200.072.052	41.349.463.514	41.499.396.668	206.003.058.950
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	5.726.406.894	5.747.170.846	5.768.010.087	5.788.924.892	5.809.915.534	28.840.428.253
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD murni) (2-1)	40.547.867.808	40.689.080.975	40.830.689.913	40.972.693.731	41.115.091.490	204.155.423.917
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	5.371.368.314	5.385.031.493	5.398.627.948	5.412.155.110	5.425.610.356	26.992.793.220

Sumber : Analisa Keuangan Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

BAB 4.

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Pada strategi percepatan pembangunan sanitasi ini akan menjelaskan pernyataan tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai dalam pengembangan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu periode 5 tahun kedepan. Tujuan dirumuskan berdasarkan hasil dari penetapan Tahapan pengembangan sanitasi, selanjutnya setelah tujuan ditetapkan, maka perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran disusun berdasarkan kaidah SMART atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan berjangka waktu jelas. Untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap sub sektor sanitasi sebagaimana yang telah direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi pelaksanaan.

4.1. Air Limbah Domestik

Strategi Pengembangan air limbah domestik selama lima tahun mendatang di Kabupaten Rokan Hulu dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Strategi 1 :

Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik yang layak dan aman berkelanjutan;

Strategi ini merupakan upaya untuk Menurunkan Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029.

Strategi 2 :

Advokasi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berbagai pihak;

Strategi ini merupakan upaya untuk Menurunkan Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029.

Strategi 3 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara kesehatan dan tidak melakukan BABs;

Strategi ini merupakan upaya untuk Menurunkan Menurunkan angka BABS dari 5,45% menjadi 0% pada tahun 2029. Menurunkan angka akses belum layak dari 3,50% menjadi 0% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Layak dari 91,05% menjadi 95% pada tahun 2029. Meningkatkan Akses Aman dari 1,39% menjadi 10% pada tahun 2029.

Strategi 4 :

Mengoptimalkan sarana prasarana pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;

Strategi ini merupakan upaya untuk mengopersionalkannya sarana pengangkutan resmi/truk tinja yang sudah ada dan juga untuk memfungsikan IPLT yang sudah dibangun tahun 2020.

Strategi 5 :

Adanya Sosialisasi Perda ALD;

Strategi ini merupakan upaya agar semua stageholder mengetahui peran masing-masing sebagai payung hukum untuk Pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi, ini merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sanitasi aman. Pengelolaan air limbah domestik merupakan pekerjaan panjang dari hulu hingga hilir.

Strategi 6 :

Menyiapkan lembaga dalam pengelolaan air limbah domestik yang memiliki kapasitas kelembagaan dan SDM yang berdaya;

Strategi ini merupakan upaya untuk Adanya/terbentuknya dan Pengesahan UPTD sebagai lembaga Air Limbah Domestik yang memisahkan regulator dan Operator untuk mendukung L2T2, Tersedianya kapasitas SDM operator yang berdaya, dan memahami operasional IPAL/IPLT serta manajerial serta Tersusunnya rencana kerja UPTD baru.

Strategi 7:

Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan;

Adanya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam kegiatan Promosi/ Kampanye/ Edukasi Higiene dan sanitasi aman berkelanjutan serta adanya dukungan aturan lokal (Perdes) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas lingkungan

Strategi 8:

Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola dalam Air Limbah Domestik;

Strategi ini merupakan upaya untuk adanya KPP Pengelola Tangki Septik Komunal dengan SK Kepala Desa dan adanya pemahaman masyarakat pengguna layanan Tangki Septik Komunal untuk memelihara infrastruktur terbangun.

Strategi 8:

Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan air limbah domestik;

Strategi ini merupakan sebagai upaya untuk adanya dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah (Non APBD) dan swasta. Kemampuan anggaran APBD Kabupaten Rokan Hulu terbatas sehingga untuk mempercepat target sanitasi perlu bantuan anggaran dari berbagai sumber pendanaan di luar APBD. Oleh karena itu pemerintah melalui Pokja PKP perlu bekerjasama dengan sumber pendanaan lain seperti Baznas, CSR dan lain-lain.

4.2. Persampahan

Strategi 1 :

Meningkatkan Pembangunan & Optimalisasi sarana prasarana pengurangan sampah;

Strategi ini merupakan sebagai upaya untuk Meningkatkan capaian pengurangan sampah wilayah perkotaan dari 6,8% menjadi 15% pada tahun 2029.

Strategi 2 :

Meningkatkan sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampai pemrosesan akhir;

Strategi ini merupakan sebagai upaya karena adanya Sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sudah berumur tua, TPS3R ada tidak berfungsi (4 Unit), Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah masih rendah, Sampah belum terolah secara optimal seperti sampah organik menjadi kompos, Penanganan sampah wilayah perkotaan sebesar 66,9%, serta Alat Berat masih kurang.

Strategi 3 :

Meningkatkan sosialisai Perda ke semua lapisan masyarakat & Pengembangan Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan;

Strategi ini merupakan sebagai upaya disebabkan Perda tidak berjalan maksimal. Turunan perda yang bersifat operasional belum ada, serta Kurangnya sosialisasi.

Strategi 4 :

Meningkatkan Jumlah dan kapasitas SDM Pengelola dalam Persampahan;

Strategi ini merupakan sebagai upaya adanya SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas

Strategi 5 :

Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan;

Strategi ini merupakan sebagai upaya disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah & prilaku membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya terhadap akses informasi, dan mengolah

sampah secara benar dan tidak membuang sampah disembarang tempat, Kurangnya sosialisasi, edukasi dan penyadaran, Belum dikembangkannya potensi masyarakat secara sistematis, serta belum adanya gerakan bersama pengelolaan persampahan pada tataran elite, pegawai pemerintah, LSM dan masyarakat.

Strategi 5 :

Peningkatan Pola Kerjasama pemerintah swasta;

Strategi ini merupakan sebagai upaya untuk adanya dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah (Non APBD) dan swasta. Kemampuan anggaran APBD Kabupaten Rokan Hulu terbatas sehingga untuk mempercepat target sanitasi perlu bantuan anggaran dari berbagai sumber pendanaan di luar APBD. Oleh karena itu pemerintah melalui Pokja PKP perlu bekerjasama dengan sumber pendanaan lain seperti Baznas, CSR dan lain-lain.

BAB 5.
PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Program, kegiatan dan indikasi pendanaan berisikan rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dari kegiatan sub sektor air limbah domestik dan persampahan.

5.1. Rekapitulasi Kebutuhan

Rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 0.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah	30.65	31.793				
2	Persampahan	1.315	3.430	1.205	1.575	935	8.460
Jumlah (a)		31.96	35.223	30.682	31.012	29.068	166.225

Sumber : Matrik Program Kegiatan SSK 2024

Tabel diatas menunjukan total kebutuhan pendanaan sanitasi dari dua sektor yaitu Air Limbah Domestik dan Persampahan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 166.225.000.000; hingga akhir tahun perencanaan di tahun 2029 melalui berbagai sumber pendanaan.

Tabel 0.2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun (x Rp. 1 Juta)

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	31.968.182.823	35.222.952.823	30.681.737.823	31.012.249.403	29.068.131.203	157.953.254.075
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	5.371.368.314	5.385.031.493	5.398.627.948	5.412.155.110	5.425.610.356	26.992.793.220
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	26.596.814.510	29.837.921.330	25.283.109.876	25.600.094.293	23.642.520.847	130.960.460.855
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	83,2%	84,7%	82,4%	82,5%	81,3%	83%

Sumber : Matrik Program Kegiatan (Analisa Pokja PKP Kabupaten Rokan Hulu 2024).

Tabel 0.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran (x Rp. 1Juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	

A	Pemerintah						-
1	APBD Kabupaten	6.714	8.943	5.573	6.303	5.262	32.795
2	APBD Provinsi	3.202	3.052	3.052	2.761	2.927	14.993
3	APBN	5.503	6.703	5.503	6.422	5.255	29.386
4	DAK	5.503	5.803	5.803	5.222	5.255	27.586
Jumlah A		20.922	24.501	19.931	20.708	18.699	104.760
B	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta/DT	2.792	2.752	2.792	2.611	2.627	13.573
2	Masyarakat	157.306	158.929	154.544	147.378	145.423	763.580
Jumlah B		160.098	161.681	157.336	149.989	148.050	777.153
Total (A+B)		181.020	186.182	177.267	170.697	166.749	881.913

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan

Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 0.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.589	7.328	4.713	5.938	4.487	28.055
2	Persampahan	1.125	1.615	860	365	775	4.740
Jumlah		6.714	8.943	5.573	6.303	5.262	32.795

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 0.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi (x Rp. 1Juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	2.752	2.752	2.752	2.611	2.627	13.493
2	Persampahan	450	300	300	150	300	1.500
Jumlah		3.202	3.052	3.052	2.761	2.927	14.993

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 0.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

(x Rp. 1Juta)							
No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.503	5.503	5.503	5.222	5.255	26.986
2	Persampahan	0	1.200	0	1.200	0	2.400
Jumlah		5.503	6.703	5.503	6.422	5.255	29.386

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 0.7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.503	5.503	5.503	5.222	5.255	26.986
2	Persampahan	0	300	300	0	0	600
Jumlah		5.503	5.803	5.803	5.222	5.255	27.586

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Tabel 0.8 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR (x Rp. 1Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	2.752	2.752	2.752	2.611	2.627	13.493
2	Persampahan	40	-	40	-	-	80
Jumlah		2.792	2.752	2.792	2.611	2.627	13.573

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

Tabel 0.9 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat (x Rp. 1Juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	157.306	158.914	154.539	147.368	145.413	763.540
2	Persampahan	0	15	5	10	10	40
Jumlah		157.306	158.929	154.544	147.378	145.423	763.580

Sumber : Matrik Program Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu 2024

BAB 6.

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

Monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah dalam pengamatan program/kegiatan secara terus menerus, sehingga dapat terlihat tren atau masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program sesuai atau tidak dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain. Juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil Monitoring adalah kesimpulan-kesimpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan tiga hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana.

Hasil evaluasi adalah kesimpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan melihat ketepatan hasil melalui perbandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya. Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan alat manajemen dalam upaya menjamin mutu suatu program/kegiatan, yang terdiri dari 2(dua) aspek yang saling terkait, yaitu monitoring dan evaluasi.

Bab VI tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK berisi mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan. Pelaporannya dilakukan melalui sistem monev berbasis web : www.nawasis.org Pelaporan pemantauan ini mencakup 3 (tiga) modul yaitu :

- Modul Data Teknis yang memuat informasi capaian akses air limbah domestik dan capaian akses sampah perkotaan.
- Modul program dan pendanaan yang memuat informasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai investasinya serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan.

- Modul sarana dan prasarana yang memuat informasi tentang sistem, jenis dan jumlah infrastruktur eksisting termasuk informasi mengenai keberfungsianannya.

Jadwal pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi SSK Kabupaten Indragiri Hulu mencakup tabel Input Capaian Strategis, Input menu investasi, Input menu akses, Input menu infrastruktur, Input menu progres dan Pelatihan Nawasis serta tabel evaluasi dengan penanggung jawab utama adalah Bapedda. Pengumpul data dan informasi serta pengolah data/pemantau adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Waktu pelaksanaan dijadwalkan pada bulan Oktober- Desember tahun berjalan. Penerima pelaporan adalah Bupati/Kepala OPD. Jadwal Pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi SSK selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2025-2029

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev													Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Ok	Nov	Des	Penanggung jawab utama	Pengumpul data dan dokumentasi	Pengolah Data/pemantau	Penerima Laporan (Dinas/Badan/Institusi)		
1	Input Capaian Strategis													Bappedda			6 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
2	Input menu investasi													Bappedda			3 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
3	Input menu akses													Bappedda			5 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
4	Input menu insfratuktur													Bappedda			6 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
5	Input DAK													DLH-PERKIM			4 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
6	Input menu progres													Bappedda			12 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
7	Evaluasi Triwulan													Bappedda			Setiap 3 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
8	Input satu data sanitasi													Bappedda			4 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
9	Input SPM													Bappedda			4 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
10	Koordinasi Pendanaan													Bappedda			7 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	
11	Pelatihan Nawasis													Bappedda			2 bulan	Bappedda sebagai sekretariat Pokja	

Sumber: Pokja PKP Kab. Rokan Hulu 2024

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH (REKAPITULASI) KAB. ROKAN HULU

Provinsi/Ka : RIAU/Rokan Hulu
Tahun : 2024

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) / LOKASI PRIORITAS	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATU AN	Volume					Total Vol.	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	DAK	SWAST A/CSR	MASYAR AKAT
						2025	2026	2027	2028	2029													
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																						
1	PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN DAERAH																						
	1 Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Dok	1	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-
	2 Pembentukan Lembaga Pengelola Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Layanan IPLT	100.616	43.248	Keg	1	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-
2	PERENCANAAN UMUM																						
	1 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Dok	-	1	-	-	-	1	-	350	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-
	2 Penysusunan Dokumen Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Layanan IPLT	100.616	43.248	Dok	-	1	-	-	-	1	-	500	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-
3	PENYIAPAN MASYARAKAT (SPALD-S INDIVIDUAL) DENGAN PENDEKATAN STBM																						
	1 Pengumpulan data 5 pilar STBM/Monitoring/Verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Dok	1	-	-	-	-	2	51	-	-	-	-	101	101	-	-	-	-	-
	2 Monitoring dan Evaluasi kegiatan STBM	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	-	-	1	-	-	2	-	-	55	-	-	109	109	-	-	-	-	-
	3 Monitoring Kegiatan PAMSIMAS	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	-	-	1	-	-	2	-	-	41	-	-	83	83	-	-	-	-	-
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	-	1	-	1	-	3	-	29	-	29	-	87	87	-	-	-	-	-
	5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	1	1	1	6	406	406	406	406	406	2.436	2.436	-	-	-	-	-
	6 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	12	1	1	1	1	17	138	96	96	96	96	618	618	-	-	-	-	-
	7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	1	1	1	6	9	9	9	9	9	54	54	-	-	-	-	-
	8 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	-	1	-	1	-	3	-	1.233	-	1.233	-	3.699	3.699	-	-	-	-	-
	9 Deklarasi STBM	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	-	-	-	3	100	100	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-
4	SPALD SETEMPAT (ON-SITE SISTEM)																						
	4.1. BERBASIS INDIVIDUAL																						
	1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	ROKAN IV KOTO	5.668	114.979	Unit	283	283	283	283	283	1.417	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	5.490	549	549	1.098	1.098	549	1.647
	2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	PENDALIAN IV KOTO	2.778	84.900	Unit	139	139	139	139	139	695	538	538	538	538	538	2.691	269	269	538	538	269	1.345
	3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	TANDUN	4.283	7.959	Unit	214	214	214	214	214	1.071	830	830	830	830	830	4.149	415	415	830	830	415	2.074
	4. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	KABUN	3.218	48.964	Unit	161	161	161	161	161	805	623	623	623	623	623	3.117	312	312	623	623	312	1.558
	5. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	UJUNG BATU	3.466	27.830	Unit	173	173	173	173	173	867	671	671	671	671	671	3.357	336	336	671	671	336	1.679
	6. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	RAMBAH SAMO	7.500	92.036	Unit	375	375	375	375	375	1.875	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	7.265	726	726	1.453	1.453	726	3.632
	7. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	RAMBAH	2.669	68.333	Unit	133	133	133	133	133	667	517	517	517	517	517	2.585	259	259	517	517	259	1.293
	8. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	RAMBAH HILIR	4.448	47.313	Unit	222	222	222	222	222	1.112	862	862	862	862	862	4.308	431	431	862	862	431	2.154

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) / LOKASI PRIORITAS	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATU AN	Volume					Total Vol.	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	DAK	SWAST A/CSR	MASYAR AKAT
						2025	2026	2027	2028	2029													
	9. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	BANGUN PURBA	4.447	20.783	Unit	222	222	222	222	222	1.112	861	861	861	861	861	4.307	431	431	861	861	431	2.154
	10. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	TAMBUSAI	14.193	150.240	Unit	710	710	710	710	710	3.548	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	13.747	1.375	1.375	2.749	2.749	1.375	6.874
	11. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	TAMBUSAI UTARA	9.347	366.236	Unit	467	467	467	467	467	2.337	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811	9.054	905	905	1.811	1.811	905	4.527
	12. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	KEPENUHAN	9.698	86.718	Unit	485	485	485	485	485	2.425	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	9.394	939	939	1.879	1.879	939	4.697
	13. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	KEPENUHAN HULU	7.107	9.377	Unit	355	355	355	355	355	1.777	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	6.884	688	688	1.377	1.377	688	3.442
	14. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	KUNTO DARUSSALAM	3.655	13.088	Unit	183	183	183	183	183	914	708	708	708	708	708	3.540	354	354	708	708	354	1.770
	15. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	7.954	14.367	Unit	398	398	398	398	398	1.989	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	7.704	770	770	1.541	1.541	770	3.852
	16. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	BONAI DARUSSALAM	3.748	15.091	Unit	187	187	187	187	187	937	726	726	726	726	726	3.630	363	363	726	726	363	1.815
5	SPALD TERPUSAT (SPALD-T)																						
	5.1. SPALD TERPUSAT (SPALD-T) SKALA PERMUKIMAN																						
	1. Pengembangan SR pada SPALD Terbangun	Lokasi IPALD Terbangun	2.696	4.475	SR	135	135	135	135	134	674	654	654	654	654	649	3.264	3.264	-	-	-	-	-
6	INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA																						
	6.1. OPTIMALISASI KEBERFUNGSIAN IPLT																						
	1. Pengadaan Truck Tinja	Layanan IPLT	100.616	43.248	Unit	-	1	-	1	-	2	-	200	-	200	-	400	400	-	-	-	-	-
	2. Sosialisasi dan Pendataan Rumah Layanan IPLT	Layanan IPLT	100.616	43.248	Keg	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	3. Pelatihan SDM SOP IPLT	Layanan IPLT	100.616	43.248	Keg	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	4. Operasional IPLT	Layanan IPLT	100.616	43.248	Keg	1	1	1	1	1	5	250	250	250	250	250	1.250	1.250	-	-	-	-	-
7	PEMASARAN SANITASI																						
	1. Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kabupaten	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	1	1	1	5	150	150	150	150	150	750	750	-	-	-	-	-
	2. Koordinasi Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah untuk pendanaan Sanitasi di Kabupaten	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	1	1	1	6	150	150	150	150	150	900	900	-	-	-	-	-
	3. Pembentukan Lembaga Peduli Sanitasi ditingkat Kabupaten	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	-	-	-	-	1	80	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-
	4. Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kabupaten	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	1	1	1	5	150	150	150	150	150	750	750	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											30.653	31.793	29.477	29.437	28.133	157.765	30.224	13.493	26.986	30.568	13.493	66.368
B.	PENGOLAHAN PERSAMPAHAN																						
1	PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN																						
	1. Review PERDA Pengolaan Sampah Rumah Tangga	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	2. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	-	-	-	-	1	110	-	-	-	-	110	110	-	-	-	-	-
	3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	1	1	1	5	150	150	150	150	150	750	750	-	-	-	-	-
	4. Sosialisasi Perda Sampah	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	-	-	-	-	1	150	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-
2	PERENCANAAN UMUM																						
	1. Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP)	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	-	1	-	-	-	1	-	800	-	-	-	800	800	-	-	-	-	-
	2. Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	-	-	-	-	1	150	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) / LOKASI PRIORITAS	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATU AN	Volume					Total Vol.	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	DAK	SWAST A/CSR	MASYAR AKAT
						2025	2026	2027	2028	2029													
3	PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA																						
	3.1. PENYIAPAN MASYARAKAT (KERANJANG SAMPAH INDIVIDU, 3R SKALA RUMAH TANGGA)																						
	1. Pelatihan Wirausaha Persampahan	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	-	1	-	1	3	150	-	150	-	150	450	450	-	-	-	-	-
	2. Sosialisasi Pengelolaan Sampah dengan 3R	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	1	1	1	5	150	150	150	150	150	750	600	150	-	-	-	-
	3. Pelatihan SDM Bank Sampah	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	-	1	-	1	3	150	-	150	-	150	450	300	150	-	-	-	-
	4. Sosialisai Penanganan Sampah Regional	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	1	1	-	-	-	2	150	150	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-
	5. Peralatan Pengomposan	Kab. Rokan Hulu	549.048	752.555	Keg	-	1	1	-	-	2	-	300	300	-	-	600	-	-	-	600	-	-
	3.2. KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH																						
	1. Pengadaan Gerobak Sampah bermotor	Layanan TPA	100.616	43.248	Unit	2	-	2	-	-	4	40	-	40	-	-	80	-	-	-	-	80	-
	2. Pengadaan Mobil Pick Up Sampah	Layanan TPA	100.616	43.248	Unit	-	2	-	-	2	4	-	260	-	-	260	520	520	-	-	-	-	-
	3. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah bermotor	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	1	1	1	1	4	-	15	15	15	15	60	60	-	-	-	-	-
	4. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Mobil Pick Up Sampah	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	-	1	1	1	3	-	-	20	20	20	60	60	-	-	-	-	-
4	PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA																						
	4.1. PEMBANGUNAN TPS																						
	4.1.1. Pembangunan TPS Biasa - Berbasis Kelembagaan																						
	1. Pembebasan Lahan	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	1	-	-	-	1	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15
	2. Penyusunan DED	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	1	-	-	-	1	-	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
	3. Supervisi dan Pembangunan TPS	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	-	1	-	-	1	-	-	15	-	-	15	15	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan TPS	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	-	-	1	1	2	-	-	-	5	5	10	-	-	-	-	-	10
	4.1.2. Optimalisasi TPS 3R Terbangun																						
	1. Penyusunan RAB Optimalisasi TPS 3R	Lokasi TPS3R Tidak berfungsi	3.000	1.800	Keg	1	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-
	2. Pelaksanaan Pembangunan/Optimalisasi TPS 3R	Lokasi TPS3R Tidak berfungsi	3.000	1.800	Unit	-	3	-	-	-	3	-	150	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-
	3. Pembentukan/Pengaktifkan Kembali KSM dan KPP TPS 3R	Lokasi TPS3R Tidak berfungsi	3.000	1.800	Keg	-	1	-	-	-	1	-	20	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-
	4. Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan	Lokasi TPS3R Tidak berfungsi	3.000	1.800	Keg	-	1	-	-	-	1	-	30	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-
	5. Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R		3.000	1.800	Keg	-	-	1	1	1	3	-	-	5	5	5	15	-	-	-	-	-	15
5	ALAT ANGKUT TPS KE TPA																						
	1. Pengadaan Dump Truck	Layanan TPA	100.616	43.248	Unit	-	1	-	-	-	1	-	180	-	-	-	180	180	-	-	-	-	-
	2. Operasi dan Pemeliharaan Dump Truck	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	-	1	1	1	3	-	-	10	10	10	30	30	-	-	-	-	-
	3. Pengadaan Amroll Truck	Layanan TPA	100.616	43.248	Unit	-	-	1	-	-	1	-	-	200	-	-	200	200	-	-	-	-	-
	4. Operasi dan Pemeliharaan Amroll Truck	Layanan TPA	100.616	43.248	Keg	-	-	-	1	1	2	-	-	-	20	20	40	40	-	-	-	-	-
6	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)																						
	1. Pengadaan Excavator	TPA	100.616	43.248	Unit	-	1	-	-	-	1	-	1.200	-	-	-	1.200	-	-	1.200	-	-	-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) / LOKASI PRIORITAS	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATU AN	Volume					Total Vol.	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	DAK	SWAST A/CSR	MASYAR AKAT
						2025	2026	2027	2028	2029													
	2. Pengadaan Buldozer	TPA	100.616	43.248	Unit	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1.200	-	1.200	-	-	1.200	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan persampahan											1.315	3.430	1.205	1.575	935	8.460	4.740	600	2.400	600	80	40
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN											31.968	35.223	30.682	31.012	29.068	166.225	34.964	14.093	29.386	31.168	13.573	66.408

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

ANTON